

Edisi 119 TH. XLIV, 2014



Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DI LAUT KAPAN JAYA



ISSN 1979-5912



9 771979 591288

Parlementaria

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Achmad Djuned SH, M.Hum
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si.
(Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H.
(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),
Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

Sugeng Irianto, S.Sos
M. Ibnur Khalid
Iwan Armanias
Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos
Supriyanto
Agung Sulistiono, SH
Rahayu Setiowati
Muhammad Husen
Sofyan Effendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya
Naefuroji
M. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH
Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,
Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350
Fax. (021) 5715536,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;
www.dpr.go.id/berita



PENGANTAR REDAKSI

Pidato perdana Presiden Jokowi se usai dilantik tanggal 20 Oktober lalu menegaskan, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Pidato tersebut diangkat Parlemen sebagai laporan utama. Pasialnya posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan dalam pembangunan. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.

Kalangan DPR berharap dapat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah

untuk menyambut program penting menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. DPR pasti mendukung atas nama bangsa, untuk memperkuat NKRI dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tiga fungsi utama dewan yang selalu setia mengisi Majalah ini adalah pengawasan, menyoroti kenaikan BBM dan pembatalan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan anggaran, mengulas soal anggaran infrastruktur. Sedangkan legislasi mengulas tekad dewan yang ingin wujudkan legislasi yang berkualitas dan aspiratif.

Pada rubrik pernik disajikan laporan peliputan pemilihan Ketua Koordinator Wartawan DPR. Ternyata pemilihan pengurus wartawan tidak kalah seru dibanding pemilihan Pimpinan DPR. Para awak pers yang sehari-hari meliput kegiatan DPR membawa suasana pemilihan dengan banyaknya perdebatan, interupsi, skorsing, meski tanpa *walk out* dan gulingkan meja serta memecahkan gelas. Selamat kepada Hilman Matauch dari Metro TV- yang terpilih menjadi nakoda wartawan DPR untuk periode dua tahun mendatang. (mp)



**Kini Majalah
dan Buletin
Parlementaria
hadir lebih dekat
dengan Anda.**

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

DI LAUT KITA JAYA | JAYA KITA DI LAUT

Dunia mengakui Indonesia pernah menjadi bangsa yang digdaya di laut. Armada Laut dua kerajaan Sriwijaya (638-1030M) dan Majapahit (1293-1500M) pernah menguasai kawasan Asia Tenggara. Para pelaut Nusantara juga telah menjalin hubungan baik dengan bangsa Aborigin di Australia, berniaga ke Venice-Italia, Afrika dan Timur Tengah.



PROFIL FADLI ZON

| 55

Di tengah kesibukan bekerja, ia menerima kedatangan Parlementaria dengan ramah. Sosoknya begitu tenang dan cerdas. Tuturnya jelas penuh makna. Inilah Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Kepada Parlementaria, ia berbagi cerita menarik tentang masa kecil di kampung dan romantika perjuangan hidupnya di masa muda. Ada kisah pilu dan bahagia yang mewarnai perjalanan hidup seorang Fadli Zon.



PENGAWASAN

| 33

HARGA MINYAK TURUN, KENAIKAN BBM SUBSIDI TIDAK TEPAT

Kenaikan harga BBM subsidi premium dan solar sebesar 2000 rupiah diprediksi akan semakin mensengsarakan rakyat dan berdampak luas, bahkan kenaikan itu akan mengerek harga-harga bahan pokok sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.



DAFTAR ISI

PROLOG	8
Di Laut Kita Jaya Jaya Kita Di Laut	
LAPORAN UTAMA	10
Perlu Dukungan Politik Dan Anggaran Wujudkan Poros Maritim	
SUMBANG SARAN	29
Menata Kembali Indonesia Sebagai Bangsa Maritim	
PENGAWASAN	33
Harga Minyak Turun, Kenaikan BBM Subsidi Tidak Tepat	
JSS Batal, Poros Tol Laut Digalakkan	35
ANGGARAN	37
DPR Akan Dukung Program Pemerintah	
Infrastruktur Sebagai Roda Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	41
LEGISLASI	45
DPR Ingin Wujudkan Legislasi Yang Berkualitas dan Aspiratif	
FOTO BERITA	49
KIAT SEHAT	53
12 Makanan Untuk Mengatasi Anemia	
PROFIL	55
Fadli Zon, Perjuangan Hidup Menuju Puncak	
KUNJUNGAN KERJA	62
SOROTAN	66
Perlu Penjelasan Detail Program KIS	
LIPUTAN KHUSUS	69
DPR Sukses Gelar Sidang Parlemen Asia-Pasifik di Surabaya	
SELEBRITIS	73
Bob Tutupoly, Sang Legendaris yang Tetap Eksis	
PERNIK	76
Pengurus PIA Periode 2014-2019 Resmi Dilantik	
Tak Kalah Seru, Pilih Ketua Wartawan Dibanding Ketua DPR	77
POJOK PARLE	79
Islah DPR Dibukukan	

Emplasemen lahan eks Rel dan Stasiun KA Lasem

Kami Forum Warga Pemakai Lahan Eks Rel dan Stasiun KA Lasem Desa Dorokandang Kec. Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah, menyampaikan tindak lanjut surat PT. KAI No. 001/PA/LS/IV/2014 tgl 16 April 2014 mengenai permasalahan tersebut, dengan kronologi :

Bahwa karena suatu hal PT. KAI menghentikan kegiatan perkereta-apian di Jalur Lasem-Jatirogo lebih dari 20 tahun lamanya. Dan sampai saat ini PT. KAI telah melantarkan tanah eks rel dan Stasiun KA Lasem, dengan tidak mempergunakannya sesuai sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah negara (HPL).

Bahwa kondisi bangunan dan tanah di eks rel dan stasiun KA Lasem beserta lingkungan hidup disekelilingnya telah beralih fungsi, dimana rel kereta api telah hilang dan stasiun telah berubah fungsi.

Bahwa selama ini para pemakai lahan eks rel dan stasiun KA Lasem telah membayar pajak (PBB) setiap tahunnya dan telah menempati lahan tersebut lebih dari 30 tahun, kemudian PT. KAI

telah melayangkan surat perihal penyelesaian kontrak dan tarif sewa aset PT. KAI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tarif sewa yang meningkat melebihi 1000 % sehingga meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga berasal dari HPL tidak terbatas pada hak pakai, tetapi meliputi hak milik dan hak guna bangunan.

Bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanah tersebut sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara.

Bahwa apabila PT. KAI akan menggunakan/memanfaatkan hak atas tanah yang berlokasi di emplasemen lahan eks rel dan stasiun KA lasem yang masih dipergunakannya maka harus dikelola dengan baik sesuai dengan sifat dan

tujuan pemberian hak, dan BPN sebagai instansi yang berwenang, wajib meninjau kembali pemberian hak atas tanah tersebut kepada PT. KAI yang telah ditelantarkan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan pernyataan sikap antara lain :

Menolak segala bentuk tarif sewa terhadap emplasemen lahan eks rel dan stasiun KA Lasem yang akan dikenakan, sepanjang hak atas tanah yang diberikan oleh Negara kepada PT. KAI tidak digunakan sesuai tujuan pemberian hak atas tanah dan persyaratannya.

Memohon kepada BPN mencabut hak atas tanah di lokasi lahan eks rel dan stasiun KA Lasem yang sudah tidak sesuai dengan sifat dan peruntukan dan menerbitkan hak atas tanah atas lahan tersebut kepada para penggunanya

*Eddy Heryanto
Rembang, Jawa Tengah*

Permohonan Bantuan Atas Pelanggaran BKSDA Bengkulu

Saya ingin melaporkan pelanggaran yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu kepada para pengrajin kerang di DIY dan sekitarnya.

BKSDA Bengkulu tidak mensosialisasikan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa kepada masyarakat nelayan, pengumpul kulit kerang dan aparat Pemda setempat terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan kulit kerang.

Kemudian BKSDA Bengkulu mencekal pembelian kulit kerang mati tersebut, padahal saya telah memiliki surat rekomendasi dari LIPI (yang telah melakukan penelitian terhadap kulit kerang) terkait kelanjutan usaha pemanfaatan kulit kerang mati tersebut.

Akibat kelalaian dan pengecekan tersebut maka kualitas kulit kerang yang dibeli pelapor sudah rusak dan keropos sehingga tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, sehingga mengakibatkan kerugian usaha milk pelapor dkk, baik secara moril dan materil.

Pelapor telah melaporkan masalah tersebut kepada BKSDA Bengkulu, dan memohon kepada DPR RI untuk menindaklanjuti pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu ini.

*Muhamad B
Magelang, Jawa Tengah*



Usulan Tujuan Mudik Gratis

Saya ingin menyoroti program mudik gratis dari pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan sejak 2013 yang hanya untuk pulau Jawa. Saya ingin

mengusulkan agar diberikan mudik gratis juga untuk tujuan ke pulau lainnya, khususnya ke Provinsi Aceh, demi keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sukmawati

Jakarta Selatan, DKI Jakarta



Proyek KM.Inka Mina Diduga Tidak Sesuai Bestek

Saya mewakili Ketua LSM TORPEDO (Teropong Demokrasi Indonesia) menyampaikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan 7 unit kapal nelayan 30 GT dengan nama KM Inka Mina yang bersumber dari DAK dan APBN T.A. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut sebesar Rp,10,5 Milyar (@ Rp.1,5 Milyar) karena disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak dapat difungsikan sebagai kapal pencari ikan, dengan kondisi sebagai berikut:

Material kayu yang digunakan bermutu rendah sehingga banyak yang keropos.

Pemborong memakai mesin merk Yunchain buatan China yang harganya di pasaran sekitar Rp.25 juta/mesin sementara para nelayan penerima bantuan disuruh menandatangani kwitansi harga mesin sebesar Rp.100 juta.

Saat ini 2 kapal (KM Inka Mina 62 dan 64) telah berubah fungsi menjadi kapal pengangkut bawang tujuan Malaysia.

Kapal KM Inka 63 pada Desember 2013 sudah tenggelam karena keropos dan alat tangkap dari kapal tersebut yang dapat diselamatkan ditahan oleh pihak Diskanla Sumut dan tidak dikembalikan kepada nelayan penerima bantuan.

Ukuran panjang alat tangkap yang tersedia di kapal tidak sesuai yang seharusnya per unit 650 meter namun setelah diukur hanya 565 meter saja (kurang 85 m/unit).

Menurut ketentuan para nelayan penerima bantuan diberi kewenangan membuat sendiri kapal bantuan tersebut, namun pihak Diskanlasu justru menyerahkan pembuatan semua kapal tersebut kepada pemborong

Saya mohon agar temuan tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuk tim untuk memeriksa oknum Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

*Zainuddin Limbong
Medan, Sumut*

Pengaduan Masalah Tanah di Jalur Sutet

Tanah saya ada di jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 150 KV PLN UPKS 6 Jambi. Pada 2007/2008, saya dan pimpinan proyek sutet sepakat untuk pemasangan tiang di tengah tanah pelapor seluas ± 400 M² (4 tumbuk) yang terletak di Desa Mendalo, Kab. Muaro Jambi. Namun tanpa sepengetahuan pelapor (sedang pulang kampung) lokasi pemasangan tiang dipindahkan (maju ke samping kiri) + 32 M² akibatnya tanah yang hanya tersisa 5 tumbuk terpecah menjadi 2 bagian dan menjadi tidak dapat dimanfaatkan maupun dijual karena berada di bawah tiang sutet.

Ketika saya meminta tiang tersebut dibongkar karena tidak sesuai kesepakatan, Pimpro mengatakan akan membayar tanah pelapor bersamaan dengan pemasangan kabel, namun saat pembayaran kabel pelapor hanya mendapat uang kompensasi sebesar Rp. 30 juta sedangkan tanah yang hancur tersebut tidak ada penggantian sama sekali. Pelapor meminta harga tanah tersebut sebesar Rp.200 juta, karena pada 2008, harga tanah pelapor yang 4 tumbuk dibayar seharga Rp. 100 juta dengan dipotong biaya administrasi sebesar 5%, namun kwitansi pembayaran dan pemotongan tersebut

belum juga diterima oleh pelapor.

Saya berharap pada 2014 harga tanah yang 5 tumbuk tersebut menjadi Rp. 200 juta yang akan digunakan pelapor untuk berobat dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Saya memohon bantuan penyelesaian atas permasalahan tersebut dan agar dilakukan audit terkait bukti pembayaran yang tidak pernah diterima oleh pelapor.

*Drs. Arpandi
Kota Baru, Jambi*

Penolakan Nama Bandara

Saya Ketua Gerakan Amtufu Bangkit, menyampaikan penolakan penggunaan nama Mathilda Batlayeri sebagai nama pengganti Bandar Udara Saumlaki Baru di Maluku Tenggara Barat (MTB).

Alasan penolakan penggunaan nama tersebut adalah :

Diduga telah terjadi pemalsuan dokumen dalam memenuhi persyaratan Surat Dirjen Perhubungan Udara No. AU 101/1/15/DRJU.KUM-2013 tanggal 7 Februari 2013 sehingga terbit Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 976 Tahun 2013.

Pemda MTB tidak dapat membuktikan status Mathilda Batlayeri sebagai Pahlawan Nasional/Pejuang/Perintis Kemerdekaan dan telah memanfaatkan kekuasaannya serta

menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Saya telah berkoordinasi dengan Kapolres MTB dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai saat ini belum ada kemajuan.

Pelapor memohon DPR RI menindaklanjuti laporan dengan segera mengadakan *document review* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

*Jos Malindar
Maluku Tenggara, Maluku*



DI LAUT KITA JAYA | JAYA KITA DI LAUT

Dunia mengakui Indonesia pernah menjadi bangsa yang digdaya di laut. Armada Laut dua kerajaan Sriwijaya (638-1030M) dan Majapahit (1293-1500M) pernah menguasai kawasan Asia Tenggara. Para pelaut Nusantara juga telah menjalin hubungan baik dengan bangsa Aborigin di Australia, berniaga ke Venice-Italia, Afrika dan Timur Tengah. Raja Sriwijaya juga piawai membangun komunikasi politik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat fenomenal, naskah surat tersebut sampai sekarang masih disimpan. Bukti kejayaan lain bisa dilihat prasasti, relief, naskah kuno yang menjadi bukti konkrit betapa lekatnya bangsa ini dengan laut.

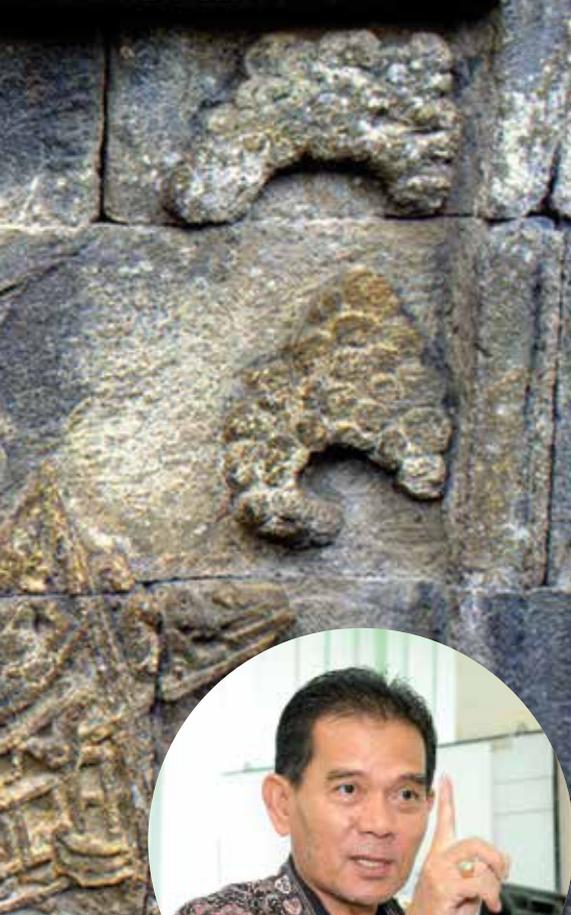
Salah satu hasil riset terbaru dilonarkan oleh Sejarawan Universitas Harvard Prof. Dr. Joyce E. Chaplin. Ia menyampaikan dugaan orang pertama yang berlayar mengelilingi dunia kemungkinan besar adalah pelaut Indonesia. Tokoh itu adalah Enrique de Malacca - nama yang di-

berikan Ferdinand Magellan – atau disini dikenal sebagai Panglima Awang pelaut dari Sumatera atau Malaka. Enrique menyertai Magellan dalam pelayaran dari tahun 1519 hingga 1521, yang didanai Raja Spanyol, untuk mencari rempah-rempah. Magellan meninggalkan Spanyol dengan konvoi lima kapal dan 270 kelasi, namun hanya satu kapal dan 35 pelaut yang berhasil kembali ke Spanyol. Magellan sendiri terbunuh di Filipina, sementara Panglima Awang, berhasil menggenapi pelayarannya.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meyakini catatan kejayaan masa lalu Indonesia dari era Sriwijaya, Majapahit sampai sekarang adalah di laut. Fakta penting yang seharusnya jadi pijakan namun sering terlupakan adalah, Indonesia adalah negara kepulauan 80 persen wilayahnya adalah laut. “Jadi benar kawasan Indonesia ini adalah kawasan maritim, pilihan logis kalau kita membangun kembali kejayaan di sana,” ungkapnya dalam kesempatan wawancara dengan *Parle* beberapa waktu lalu.

Sebenarnya tekad untuk kembali bangkit di laut pernah diserukan oleh Presiden Pertama RI Soekarno. Dalam salah satu pidatonya pada tahun 1953 ia menegaskan pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa pelaut. “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongsong-jongsong di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Namun tekad itu sepertinya tidak berjalan sebagaimana gelora semangat Bung Karno tempo dulu. Berlahan tapi pasti bangsa ini mengalami masa suram di laut. Salah satu hal yang mencengangkan, kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing terus saja marak terjadi. Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menunjukkan, potensi pendapatan sektor perikanan-



Ketua Umum KTNA Nasional Winarno Tohir

Tantangan

Untuk kedua kalinya sejak Indonesia merdeka tekad itu kembali disekurakan di laut kita jaya, jaya kita di laut. Sebagian pihak mengaku merinding, inilah momen kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi sebagian lain menampakkan kerisauan. Kenapa? Tantangan untuk menguasai laut sungguh tidak ringan. "Perlu kekuatan besar untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi nelayan kita, semua kelemahan mendasar. Kualitas SDM, teknologi, 60 persen masih terbelit kemiskinan, permodalan, pemasaran, kalau melihat semua titik lemah itu, nyaris *impossible*. Tantangannya berat, diperlukan kerja sama, dukungan anggaran, kerja keras. Hanya berani saja, komitmen saja, tanpa didukung misalnya anggaran ya dongeng," kata Ketua Umum KTNA Nasional Winarno Tohir.

Ia juga mengingatkan betapa tidak berdayanya nelayan Indonesia ketika melihat nelayan asing menjarah laut dengan kapal besar dan dukungan teknologi canggih. Perbedaan nelayan Indonesia dengan nelayan asing adalah mencari dan menangkap. Nelayan asing berangkat ke laut setelah mendeteksi keberadaan ikan dengan menggunakan pantauan satelit berteknologi canggih. Setelah menentukan titik koordinat gerombolan ikan mereka berlayar dalam kelompok besar dan mengepung posisi ikan dalam beberapa lokasi. "Dengan sonar dan teknologi yang dimiliki, kapal asing ini bekerja berkelompok, mengepung posisi ikan, menyiapkan jaring yang sesuai dan menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Nah itulah sebabnya pada saat mengepung gerombolan ikan mereka terkadang melintas wilayah Indonesia, karena ikannya lari ke sini. Sementara nelayan kita baru sebatas mengandalkan bintang, angin dan intuisi, baru terjun ke laut mencari ikan. Nelayan kita tahu lautnya dicuri tapi mereka hanya bisa menyaksikan," ungkap dia.

Itulah sebabnya pada akhirnya fakta angka bicara kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto Indonesia yang saat ini nilainya hanya

Rp 600 miliar, sementara Thailand yang luas wilayahnya jauh lebih kecil dari Indonesia, hasil ekspor perikanan bisa mencapai US\$ 10,1 miliar. "Ironis sekali, Indonesia sebagai negara besar seperti ini kemudian kita malah impor ikan. Maka upaya-upaya yang lebih konkret harus kita lakukan lebih tajam lagi. Terutama dari segi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di lapangan," kata anggota Komisi IV dari FPDIP I Made Urip.

Ia mendukung tekad pemerintah menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dan mendorong langkah terobosan besar dan strategis untuk mewujudkannya "Ini ide yang bagus, ideal, tetapi untuk mewujudkannya langkah kordinasi sebab masalahnya cukup rumit, butuh anggaran, dukungan politik dan butuh kebijakan strategis, dan juga butuh regulasi (Undang-undang) apalagi sarana-prasarana pendukung cukup banyak seperti tol laut, pembelian alat-alat untuk nelayan dan perumahan," jelas Made. Ia mengakui, Poros Maritim adalah proyek besar dan banyak sekali tantangannya, makanya sinergitas semua kementerian yang terkait harus bekerja dengan baik dibawah Menko Perekonomian Indroyono, harus mampu mengkoordinir semua kementerian yang terlibat di dalamnya. Tidak bisa hanya dibangun oleh Kementerian KP saja, tetapi semua pihak sebab butuh subsidi yang melibatkan Menteri ESDM, dukungan dana dengan Kemenkeu dan dari sisi perencanaan oleh Bappenas dengan rapi termasuk pengamanan.

Banyak tantangan, itu bisa dipastikan. Namun wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali ini mengingatkan niat baik perlu dimulai dengan optimisme. "Saya juga optimis Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo akan mampu mewujudkan ini apalagi dia orang kelautan yang pernah menjabat di Litbang KKP dan FAO di Roma. Menguasai betul masalah dengan ide-ide cemerlangnya diharapkan bisa mewujudkan poros maritim dan transportasi laut akan berkembang semakin baik," pungkas dia. (mp.iky.ayu) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.

an laut kita jika tanpa *illegal fishing* mencapai Rp. 365 triliun per tahun. Angka yang sungguh membuat anak bangsa tertegun, ditengah fakta yang disampaikan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) ternyata 60 persen nelayan kita terbelit kemiskinan.

20 Oktober 2014, pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Ketujuh Joko Widodo publik kembali tertegun ketika tekad yang sama kembali diulangi. "Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri," demikian presiden menegaskan dihadapan sidang pleno MPR RI.



PERLU DUKUNGAN POLITIK DAN ANGGARAN WUJUDKAN POROS MARITIM

Ide besar yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai **Poros Maritim Dunia** sudah tepat. Sudah waktunya konsentrasi kita diarahkan ke laut, sebab potensi perekonomian dan sumber daya alam kita begitu luar biasa, tetapi selama ini belum digarap secara serius dengan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis dan maksimal.

"Saya menjadi anggota Dewan memasuki periode ke empat. Saya tahu betul lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan. Nah ide Presiden ini merupakan terobosan yang luar biasa terutama menggerakkan sektor kelautan sebagai tumpuan ekonomi ke depan," ungkap anggota DPR I Made Urip dalam pembicangannya dengan Parle di Jakarta.

Meski demikian, kata Made, tidak cukup hanya ide saja, makanya tentu harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang konkret di lapangan, kemudian dukungan politik dan juga dukungan anggaran untuk

mewujudkan mimpi besar ini.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, banyak masalah yang perlu dituntaskan kelautan, misalnya potensi ikan belum digarap dan digali dengan baik, akibatnya banyak ikan kita yang dicuri terjadi *illegal fishing*. Banyak terjadi pencurian, dikumpulkan di tengah laut dan dioalah, ironisnya masuk lagi ke pasar Indonesia.

"Ironis sekali, Indonesia sebagai negara besar seperti ini kemudian kita malah impor ikan. Maka upaya-upaya yang lebih konkret harus kita lakukan lebih tajam lagi. Terutama dari segi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di lapangan," tandas anggota Komisi IV bidang kelautan dan perikanan ini.

Harapan kita semua, dengan terobosan Presiden Jokowi itu nanti diharapkan akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri terutama hasil laut. Di sinilah, lanjut Made, peran nelayan harus diberi perhatian lebih dibanding sebelumnya, utamanya bantuan modal, teknologi, alat tang-

kap, mesin-mesin kapal yang modern dan canggih serta penyediaan BBM yang cukup.

Sedangkan infrastruktur yang terkait pelabuhan-pelabuhan, harus diperbaiki. Namun berdasarkan pengamatannya, banyak pelabuhan perikanan yang *idle*- atau tidak jalan. Yang tidak jalan ini perlu direvitalisasi kembali. Banyaknya pelabuhan yang tidak berfungsi-padahal pembangunannya memakan dana yang tidak sedikit. Sementara daerah-daerah yang potensinya besar, harus dibangun fasilitas pelabuhan yang baru. Khususnya pembangunan pelabuhan antar pulau itu harus dilakukan.

Ia tidak menampik bahwa inspirasi yang dicanangkan Jokowi mungkin juga muncul dari ide-ide besar Bung Karno,- di laut kita jaya- laut juga mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, yang luar biasa belum dimaksimalkan sampai sekarang. Ini barangkali Jokowi dapat inspirasi dari sana, juga ide-ide besar yang lain, termasuk Poros Maritim Dunia.

Cuma sekarang butuh dukungan politik, anggaran yang besar untuk mewujudkan itu, sebab pembangunan di darat dan di laut berbeda. Yang jelas biaya pembangunan di laut akan lebih besar, misalnya membangun pelabuhan, pelabuhan antar pulau- sehingga hubungan antar pulau akan lebih lancar. Kemudian untuk menggarap hasil tangkapan laut juga perlu biaya besar, apalagi kondisi di laut termasuk berisiko tinggi, menyangkut cuaca dan gelombang besar.

Sumber ekonomi

Made lebih lanjut mengajak, kita perlu mencontoh negara-negara maju yang telah mampu mengelola wilayah laut dengan baik sebab merupakan sumber ekonomi yang luar biasa seperti Swedia- dengan ikan salmonnya. Negara itu menjadi kaya, kalau bisa mengelola kekayaan lautnya dengan baik.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, punya pengalaman kongkit- pelaku bisnis perikanan yang berhasil. Meski pendidikan formalnya rendah, sudah terbukti dan berani mengambil resiko. " Itu yang penting, sebagai seorang Pimpinan di Kementerian, harus berani ambil keputusan dan berani menghadapi resiko," ungkap Made Urip.

Misalnya, pemberlakuan moratorium kapal diatas 350 GT yang dikuasai asing atau pengusaha-pengusaha besar, dalam rangka menyelamatkan nelayan-nelayan kecil. Ia menyatakan setuju adanya moratorium. Dengan demikian nekayan-nelayan kecil bisa beroperasi dengan bagus, pada gilirannya kesejahteraan para nelayan akan meningkat.

Anggota Dewan ini perkembangan masalah kelautan sejak Menteri Perikanan dan Kelautan pertama, Sarwono Kusumaatmaja, kemudian Rohmin Dahuri, lalu Freddy Numberi, kemudian Fadel Muhammad dan Cicip Syarif Soetardjo dan sekarang Menteri. Biasanya setiap menteri memiliki kebijakan sendiri, namun sebaiknya kementerian perikanan sudah punya masterplan jangka panjang. Siapapun

menterinya, kemudian tidak lepas dari program besar jangka panjang ini. Mestinya antara hulu dan hilir itu harus sinkron untuk mencapai kemajuan bersama.

Betapa besarnya potensi sumber daya laut, kata Made, ditunjukkan dengan garis pantai kita terpanjang di dunia, juga pulau-pulau mencapai 17 ribu. Hingga kini, penamaan pulau saja belum tuntas, kemudian mengamankan pulau-pulau terluar juga belum dilakukan dengan rapi, akhirnya banyak pulau yang diklaim oleh negara tetangga.

Maka sebenarnya sangat kompleks persoalan perikanan dan kelautan kita. Jadi pengamanan terhadap hasil laut harus dilakukan, pengamanan pulau-pulau terdepan juga kita lakukan, penamaan pulau segera diselesaikan dan juga penamaan pulau yang belum ada penghuninya, harus ada aktifitas di sana. Kalau tidak ada usaha pengamanan, maka dengan mudah di klaim oleh negara lain, sebab dianggap pulau tidak bertuan

Makanya untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, harus ada langkah terobosan yang besar dan strategis yang dilakukan oleh pemerintah. "Ini ide yang bagus, ideal, tetapi untuk mewujudkannya langkah kordinasi sebab masalahnya cukup rumit, butuh anggaran dukungan politik dan butuh kebijakan strategis, dan juga butuh regulasi (Undang-undang) apalagi sarana-prasarana pendukung cukup banyak seperti tol laut, pembelian alat-alat untuk nelayan dan perumahan," jelas Made.

Ia mengakui, Poros Maritim adalah proyek besar dan banyak sekali tantangannya, makanya sinergitas semua kementerian yang terkait harus bekerja dengan baik dibawah Menko Perekonomian Indroyono, harus mampu

mengkordinir semua kementerian yang terlibat di dalamnya. Tidak bisa hanya dibangun oleh Kementerian KP saja, tetapi semua pihak sebab butuh subsidi yang melibatkan Menteri ESDM, dukungan dana dengan Kemenkeu dan dari sisi perencanaan oleh Bappenas dengan rapi termasuk pengamanan.

Aparat keamanan sangat diperlukan untuk mengamankan sektor laut, jangan sampai terbang pilih pengamanan dari kepolisian dan Angkatan Laut, Kehutanan dan Kementerian KP perlu sinergi yang bagus dan koordinasi yang rapi, juga harus berani. Kalau ada kapal-kapal asing yang masuk, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Kalau bisa dibangun poros maritim-tol laut, terutama di Provinsi Kepulauan ini akan merasakan dari kebijakan ini.





Anggota DPR I Made Urip

“Kalau tol laut terwujud maka hubungan antar pula akan lebih mudah dan murah. Fasilitasnya disiapkan pemerintah seperti kapal-kapal- pengadaannya oleh peme-

rintah, paling tidak setiap jam ada pelayaran maka akan lebih cepat terjamin barang-barang masuk ke Indonesia Timur,” katanya.

Kalau transportasi laut sudah maju, maka akan makin efisien, barang-barang di semua wilayah di republik ini sama semua. Semen di Jawa Rp 52 ribu, maka di Papua juga harus sama karena masalah transportasi yang memadai, lancar dan efisien.

Lancarnya transportasi laut, juga bisa menunjang swasembada pangan termasuk daging, seperti mendatangkan sapi dari NTT. Selama ini lebih enak impor dari Australia karena biaya murah, jadi transportasi memegang peranan yang sangat penting. Dia yakin Jokowi sudah memikirkan itu dan menempatkan infrastruktur sebagai skala prioritas baik di darat maupun di laut, juga transportasi udara.

“Saya yakin kalau anggaran cukup, saya kira bisa diwujudkan itu, termasuk SDM. Memang anggaran untuk

infrastruktur harus memadai, *multy years*, kita belum mampu. Makanya mengundang investor,” ia menjelaskan.

Made menambahkan, bila Poros Maritim terwujud maka akan menghilangkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan. Kalau dari sisi legislasi, DPR periode lalu telah melahirkan UU Kelautan. Payung hukum sudah ada, tinggal implementasi dari semua pemangku kepentingan.

“Saya juga optimis Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo akan mampu mewujudkan ini apalagi dia orang kelautan yang pernah menjabat di Litbang KKP dan FAO di Roma. Menguasai betul masalahnya dengan ide-ide cemerlangnya diharapkan bisa mewujudkan poros maritim dan transportasi laut akan berkembang semakin baik. (mp.iky)

Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.



KEMBALI KE LAUT, PILIHAN LOGIS

Tinta emas sejarah telah mencatat, bangsa ini pernah meraih kejayaan luar biasa di laut. Seorang ilmuwan dari Perancis mempublikasikan temuannya tentang kebesaran kerajaan Sriwijaya (638-1030M) yang pada saat itu berhasil membangun komunikasi politik dengan kerajaan di Afrika, Eropa dan Timur Tengah. Sriwijaya menjaga kedaulatan di laut dengan sistem yang unggul, mengatur angkatan laut kerajaannya, penempatan di berbagai pangkalan strategis, pembagian tugas mengawasi kawasan lautnya, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut biaya cukai, hingga mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya.

Menyusul kemudian era Majapahit (1293-1500M). Puncak kerajaan maritim Nusantara terjadi dibawah pimpinan Raden wijaya, Hayam wuruk, dan Gajah mada, salah satu keberhasilan pada saat itu adalah Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan Nusantara.



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengulas catatan penting sejarah itu sebagai pembuka wawancara di Jakarta beberapa waktu lalu. Baginya sebuah pilihan logis ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo berketetapan hati untuk berpaling kembali ke laut, mengembalikan kejayaan bahari bangsa Indonesia. "Kalau kita melihat komitmen presiden itu mengingatkan kita kembali pada sejarah kejayaan masa lalu Indonesia dari era Sriwijaya, Majapahit sampai sekarang. Fakta penting yang seharusnya jadi pijakan kita namun sering terlupakan adalah, Indonesia negara kepulauan 80 persen wilayahnya adalah laut. Jadi benar kawasan Indonesia ini adalah

kawasan maritim," ungkapnya bersemangat.

Politisi dari Fraksi PKS ini mengingatkan komitmen tentang kembali ke laut itu jangan hanya indah dalam wacana dan pidato karena tantangannya cukup berat. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai mencapai hingga 54.716 km dan luas wilayah mencapai 1,9 juta mil persegi dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus negara yang memiliki garis pantai terluas di dunia setelah Kanada. Fakta lain wilayah laut Indonesia menurutnya selama ini sudah menjadi bancakan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus *illegal fishing* dan penyeludup-



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

an berdasarkan data Indomaritim (2011) jumlahnya memang mengancam. Setidaknya, ada seribu kapal asing hilir mudik menangkap ikan secara ilegal di Indonesia setiap tahunnya. Potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp80 triliun per tahun. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yang hilang mencapai Rp30 triliun dan potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun. Bahkan sejumlah pihak menyebut kerugian mencapai ratusan triliun, ini sungguh angka yang luar biasa.

"Saya mengingatkan kita bukan

hanya sekedar mencari sumber kekayaan di laut tetapi juga mengamankan. *Illegal fishing* akan sangat mudah masuk tanpa pengawasan memadai. Alat pendeteksi sudah bekerja sepanjang hari tapi belum bisa melacak wilayah laut kita yang sungguh luas," paparnya. Indonesia lanjutnya memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Diperkirakan volume produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2010 sebesar 5.039.446 ton dengan nilai produksi sebesar 59 triliun rupiah (Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2011). Tidak hanya itu, 62% wilayah Indonesia berupa lautan

dan separuh diantaranya merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah laut Indonesia yang berada diantara 2 benua dan 2 samudra telah lama menjadi jalur utama perdagangan dunia.

Untuk menjangkau kekayaan di wilayah ZEE ini memang cukup sulit, perlu kapal besar dengan teknologi tinggi yang sebagian masih asing bagi para nelayan Indonesia. "Nelayan kita hanya punya kapal di bawah 30GT, kemampuan melautnya paling jauh 3 mil. Sementara zona eksklusif kita tidak tergarap dengan baik, perbatasan paling pinggir itu harus menggunakan

13 Instansi Menjaga Kedaulatan di Laut:



1. **TNI Angkatan Laut**, yang bertugas menjaga keamanan teritorial kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing;
2. **POLRI (Polisi Perairan)**, yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia;
3. **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2)**, yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);
4. **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP)** bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut;
5. **Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP)**, bertugas sebagai pengaman kekayaan laut dan perikanan.
6. **Kementerian ESDM**, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan.
7. **Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata**, bertu-

gas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan kelestarian dan mutu lingkungan.

8. **Kementerian Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan**, bertugas pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
9. **Kementerian Pertanian**, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
10. **Kementerian Lingkungan Hidup** bertugas dibidang lingkungan hidup.
11. **Kementerian Kehutanan**, bertugas pengamanan terhadap illegal logging.
12. **Kementerian Kesehatan**, bertugas melakukan pengawasan/ pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.
13. **Kementerian Dalam Negeri (Pemda)** berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Presiden Jokowi yang baru saja terpilih akan melengkapi pengamanan yang dilakukan 13 instansi ini dengan menggunakan teknologi canggih pesawat tanpa awak (*drone*). Langkah ini sekaligus diyakini dapat menghadang para pelaku illegal fishing dengan lebih sigap. 3 Unit pesawat tanpa awak itu pun ingin dibeli dengan harga total sekitar Rp 4,5 triliun. "Negara kita ada 17 ribu pulau. Pengawasannya seperti apa, kita punya laut besar, ikannya banyak sekali. Kalau mau lihat pesta pencurian ikan, lihat di Ambon. Makanya kita butuh itu (*drone*)," ujar mantan Gubernur DKI ini. Baginya membelanjakan uang Rp4,5 triliun untuk membelikan drone jelas lebih efektif dan efisien demi menyelamatkan harta negara ratusan triliun rupiah. Pesawat ini menurutnya akan ditempatkan setidaknya di tiga titik penting pengawasan. Ia juga berjanji akan bertindak lebih tegas kepada para pencoleng kekayaan alam Indonesia

kapal tangkap di atas 30GT. Untuk mengoperasikan kapal diatas 30 GT harus punya skill karena teknologinya lebih rumit. sementara menyediakn kapal perlu anggaran besar, juga pendidikan untuk peningkatn *skill*," tuturnya. Kawasan ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Sebuah titik penangkapan yang perlu waktu bulanan untuk menjaringnya. Disamping kekayaan di laut ada pula kekayaan jauh dibawah dasar laut yaitu potensi mineral dan kekayaan hasil fosil yang juga luar biasa. Sejauh ini sejumlah lokasi sudah dieksplorasi seperti Celah Natuna, Celah

Timor dan lain-lain.

Pengawasan Lemah

Salah satu masalah utama dalam penanganan laut kita adalah belum optimalnya pengawasan. Kalau bicara instansi yang mengawasi, aturan perundang-undangan telah mengamanatkan kepada tidak kurang dari 13 institusi untuk menjaga kedaulatan Indonesia di laut (lihat kotak). Mengandalkan pengamanan pada TNI dan Polri bisa jadi terlalu riskan untuk mengamankan wilayah maritim yang sangat terbuka. Tanpa pengamanan yang cukup apalagi dengan dukungan teknolo-

gi, aparat bisa dipastikan akan selalu datang ke tempat kejadian perkara ketika para pencuri selesai berpesta. Tetapi ketika instansi yang terlibat terlalu banyak apalagi tanpa koordinasi yang memadai tentu akan membuat bingung pengguna jasa di laut, baru selesai diperiksa oleh instansi A kemudian di periksa lagi oleh Instansi B dst. Belum lagi pada saat salah satu instansi melakukan pemeriksaan, instansi lain menjadi tertahan untuk melanjutkan. Akibatnya adalah kerugian dari pengguna jasa baik materiil maupun immateriil.

tersebut. "Tembak langsung aja, biar yang lain kapok. Memang harus seperti itu, kalau kita ndak tegas, ikan kita akan dicuri kapal-kapal asing itu. Kalau (drone) ini udah ada, titik pencurian mudah diketahui, kita perintahkan tembak sampai tenggelam. Kalau ndak tegas besok balik lagi (kapal asing) itu," tandasnya

Langkah terobosan dan terukur menurut Hermanto diperlukan untuk mengatasi lemahnya pengawasan wilayah laut Indonesia. Bukan hanya ikan, kekayaan mineral termasuk BBM ilegal banyak yang lolos diseludupkan lewat laut. Melihat sengkaret permasalahan di laut, banyak pihak menduga ada kerja sama antara pihak luar dengan aparat yang bertugas di dalam. "Inilah masalah kita sejak dulu Angkatan Laut ada tapi alatnya terbatas untuk mengawasi laut seluas itu. Ada Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi masih sulit optimal mengawasi. Jadi kita memang perlu kebijakan terobosan," tekan dia.

Regulasi

DPR RI bersama pemerintah sebenarnya telah membahas regulasi tentang kelautan ini sejak 11 tahun lalu. Perdebatan dan tarik menarik kepentingan akhirnya berhasil melabuhkan regulasi itu pada Rapat Paripurna September 2014. Tok tok tok, RUU tentang Kelautan berhasil disahkan. Itu berarti negara maritim ini baru mempunyai UU Kelautan setelah 69 tahun merdeka. Ia menilai regulasi ini strategis dan menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Salah satu inti penting yang disepakati UU itu adalah penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, selain punya laut teritorial, wilayah yuridiksi, dan kawasan dasar laut, juga punya kesempatan untuk memanfaatkan potensi maritim di

laut lepas. "UU ini memberi jaminan perlindungan kepada nelayan, ada keberpihakan jangan laut dikapling untuk kepentingan pengusaha tertentu. DPR selalu mengingatkan kepentingan pokok dalam kebijakan dan anggaran. Kepentingan pemerintah adalah bagaimana seluruh kawasan bisa terjaga secara integratif, holistik, potensi laut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam hal ini untuk nelayan," jelasnya.

Langkah selanjutnya adalah menunggu langkah cepat pemerintah untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia berharap konsep pengelolaan laut ke depan perlu menjangkau dan didukung oleh seluruh *stakeholder* yang ada. Kalau tidak ia khawatir seluruh regulasi dan aturan akan mandeg alias jalan di tempat. Hal penting yang juga digarisbawahinya adalah isu lingkungan di laut. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini mengimbau pemerintah untuk terus melakukan pendidikan dan membangun pemahaman tentang bagaimana mengeksploitasi alam tanpa merusaknya.

Menutup wawancara Hermanto berharap DPR dapat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyambut program penting menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan anggaran, pemerintah sudah sepatutnya bicara dengan DPR untuk menyampaikan proposal anggaran sehingga sejumlah kebijakan dapat segera dijalankan. "Kita ingin tahu seperti apa proposal anggaran yang diajukan pemerintah dari situ bisa dilihat kegiatan yang akan dilakukan segera. Kita di DPR pasti mendukung atas nama bangsa, untuk memperkuat NKRI. Jangan ada lagi sebutan kepulauan terasing, tidak boleh lagi. Untuk itu kita ingin secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah," demikian Hermanto. (iky)

Inspirasi Poros Maritim Dunia:

Dari Pidato Bung Karno Hingga Lagu Nenek Moyangku

Presiden Pertama RI Soekarno dalam salah satu pidatonya pada tahun 1953 menegaskan pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa pelaut. "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri."

Pidato tersebut tampaknya sangat relevan untuk diwujudkan pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019) sekarang ini. Pasalnya, hingga kini kita masih memiliki sejumlah masalah besar yang perlu segera diatasi sebelum kita mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Restorasi maritim Indonesia tak dapat ditunda lagi.

Salah satu hal yang mencengangkan, kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing terus saja marak terjadi. Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menunjukkan, potensi pendapatan sektor perikanan laut kita jika tanpa illegal fishing mencapai Rp. 365 triliun per tahun. Namun, akibat illegal fishing, menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), pendapatan tersebut hanya berkisar Rp. 65 triliun per tahun. Akibatnya, ratusan triliun rupiah devisa negara

hilang setiap tahun.

Di samping itu, kita juga belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1.500 dolar AS. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu belum kita manfaatkan dengan baik. Terbukti, kita belum punya pelabuhan-pelabuhan transit bagi kapal niaga internasional yang berlalu lalang di 3 ALKI tadi.

Kembali ke Negara Maritim

Menanggapi hal itu, dalam pidato perdana sesaat setelah pengucapan sumpah di depan Sidang Paripurna MPR 20 Oktober lalu, Presiden Jokowi menegaskan, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memungungi laut, memungungi samudra, memungungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.





Mengakhiri pidato ini, Presiden mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa *cakrawarti samudera*; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, Presiden mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. "Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi," demikian Presiden menegaskan.

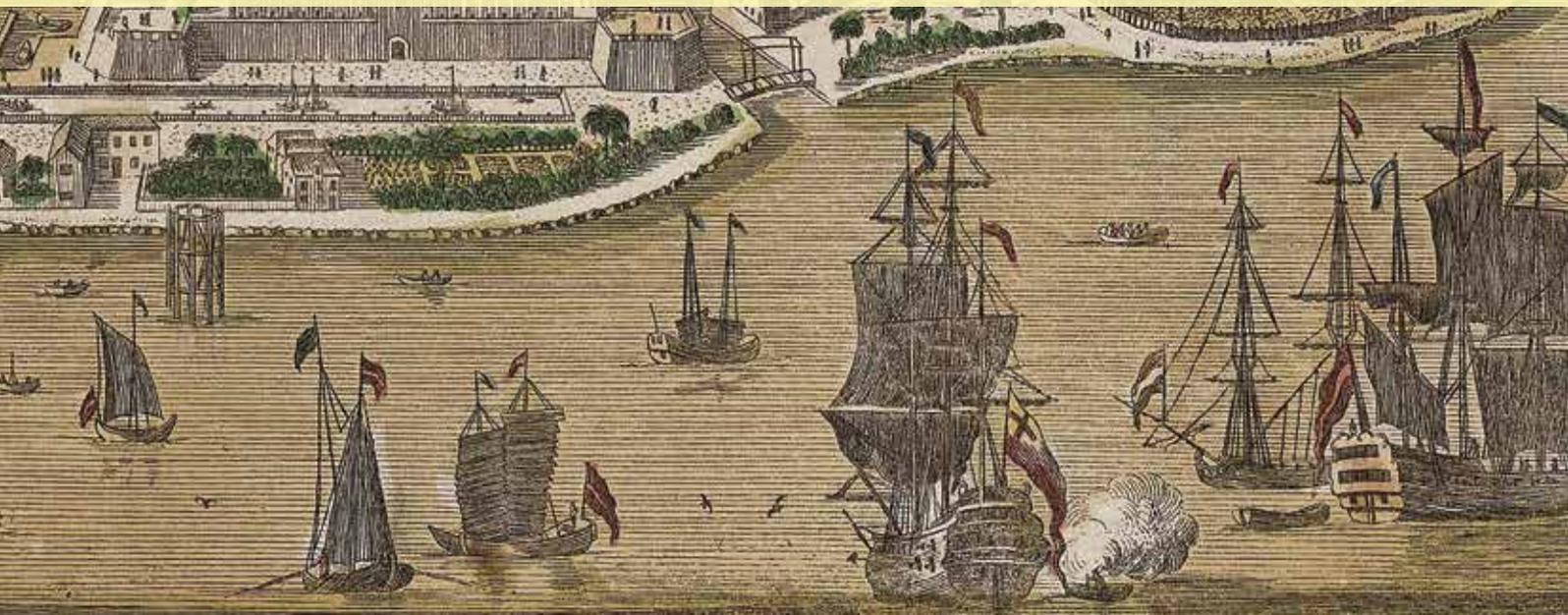
Apalagi bangsa ini memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan maritim di tingkat global. Argumentasi ini bukanlah sekadar asal belaka. Namun, itu merupakan harapan untuk membangun kembali kejayaan maritim, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-13.

Pasalnya, selain memiliki sejarah panjang di bidang

kemaritiman, fakta empiris Indonesia sebagai negara bahari tercermin dari keberadaan pulau-pulau besar, indah, dan kaya. Negeri ini merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas 17.504 pulau (baru 13.466 pulau yang telah diberi nama dan didaftarkan ke PBB), memiliki 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan 75 persen wilayahnya berupa laut (5,8 juta km²) termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Sebagai catatan, Filipina sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia hanya memiliki 7.100 pulau (Aroyo, 2012).

Para pendahulu kita sejak lama sudah akrab dengan dunia kemaritiman. Salah satunya dituangkan dalam lirik lagu karya Ibu Sud yang sangat melegenda " **Nenek Moyangku**".

*Nenek moyangku orang pelaut
gemar mengarung luas samudra
menerjang ombak tiada takut
menempuh badai sudah biasa
angin bertiup layar terkembang
ombak berdebur di tepi pantai
pemuda b'rani bangkit sekarang
ke laut kita beramai-ramai. (mp)*





Indonesia, “Dunia Air”

Masih ingat film box office yang diperankan Kevin Costner pertengahan tahun 1990-an? Ya film bertajuk “A water world”, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sebuah Dunia air. Jika boleh meminjam judul film tersebut, sejatinya Indonesia lah yang dimaksud dengan dunia air tersebut. Betapa tidak, luas perairan Indonesia 5,8 juta Km² atau lebih dari 75 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia. Sedangkan wilayah darat Indonesia hanya seluas 1,9 juta Km² atau sekitar 25 persen wilayah Indonesia, itu pun masih terdapat perairan umum seperti sungai, rawa, danau, dan waduk.

Atas dasar itulah Presiden Joko Widodo mencoba mengembalikan posisi Indonesia pada jati dirinya sebagai Negara bahari. Bersama dengan Tim Parlemenaria, Guru besar bidang Kemaritiman dan Kelautan di IPB, sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan di Era Kepemimpinan Presiden Megawati, **Rokhmin Dahuri** memaparkan tentang ikhwal keinginan Jokowi tersebut.

Diungkapkan Rokhmin, sejak zaman penjajahan hingga sekarang Indonesia belum memiliki visi pembangunan yang tepat dan benar serta dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Pasalnya, visi pembangunan Indonesia didominasi pada daratan. Paradigma pembangunan yang berorien-

tasi darat itu dikatakannya jelas bertentangan dengan kondisi fisik-geografis Indonesia. Padahal menurut Walter Isard dalam bukunya *Geography is Destiny* mengatakan bahwa kondisi dan konstalasi geografi suatu negara menentukan maju-mundurnya bangsa itu.

Dipaparkan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kemaritiman ini, bila daya saing ekonomi tetap rendah dan impor dibuka selebar-lebarnya, jika dibiarkan terus akan membuat Indonesia menjadi bangsa konsumen terbesar yang sangat bergantung pada bangsa-bangsa lain, alias tidak berdaulat. Indonesia tidak akan mampu menjadi bangsa produsen. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan jika sektor-sektor eko-



INDONESIA NEGARA BAHARI DAN KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA

- JUMLAH PULAU **17.504**, TERDAFTAR DI PBB **13.466** PULAU
- GARIS PANTAI TERPANJANG KEEMPAT DI DUNIA (**95.181** KM)



Sumber: data dan informasi geospasial, 2013

nomi strategis seperti pertambangan, perkebunan, perbankan, dan telekomunikasi saham mayoritasnya dimiliki oleh korporasi asing.

Kesenjangan antara warga negara yang kaya dan miskin kian melebar. Kesenjangan ini diyakini telah mengakibatkan tekanan hidup yang sangat berat, sehingga terjadi kecemburuan sosial, hingga akhirnya menimbulkan premanisme, perampokan, perkelahian antar kelompok masyarakat, konsumsi narkoba, dan beragam penyakit sosial yang semakin massif.

Selain itu terjadi disparitas pembangunan antar wilayah. Menurut data Bappenas, Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 % dari total luas wilayah daratan Indonesia, menyumbangkan 60 persen bagi perekonomian (PDB) nasional, diikuti oleh P. Sumatera sebesar 25 persen. Sedangkan, pulau-pulau lainnya (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) yang luas daratnya sekitar 80% dari luas lahan Indonesia hanya berkontribusi sebesar 15 persen.

Jika ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sangat tajam ini tidak segera dikoreksi, maka bukan hanya urbanisasi dengan segudang permasalahannya yang akan menyeruak, tetapi juga bisa mengakibatkan inefisiensi perekonomian nasional dan munculnya gerakan separatisme.

Dilanjutkan pria kelahiran Bogor, 16 Februari 1963 ini solusi dari segala permasalahan tersebut adalah agenda pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan yang dapat menyejahterakan semua pihak, baik itu pengusaha maupun seluruh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan. Dengan demikian paling tidak setiap warga Negara mampu memenuhi enam kebutuhan dasarnya yang meliputi sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Semua itu dijelaskan Rokhmin bisa dipenuhi lewat ekonomi kelautan yang berbasis pada pendayaguan

naan SDA (sumber daya alam) dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Baik kegiatan ekonomi itu berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, maupun bahan baku SDA diambil dari pesisir dan lautan, kemudian diolah di wilayah daratan lahan atas.

“Dengan demikian yang dimaksud dengan Poros maritim dunia adalah Indonesia sebagai negara maritim yang maju, makmur, kuat, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim

serta mampu menjadi teladan (memimpin) dalam berbagi kemajuan IPTEK, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian dunia,” jelas pria yang meraih gelar doctor dari *School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University*, Halifax, Nova Scotia, Kanada ini.

Menurut Rokhmin, untuk menerapkan ekonomi kelautan setidaknya Indonesia memiliki 11 sektor ekonomi kelautan, yakni:

Perikanan Tangkap

Sebagai negara kepulauan terbe-

sar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 13.466, Indonesia diberkahi Allah SWT dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beranekaragam. Potensi produksi ikan laut Indonesia melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8% dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/ tahun). Sayangnya sektor ini dicemari dengan substansi praktik *illegal fishing* (pencurian ikan) hingga akhirnya masyarakat pesisir tidak bisa menikmati potensi yang seharusnya bisa didapatkan.

Supaya pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan bisa sukses dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan.

Berikut ini program prioritas perikanan tangkap yang seyogyanya diimplementasikan di Indonesia.

Mengatur laju penangkapan ikan di setiap unit wilayah pengelolaan maksimal 80 persen MSY (*Maximum Sustainable Yield* = Potensi Produksi Lestari). Program ini diperlukan untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan laut, usaha perikanan tangkap, dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu laju penangkapan ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan tidak boleh melebihi nilai MSY nya. Sebaliknya bagi wilayah perairan laut yang masih dibawah, dimana laju penangkapan ikan lebih kecil dari 80 persen MSY, maka kita bisa menambah upaya tangkap (jumlah kapal ikan dan nelayan) hingga mencapai 80 persen MSY.

Modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) bagi nelayan tradisional yang selama ini hasil tangkapnya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai pelaku usaha. Misalnya dengan pengembangan unit kapal ikan modern (pukat ikan, *purse seiners*) serta revitalisasi armada perikanan dan alat tangkap lain.

Memerangi IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported*) *fishing practices* secara tuntas dan cepat. Dengan cara meningkatkan kapasitas pengawasan di laut, memperkuat efisiensi serta kewibawaan



Rokhmin Dahuri

pengadilan perikanan, sekaligus mendorong kapal-kapal ikan (nelayan) nasional yang modern untuk mampu beroperasi menangkap ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan (nelayan) asing. Seperti Laut Natuna, ZEEI Laut Cina Selatan, dan lain-lain.

Perbaikan dan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai kluster industri perikanan terpadu. Program ini sangat penting dalam menentukan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap karena pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat tambat-labuh kapal ikan, lokasi pemasok sarana kebutuhan melaut (BBM, es, bahan makanan, dan lainnya). Ikan termasuk komoditas yang sangat mudah busuk.

Rehabilitasi dan konservasi *biodiversity* (genetik, spesies, dan ekosistem). Pemerintah perlu bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk melaksanakan program pembersihan kawasan pesisir dan laut yang tercemar, merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, mengkonservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pesisir dan laut.

Perikanan Budidaya

Sektor ekonomi kelautan kedua di Indonesia adalah sektor perikanan budidaya. Sekitar 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut, seperti udang, ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Program prioritas perikanan budidaya yang bisa diimplementasikan di Indonesia menurut Rokhmin, diantaranya Pengembangan komoditas unggulan perikanan, seperti udang windu, rumput laut, kerapu, kakap putih, bawal bintang, kerang mutiara dan sebagainya. Selain itu juga memproduksi benih unggul bebas penyakit dengan harga relatif murah dan jumlah mencukupi.

Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Dalam sektor Industri pengolahan hasil perikanan ini mampu me-

POTENSI SDA DAN JASA-JASA LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

RENEWABLE RESOURCES	NON RENEWABLE RESOURCES	ENERGI KELAUTAN	JASA LINGKUNGAN
<ul style="list-style-type: none"> ● Perikanan (Penangkapan, Budidaya, Pengolahan hasil) ● Hutan Mangrove ● Industri bioteknologi kelautan ● Pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ● Minyak Bumi ● Gas ● Barang Tambang ● Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasang Surut ● Gelombang ● Angin ● OTEC 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pariwisata ● Perhubungan ● Kepelabuhan ● Penampungan Limbah 

nyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. Tambak Udang misalnya, 400 ribu hektar tambak udang mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang langsung mengelola tambak (*on farm*) dan sekitar 800 ribu orang yang bekerja di industri hulu, hilir, dan jasa terkait (*off farm*). Kecenderungan konsumen yang mulai mengarah pada makanan yang berkualitas dan sehat utamanya untuk produk-produk perikanan memberikan peluang yang cukup besar bagi usaha industri pengolahan hasil perikanan.

Berikut ini program prioritas industri pengolahan hasil perairan yang seyogyanya diimplementasikan di Indonesia, diantaranya peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional. Sampai saat ini pengolahan produk-produk perikanan masih didominasi oleh pengolahan yang tradisional dan cenderung kurang memberikan nilai tambah seperti pengeringan, pengasapan, dan fermentasi seperti ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dan sebagainya. Perlu dikembangkan lebih lanjut melalui standarisasi, jaminan keamanan pangan, pengemasan, serta promosi kreatif.

Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern misalnya ikan hidup, ikan segar, pembekuan, pengalengan. Pengembangan jenis olahan yang dapat lebih memberikan nilai tambah dengan diversifikasi olahan dari produk primer (siap masak) ke produk sekunder dan produk siap makan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas, sanitasi, dan higienis serta pengemasan yang lebih baik. Penyempurnaan kemasan dan distribusi produk. Antara lain dengan pembangunan pabrik pengolahan, pabrik es, *cold storage*, dan pabrik bahan pengemas seperti kaleng, karton, dan *steryofoam* dalam satu kawasan.

Industri Bioteknologi Kelautan

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut baik dari genetik, spesies maupun ekosistem tertinggi di dunia. Oleh karena itu Indonesia dikenal di dunia sebagai *megamarine biodiversity*, yang merupakan modal utama bagi industri bioteknologi kelautan (*marine biotechnology industry*). Fokus industri bioteknologi kelautan adalah untuk menghasilkan produk *semi-refined* dan *refined* (produk akhir).

Ruang lingkup industri bioteknolo-

gi kelautan meliputi: ekstraksi senyawa bioaktif (*bioactive compounds*) atau kandungan bahan alam (*natural products*) dari biota laut, yakni sebagai bahan baku (*raw materials*) untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, dan sebagainya. Selain itu bioteknologi kelautan juga termasuk rekayasa genetik (*genetic engineering*) untuk menghasilkan induk dan benih ikan, hewan, dan tanaman yang berkualitas unggul. Dan ketiga bioremediasi lingkungan. Pengembangan industri bioteknologi tersebut diharapkan dapat menjadikan kekayaan sumberdaya laut menjadi produk yang bernilai tinggi.

Kehutanan Pesisir

Di pesisir biasanya terdapat lebih dari satu ekosistem pesisir yang terkenal memiliki produktivitas hayati tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan estuaria. Oleh sebab itu, menurut Berwick sekitar 85 persen dari total biota laut tropis, sebagian atau seluruh siklus hidupnya, bergantung pada wilayah pesisir. Bahkan pada tahun 1990-an kawasan hutan lindung di kawasan hutan lindung di daerah hulu atau sepanjang DAS (daerah aliran sungai) sempat ditetapkan dalam TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan).

Pariwisata Bahari

Meskipun belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Wilayah laut Indonesia yang indah kerap dijadikan tujuan wisata oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jika kita membandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia dengan panjang garis pantai hanya sekitar 9.800 km tapi mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar 2 miliar dolar AS per tahun. Maka sebenarnya potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia dapat jauh lebih besar dari Australia.

Dalam melakukan pembangunan pariwisata bahari beberapa program prioritas yang harus dilakukan diantaranya pengembangan produk pariwisata seperti *snorkling*, *diving*, *beach tourism*, *cruise* dan lain-lain,





penyempurnaan prasarana dan sarana di sekitar obyek pariwisata bahari, pengembangan SDM yang tangguh di bidang pariwisata bahari, baik *skill*, kemampuan dalam inovasi.

Selain itu dijelaskan Rokmin lewat strategi pemasaran yang baik, seperti yang dilakukan Thailand yang memasarkan objek wisatanya di saluran televisi internasional dan berbagai media seperti internet, majalah, dan pameran-pameran pariwisata di tingkat internasional. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dihabiskan pelaku pariwisata Thailand untuk mempromosikan objek wisata mereka di beberapa jaringan televisi internasional mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

ESDM

Sektor ekonomi kelautan yang tak kalah besarnya adalah Energi dan sumber daya mineral (ESDM), karena hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi kita berasal dari kawasan pesisir dan laut. Berdasarkan data geologi diketahui Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan tersebut sebanyak 40 cekungan berada di lepas pantai, 14 cekungan di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 cekungan saja yang berada di daratan.

Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti. Selain itu diperkirakan cadangan gas bumi adalah 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri dari cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.

Perhubungan Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain itu, sektor transportasi laut juga dapat menyediakan lapangan kerja dalam jumlah lumayan besar,



jaringan transmisi data dan telekomunikasi melalui satelit. Kini jaringan kabel serat kaca optik bawah laut lebih dimanfaatkan untuk transmisi data internet. Para pengguna jasa jaringan kabel bawah laut yang canggih ini percaya bahwa akses *internet broadband* melalui jaringan ini akan lebih berdaya guna daripada melalui *dial-up*. Hal ini disebabkan pengguna jasa akan memperoleh kapasitas transmisi data yang jauh lebih besar.

Alasan kedua adalah bahwa frekuensi *broadband* dengan melalui kabel optik ini dianggap lebih sesuai untuk melayani keperluan industri dan korporasi ataupun para pengusaha. Dengan adanya kebutuhan manusia akan pembangunan jaringan kabel bawah samudra ini, industri kelautan akan ikut pula berkembang.

dan penghasil pendapatan daerah serta devisa. Potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar dolar AS per tahun.

Beberapa program prioritas yang harus dilakukan untuk mengembangkan transportasi laut adalah penambahan jumlah dan kapasitas kapal penumpang, kapal barang, dan kapal angkutan khusus (*oil tanker*, hewan ternak), perbaikan manajemen pelabuhan, baik pelabuhan penyebrangan maupun pelabuhan barang.

Untuk pelabuhan barang, perlu dilakukan penerapan konsep pelabuhan *hub* (pengumpul) dan *spoke* (pengumpan). Pelabuhan pengumpul yang berfungsi sebagai pelabuhan internasional haruslah dibatasi misalnya hanya pelabuhan Tanjung Periok, Belawan, Makassar, Bitung, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas saja dan sisanya cukup menjadi pelabuhan domestik sebagai pengumpan. Dengan demikian kapal-kapal asing hanya akan beroperasi pada pelabuhan pengumpul saja, sehingga kapal lokal dapat dengan leluasa beroperasi di pelabuhan domestik.

Industri Dan Jasa Maritim

Jaringan kabel optik bawah laut dipercaya mempunyai banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh



Sda Dan Jasa-Jasa Lingkungan Kelautan Non-Konvensional

Wilayah pesisir yang merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut, hanya menempati sekitar enam persen dari total luas permukaan bumi. Kendati demikian, sekitar 45 persen dari keseluruhan SDA dan jasa-jasa lingkungan yang dihasilkan planet bumi berasal dari wilayah pesisir. Kebanyakan lahan pesisir merupakan lahan pertanian yang subur dan produktif serta menjadi lumbung pangan dunia. Seperti pesisir Pantura yang selama ini merupakan lumbung beras Indonesia.

Perairan laut pesisir umumnya juga subur dan produktif, karena mendapatkan masukan nutrisi dan bahan organik dari daratan melalui aliran air sungai serta dari laut lepas. Selain itu, karena relatif dangkal, maka sinar matahari bisa menem-

bus hampir seluruh kolom air. Sehingga, proses fotosintesis bisa berlangsung hampir di seluruh kolom perairan pesisir. Konsekuensinya, produktivitas.

Sumberdaya Wilayah Pulau Kecil

Sekitar 60 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, kurang lebih 50 km dari garis pantai ke arah darat (hulu). Dan, hampir 70 persen dari seluruh kota di tanah air ini terletak di wilayah pesisir. Wilayah pesisir juga merupakan tempat yang nyaman untuk pemukiman, lokasi yang indah untuk rekreasi, mudah untuk transportasi air dan pelabuhan, mudah untuk mendapatkan air pendingin bagi pabrik-pabrik dan pembangkit listrik, dan celakanya relatif mudah dan murah untuk pembuangan beragam jenis limbah.

Oleh karena itu Rokmin menilai bahwa potensi nilai total ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun atau sedikit lebih besar dari Pendapatan dan Belanja nasional, dan sekitar tujuh kali lipat APBN 2013. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang.

Peran Laut Sebagai Aspek Pertahanan Dan Keamanan

Selain kesebelas sektor ekonomi laut, laut juga memiliki peranan penting dalam pertahanan dan keamanan, terutama dalam hubungannya dengan usaha menjaga kedaulatan negara. Hal itu mengingat wilayah perairan laut Indonesia dengan tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) nya, sehingga terdapat lokasi yang secara geopolitis dan geoeconomis strategis.

Di wilayah lautan Indonesia terdapat 182 garis pangkal yang dijadikan dasar dalam penetapan perbatasan wilayah laut dengan sepuluh negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dari kesepuluh negara ini, baru dengan Australia kesepakatan perbatasan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Sedangkan, dengan sembilan negara lainnya masih dalam proses perundingan yang belum tuntas.

Dari aspek ini maka pembangunan pertahanan dan keamanan di laut menjadi sangat penting untuk memelihara dan menjaga kedaulatan negara dan bangsa. Di sisi lain pembangunan ekonomi sumberdaya kelautan dapat mendorong terciptanya kondisi pertahanan dan keamanan yang baik dan dinamis secara domestik, regional dan internasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemanfaatan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil serta pembangunan berbagai infrastruktur berbasis kelautan merupakan beberapa bagian penting dari pembangunan kelautan yang dapat menunjang terciptanya kondisi pertahanan dan keamanan negara secara baik dan dinamis.

(Ayu) Foto: iwan Armanias/Parle/Iw.





SDM NELAYAN PERLU DIGENJOT

Senang bercampur miris. Itulah kata yang bisa dipilih untuk menggambarkan sikap organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ketika pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan baru, berhenti “memungungi” samudera dan menjadikan laut sebagai “halaman depan”. Bagaimana tidak sebagai wadah berkumpul 6,7 juta anak bangsa yang memilih profesi petani dan nelayan jelas langkah ini seharusnya akan berpihak kepada mereka. Namun fakta di lapangan menunjuk-

kan bekerja di laut memang tidak mudah. Perlu persiapan matang, salah antisipasi resikonya tinggi.

“Perlu kekuatan besar untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi nelayan kita, semua kelemahan mendasar. Kualitas SDM, teknologi, 60 persen masih terbelit kemiskinan, permodalan, pemasaran, kalau melihat semua titik lemah itu, nyaris *impossible*. Tantangannya berat diperlukan kerja sama, dukungan anggaran, kerja keras. Hanya berani saja, komitmen saja, tanpa didukung misalnya anggaran ya dongeng,” kata Ketua Umum KTNA

Nasional Winarno Tohir dalam wawancara di Jakarta beberapa waktu lalu.

Masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menurutnya saat ini menjadi persoalan yang harus jadi prioritas utama. Data lapangan KTNA saat ini hanya 30 persen nelayan yang siap bekerja dengan sentuhan teknologi, sisanya adalah pemain alam. Sangat sedikit yang sudah melaut dengan kapal dengan kapasitas 30 GT (gross ton) dan dukungan peralatan dilaut selama 3 hari sampai 1 minggu. Sebagian nelayan masih melaut dengan kapal



memberikan pelatihan dan bimbingan kepada rekan mereka yang perlu didukung. Kita belajar sesuai kebutuhannya, kurikulumnya disesuaikan dengan permintaan, kita bisa bertanya kepada nelayan yang ingin berlatih, kamu ada waktunya berapa hari? Misalnya tiga hari, nah kita bisa menyesuaikan pelatihan sesuai waktu mereka,” jelas Winarno yang bicara didampingi sejumlah pengurus KTNA.

Ia memaparkan tidak seperti di lahan budi daya, bekerja di laut menghadapi tantangan yang sulit diperkirakan, analisa teknis sulit digambarkan kalau hanya mengandalkan panca indera. Dalam perhitungannya ada sekitar 20 persen nelayan tambahan yang siap di-*upgrade* kemampuannya, terutama meningkatkan pemahaman terhadap teknologi. Ia meragukan keberhasilan pendidikan apabila dilakukan oleh pakar yang sengaja didatangkan dari akademisi atau lembaga pendidikan tertentu. “Penggambarannya kalau mau belajar berenang kita tidak bisa baca buku atau diceramahi bagaimana berenang tetapi terjun kelaut bersama pelatih renang, 2 minggu dijamin bisa. Jadi petani dan nelayan kita ini urusannya praktis bukan ber-

teori,” tekannya.

Sekretaris Jenderal KTNA Syofyan yang mendampingi turut menyampaikan catatan tambahan tentang kondisi SDM nelayan di tanah air. Ia mengaku baru saja berbicara lewat telepon dengan pimpinan organisasi di sejumlah daerah seperti Aceh, Kalimantan dan Papua. “Masalah kita di daerah itu sama, SDM. Kebijakan kemaritiman ini tidak bisa seperti main sulap, perlu pembenahan dulu,” ungkapnya. Ia menyebut pemerintah sangat intensif menyiapkan penyuluh bagi petani, seharusnya ini juga dilakukan kepada para nelayan. Kehadiran penyuluh di setiap perkampungan nelayan bisa menjadi seperti perwakilan pemerintah yang siap menemani, menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Kemudian secara bertahap meningkatkan kualitas dan kelas kapal yang akan digunakan ke laut, misalnya dari sebelumnya 3 hari kemudian menjadi 1 minggu.

Perlu Bapak Angkat

Masalah mendasar lain yang dihadapi nelayan menurut Winarno bisa diselesaikan dengan menerapkan sistem ‘bapak angkat’. Dalam

motor tempel, melaut satu malam atau bahkan masih dengan dayung, layar sederhana, jaring kecil atau bahkan hanya mengandalkan mata kail. Apa jadinya ketika mereka harus berhadapan di tengah laut dengan kapal asing yang mencuri ikan dengan kapal berukuran 100GT bahkan 1000GT. Apalagi kalau mengajak mereka berlari cepat menyongsong target poros maritim dunia.

“Kalau mau cepat kita bisa latih mereka di pelatihan yang kita miliki P4S. Disini kita mengelola pelatihan bersama para petani atau nelayan handal. Mereka dengan sukarela



Pelatihan Perbengkelan bagi Nelayan Pesisir, Kerjasama SMK N 4 Kendal dengan Paguyuban Nelayan Rowosari - Kendal yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kendal.

penelusurannya saat ini ada sekitar belasan pengusaha perikanan - sekelas PT ASI Pudjiastuti Marine Product perusahaan yang dimiliki Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti - yang seharusnya bisa bekerja sama saling menguntungkan dengan para nelayan. Dua hal persoalan utama yang bisa diselesaikan adalah pengadaan kapal berkapasitas besar dan permodalan. Ia kemudian memaparkan perbedaan nelayan Indonesia dengan nelayan asing adalah mencari dan menangkap. Nelayan asing berangkat ke laut setelah mendeteksi keberadaan ikan dengan menggunakan pantauan satelit berteknologi canggih. Setelah menentukan titik koordinat gerombolan ikan mereka berlayar dalam kelompok besar dan mengepung posisi ikan dalam beberapa lokasi. "Dengan sonar dan teknologi yang dimiliki, kapal asing ini bekerja berkelompok, mengepung posisi ikan, menyiapkan jaring yang sesuai dan menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Nah itulah sebabnya pada saat mengepung gerombolan ikan mereka terkadang melintas wilayah Indonesia, karena ikannya lari ke sini. Sementara nelayan kita baru sebatas mengandalkan bintang, angin dan intuisi, baru terjun ke laut mencari ikan," ungkap dia.

Pemerintah menurutnya dapat

membuat regulasi dan kemudahan agar pengusaha perikanan besar mau bekerja sama dengan nelayan. Misalnya menyiapkan armada kapal dengan kredit terjangkau, pembangunan gudang pendingin (*cold storage*), jaminan permodalan, pelabuhan dan pembelian ikan nelayan kelompoknya dengan harga yang wajar. Dengan dukungan pemerintah dan para bapak angkat, nelayan diharapkan lepas dari jerat tengkulak yang selama ini mengikat mereka dengan dukungan permodalan dengan bunga yang sangat mencekik. Kalau jeli ungkapannya tidak sulit menemukan nelayan yang terjatuh tengkulak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

"Para tengkulak di TPI sering bermain mengatur harga, ini jangan dibiarkan. Petani yang lemah tidak berdaya menghadapi permainan harga seperti ini, kalau menunda penjualan menunggu harga yang lebih baik mereka tidak punya tempat penyimpanan, kalau akhirnya dijual murah ke tengkulak ya makan hati. Kondisi ini bermula ketika nelayan mau melaut dalam jangka waktu lama 1 minggu atau lebih, mereka harus punya modal untuk membeli bekal kelaut, bisa 50-100juta, kalau mereka tidak punya uang mereka mau kemana? ke bank, koperasi? Tidak ada. Akhirnya pinjam ke tengkulak. Ketika pulang

melaut mau jual ke siapa ya ke tengkulak lagi karena mereka menguasai TPI. Ini seperti lingkaran setan yang sudah berlangsung lama dan pemerintah kemana?" tandasnya.

Ia juga berharap Pemerintah Presiden Jokowi dapat mengembalikan eksistensi KUD Mina sebagai koperasi yang mampu memberikan dukungan permodalan kepada nelayan. Peran koperasi berubah setelah tidak lagi menjadi departemen/kementerian yang mempunyai kewenangan teknis sampai ke bawah. Kebijakan pemerintah mengalihkan koperasi di bawah kementerian negara perannya berubah menjadi 'memble'. "Koperasi tidak punya kaki lagi di bawah, mereka tidak punya modal untuk disalurkan kepada petani," tutur dia.

Winarno bersama pengurus KTNA berharap pemerintah terutama Menko Kemaritiman dapat memberi ruang, mendengar masukan dan keluhan dari para nelayan yang sangat paham lapangan. Sampai saat ini ia mengaku belum mendapat panggilan atau undangan untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintah. "Mungkin masih sibuk konsolidasi. Kita tentu siap apabila pemerintah ingin mendengarkan masukan kami. Untuk kebaikan bangsa, kejayaan kembali di laut, kami harus siap," pungkas dia. (iky)

Suasana pelelangan ikan



Menata Kembali Indonesia Sebagai Bangsa Maritim

Oleh; DR. Y. Paongan, S.Si., M.Si. | Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute

Semangat dan jiwa maritim bangsa Indonesia saat ini telah luntur. Pasang surut perjalanan rakyat Indonesia dalam sejarah seharusnya menjadi bukti yang dipelajari kembali. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, nusantara menjelma menjadi negara maritim yang kuat. Bahkan, Sriwijaya (683-1030 M) telah mendasarkan kebijakan pemerintahannya pada penguasaan alur pelayaran, jalur perdagangan, serta wilayah-wilayah strategis sebagai pangkalan kekuatan laut. Selanjutnya, nakhoda nusantara di bawah Kertanegara kembali mengukir kejayaan maritim yang besar dan kuat dengan konsep *Cakrawala Mandala Dwipantara*. Konsep besar pun terwujud pada 1375 saat Kerajaan Majapahit lahir di bawah Raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada.

Sejak masa kejayaan itu seperti halnya Indonesia di-setting dengan format kebudayaan agraris, yang cenderung terpaku pada alam, kekuatan adikodrati, feodalistik, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di Bumi Khatulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri.

Banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia kedepannya terkait kejahatan maritim lintas negara seperti, penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam. Mencermati dinamika tersebut, perlu perumusan kebijakan-kebijakan strategi pe-



ngamanan wilayah nasional, yang bertujuan merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul. Sasaran yang ingin dicapai dari perumusan kebijakan ini adalah tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan *maritime policy* secara keseluruhan.



Sang Hyang Baruna, Pataka Kerajaan Majapahit

Sebagai gambaran ada enam elemen penting dalam membangun kekuatan maritim, yaitu *Geographical Position, Physical Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character of the People, dan Character of Government*. Elemen-elemen sebagai unsur budaya merupakan modal utama dalam membangun negara maritim. Kemudian bagaimana dengan *Character of Government* negara yang erat kaitannya dengan *style of government*.

Banyak bangsa besar berkat kekuatan maritimnya. Inggris yang terkenal dengan *Britain Rules the Waves* kini telah mengembangkan postur angkatan lautnya tidak lagi *to control the seven seas*. Jepang membangun kekuatan maritimnya disiapkan untuk mengamankan garis suplai BBM (bahan bakar minyak) dari Timur Tengah ke Jepang, di samping untuk memperkuat pertahanannya. China membangun strategi *Chain of Pearl*, yang bertujuan mengamankan jalur suplai BBM dari Timur Tengah ke China. Berdasarkan peta sejarah, China akan memperkuat dan mengembalikan kejayaan maritimnya di masa lampau. India juga telah menerbitkan dokumen *Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy*, berisikan tentang aspirasi geopolitik India hingga strategi *deployment* di masa damai maupun konflik, serta strategi pembangunan kekuatan angkatan laut India.

Perbandingan di atas tampak jelas saat negara-negara yang disebut bangsa maritim terlihat bagaimana pola kehidupan masyarakat dan bagaimana penataan lingkungan yang bersumber ke arah laut. Kota-kota besar di dunia, seperti Sydney, New York, London, Amsterdam, Singapura dan sebagainya tampak in-

dah dengan hembusan angin yang membawa *yacht*, perahu-perahu layar membawa nuansa kehidupan bahari. Jika melihat kota-kota besar di Indonesia, mulai dari laut Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya bukan keindahan yang terlihat, tapi sampian nelayan miskin yang rusak, ongkongan sampah dimana-mana, dan kawasan kumuh. Kondisi demikian mencerminkan laut bukan bagian terdepan dari kehidupan bangsa, dan tidak mencerminkan bangsa maritim yang besar. Bangsa ini tidak hanya tersesat tapi benar-benar terdampar di negara kepulauan.

Dalam berbagai kesempatan, pakar hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal telah mengingatkan, sudah saatnya Indonesia memiliki konsep *maritime policy*. Konsep maritim yang dimaksud adalah negara mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, banyak negara kepulauan, tapi bukan negara maritim. Ada negara yang lautnya sedikit, tapi memiliki predikat negara maritim. Sebagai contoh China dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai samudera, seperti Belanda. Mereka menjajah Indonesia sekian lama karena mampu menguasai laut.

Sinkronisasi Kebijakan

Dalam forum Konferensi Rio+20 di Brazil akhir Juni 2012, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tidak hanya mengajak dunia untuk bersama-sama melaksanakan ekonomi hijau dalam pembangunan nasionalnya, tetapi juga mengkampanyekan ekonomi biru. Di mana laut menjadi bagian integral untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*). Karena itu, berbagai model perlu dijadikan bagian dari *grand design* pembangunan kelautan nasional.

Sebagai contoh, konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*). Konsep ini merupakan program yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konsep Ekonomi Biru mencontoh



cara kerja alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi, tapi memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*). Limbah diubah menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa meninggalkan limbah.

Kebijakan maritim dengan model Ekonomi Biru melalui bidang ekonomi kelautan, memiliki delapan sektor pengembangan, yaitu sektor perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan, jasa kelautan, serta lintas sektor bidang kelautan. Melalui sektor tersebut terdapat delapan strategi pengembangan ekonomi. Sebagai tindak lanjutnya maka dalam masing-masing strategi pengembangan ekonomi terdapat upaya-sebagai ruang bagi masing-masing sektor secara kreatif di sektornya yang menggunakan model ekonomi biru.

Garis kebijakan makro kelaut-

an nasional telah jelas dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dituangkan pada misi ketujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini ditujukan untuk menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional setidaknya harus ditandai penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas-batasnya, menghitung aset-aset kelautan yang dimiliki negara, serta hal-hal terkait kerangka pertahanan keamanan aset ekonomi nasional. Hal tersebut



meliputi perencanaan pembangunan terpadu berbasis spasial dalam rangka mendayagunakan laut serta sumberdaya kelautan terpadu dengan daratan yang lestari, efisien dan efektif serta menghasil kemakmuran bagi seluruh rakyat; Perencanaan jaringan transportasi terpadu yang berdampak pada rendahnya biaya angkut orang dan barang sehingga menjamin distribusi barang dan harga produk yang ditawarkan menjadi relatif rendah dan menguntungkan; Perencanaan wilayah terpadu sehingga melindungi sumberdaya *renewable* di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya *non renewable*; Kemudian, perencanaan spasial terpadu berbagai sektor dan berbagai jenis sumber daya alam, serta manusia untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Dari berbagai penelitian, nilai ekonomis kekayaan sumber daya alam laut Indonesia melebihi potensi kekayaan di daratan. Namun, dengan kekayaan laut yang berlimpah pembangunan ekonomi nasional belum mampu memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu (*up-*

stream) maupun hilir (*downstream*).

Pertama, belum adanya terobosan kebijakan yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan, pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan kepelabuhanan, serta sumber daya manusia di sektor maritim. Dampaknya, persepsi tentang ekonomi maritim secara kelembagaan masih sangat parsial, sehingga tolok ukur ekonomi maritim dilihat hanya dari satu organisasi kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal dari segi tupoksi dan kewenangan, kapabilitas departemen ini sangat terbatas untuk mengakomodir urusan lintas sektoral dan instansi kelembagaan pemerintah lainnya dalam mengembangkan ekonomi maritim.

Kedua, kebijakan maritim (*maritime policy*) tidak menjadi payung politik bagi pembangunan ekonomi sehingga kelembagaan yang terlibat dalam sektor maritim mengalami disorientasi. Padahal, kepentingan kolektif maritim perlu diorganisir secara terpadu. Untuk itu, negara perlu berani menegaskan kebijakan maritim sebagai platform pembangunan ekonomi.

Ketiga, terjadinya *backwash* efek secara massive yang menempatkan sektor maritim khususnya perikanan sebagai sektor pengurusan sebagai akibat dari tingkat kebocoran sektoral (*sectoral leakages*) yang terjadi sehingga menyebabkan sektor perikanan menjadi kerdil dan marginal. Kebocoran sektoral ini dimaknai dalam dua hal, yaitu (1) Hubungan antara pemilik kapal dengan nelayan, yang cenderung menempatkan pemilik kapal sebagai pihak yang menikmati benefit lebih banyak dari pada nelayan yang hanya memenuhi standar hidup minimum kebutuhannya; (2) *Feedback* nilai ekonomi perikanan terhadap perbaikan infrastruktur publik di komunitas nelayan sulit terjadi.

Keempat, faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan menjadi saluran membagi kemakmuran secara adil nampaknya masih sulit diwujudkan

karena wajah APBN yang *continental oriented*, dan selalu menempatkan sektor maritim termasuk provinsi berbasis maritim dan pulau-pulau kecilnya, termarginalisasi dalam pembagian sarana dan prasarana pembangunan.

Kepemimpinan dengan visi yang kuat terhadap pembangunan berbasis maritim diyakini dapat menjadi jalan keluar untuk mempercepat kemajuan ekonomi nasional. Kesadaran terhadap pergeseran paradigma pembangunan yang berorientasi kontinental (*land-based development*) pada orientasi laut (*ocean-based development*) semestinya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan kebijakan yang bersifat komprehensif, konkret, sistematis, tidak parsial apalagi sporadis. Ekonomi kelautan atau berbasis kemaritiman tidak lagi dijadikan sektor pinggir, melainkan sebagai arus utama dalam kebijakan pembangunan.

Menyusun *Grand Design* Pembangunan Maritim

Diakui atau tidak kebijakan pemerintah terhadap pembangunan maritim masih kurang serius. Pemimpin bangsa ini kurang memaknai perjuangan Ir Djuanda atau yang dikenal Deklarasi Djuanda 1957. Deklarasi ini mempersatukan kembali wilayah nusantara, tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut bebas, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski awalnya mendapat banyak protes dari negara lain, namun dengan kesabaran selama bertahun-tahun, Indonesia akhirnya berhasil memperluas wilayah dan kekayaan di dalamnya.

Setelah 57 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana arah bangsa ini? Pemerintahan baru memiliki tanggung jawab melanjutkan cita-cita masa depan bangsa. Selama ini, pemerintah hanya memikirkan pembangunan jangka pendek. Lima tahun pemerintahan selesai, setelah itu berantakan. Diperlukan sinkronisasi berbagai kebijakan pembangunan di bidang maritim, baik itu dalam bentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan sebagainya,

serta merevitalisasi fungsi-fungsi lembaga terkait dengan sektor maritim.

Menurut hemat kami, sebaiknya kita memulai dengan membuat *grand design* maritim Indonesia untuk program jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, serta menentukan skala prioritas pembangunan maritim. *Grand design* ini dituangkan dalam *maritime policy* agar sektor maritim bisa menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat, yang bermartabat dan berdaya saing. Hal ini meliputi banyak aspek, antara lain tata kelola laut, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), infrastruktur, industri-jasa maritim, transportasi laut, pertahanan-keamanan, perikanan, wisata bahari, kelestarian lingkungan, mitigasi, serta sumber energi.

Dalam mencermati pembangunan ekonomi kelautan Indonesia, sudah sepatutnya mengkaji kembali bagaimana posisi bidang kelautan yang terdiri tujuh sektor utama, yakni sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral kelautan, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, berperan di masa lalu dan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan negara kepulauan yang dapat memakmurkan rakyat nusantara (UU No 17 tahun 2007).

Masalah yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar adalah mampukah pemerintah Indonesia

mengelola potensi sumber daya kelautan yang begitu besar untuk kepentingan pertumbuhan perekonomian nasional? Pertanyaan ini penting, karena sejarah mencatat bahwa kontribusi bidang ekonomi kelautan untuk penerimaan negara belum signifikan. Indikator ini selalu menjadi alasan klasik sehingga sektor tersebut kurang diminati para pengambil keputusan pada masa lalu. Padahal, indikatornya tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau devisa, tetapi juga dari sisi ekologi (lingkungan), penyerapan lapangan kerja, gizi masyarakat, *social capital* di berbagai tempat terpencil dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi kelautan nasional hingga saat ini masih cenderung berpihak dan menguntungkan para pemburu rente (*rent seeker*). Hal ini dapat diindikasikan dengan masih terjadinya eksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan dengan cara-cara yang tidak tepat atau bahkan merusak guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika hal ini tidak dituntaskan justru dapat menjadi bencana dan sumber pertikaian bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya konsep pembangunan ekonomi kelautan yang tepat dalam pembangunan ekonomi nasional dalam satu kesatuan NKRI. Sehingga perlu "payung kebijakan" yang tepat pada level pemerintahan pusat dan daerah guna mengembangkan ekonomi kelautan secara optimal dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep *green products and services* (produk-produk dan jasa ramah lingkungan) tidak dengan sendirinya sesuai harapan. Hal ini disebabkan *green products and services* yang dihasilkan harus dibeli dengan harga yang lebih mahal dan makin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin karena diperlukan nilai investasi yang lebih besar. Investor harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghasilkan *green products and services*, dan tambahan biaya ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Kebijakan maritim Indonesia saat ini masih tumpang tindih dan lemah, khususnya dari sisi penegakan hukum laut, sehingga menyebabkan kerugian dan biaya tinggi bagi pengguna jasa kelautan di tanah air. Untuk itu, perlu ada upaya pula mengintegrasikan perangkat perundangan sektoral yang kelak menjadi jalan untuk mengikat siapapun yang akan memegang pemerintahan lima tahun ke depan. Diperlukan upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia untuk mewujudkan kondisi maritim yang aman dan damai. Apalagi Indonesia memiliki posisi strategis dan potensi laut yang luar biasa besar dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Sudah saatnya negeri ini mengubah visi pembangunan yang hanya berorientasi pada daratan menjadi pembangunan yang berorientasi maritim.





Harga Minyak Turun, KENAIKAN BBM SUBSIDI TIDAK TEPAT

Kenaikan harga BBM subsidi premium dan solar sebesar 2000 rupiah diprediksi akan semakin mensengsarakan rakyat dan berdampak luas, bahkan kenaikan itu akan mengerek harga-harga bahan pokok sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.

Dampak kenaikan BBM, sejatinya juga membawa dampak yang besar pada sektor transportasi dan logistik, atau industri yang bisnisnya sangat bergantung pada BBM sebagai roda utama. Selain itu, transportasi serta logistik sangat terkait dengan industri lainnya, sebut saja biaya angkut barang dari pengepul ke pasar.

Bahkan imbas tersebut, harga sembako naik, yang diiringi rentetan kartu domino yang seakan tidak berhenti begitu saja, yang celakanya

lagi harga sudah naik jarang bisa diturunkan kembali.

Saat ini, Pro dan kontra kenaikan harga BBM masih terus muncul. Demo marak terjadi di daerah, jadi Siapapun Presiden Indonesia, pasti sadar benar jika subsidi BBM adalah kebijakan yang salah. Di setiap pergantian Presiden, menaikkan harga atau menghapus subsidi BBM memang kerap diwacanakan, yang menjadi persoalan saat ini, yaitu kenaikan BBM ini tanpa sedikitpun konsultasi dengan DPR mengenai

kenaikan dan kompensasi bagi rakyat kecil yang terkena dampak kenaikan itu.

Saat diwawancarai oleh Parlemen-taria, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengaku belum mendapat penjelasan secara resmi terkait usulan kenaikan BBM bersubsidi. "Kita Komisi VII DPR Belum secara resmi menerima usulan kenaikan BBM bersubsidi dari pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, dirinya tahu mengenai rencana kenaikan itu dari media massa, karena itu Komisi VII

DPR akan segera mengundang mitra kerja pada minggu depan. "Kita akan segera undang mitra kerja pada rapat komisi," terangnya.

Terkait kenaikan BBM, Kardaya menegaskan, kenaikan BBM saat ini *timingnya* tidak tepat dan sangat tergesa-gesa serta tanpa perhitungan matang. "Kita tidak melihat berapa kenaikan BBM subsidi, tetapi kita akan sulit menjelaskan kepada rakyat karena memang harga minyak dunia turun cukup besar," jelasnya.

Dia menambahkan, penurunannya mencapai 20 persen lebih jika dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 105 dollar/barel. "ini sudah turun menjadi 80 dollar/barel, jadi pada saat minyak turun dibawah asumsi maka tidak pernah dalam sejarah pemerintah menaikkan BBM," terangnya.

Dia menjelaskan, Presiden SBY juga tidak menurunkan BBM ketika harga turun dibawah asumsi. "Seluruh dunia juga harga BBM turun jadi bagaimana pemerintah menjelaskannya kepada masyarakat," katanya.

Menurutnya, perhitungan subsidi BBM seharusnya berdasarkan kepada dua indikator yaitu harga minyak mentah dan nilai tukar. "Ini belum pantas naik, bahkan kompensasinya saja beda-beda pembiayaannya ada yang bilang dari CSR, kemudian menteri lain bilang dari APBN," katanya.

“Menurutnya, perhitungan subsidi BBM seharusnya berdasarkan kepada dua indikator yaitu harga minyak mentah dan nilai tukar. “Ini belum pantas naik, bahkan kompensasinya saja beda-beda pembiayaannya ada yang bilang dari CSR, kemudian menteri lain bilang dari APBN,”katanya.”



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

Dia menambahkan, Komisi VII DPR akan segera meminta penjelasan kepada pemerintah meskipun ini merupakan wewenangnya dari Pemerintah. "Kita akan meminta penjelasan karena kalau memang mau merubah subsidi energi itu seharusnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar," jelasnya.

Perbandingan SBY dan Jokowi

Pimpinan Komisi V DPR menilai kebijakan kenaikan BBM era Jokowi terkesan terburu-buru dan tanpa perhitungan matang. "Dahulu saat membahas kenaikan BBM itu, kita di Komisi V DPR betul-betul menghitung insentif yang ada, sampai berapa triliun, kemudian insentif itu diserahkan kepada perusahaan angkutan, dan bentuknya seperti apa," ujar Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis kepada Parleментарia.

Menurut Fahri, dirinya cukup kaget juga mengetahui kenaikan BBM dan tarif yang ditetapkan bagi angkutan umum 10 persen hanya dari media massa "Dahulu kenaikan BBM subsidi 1.000 rupiah, dan

2.000 rupiah semua ada hitungan rigidnya," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena mengatakan, bukan hal tabu menaikkan BBM subsidi. tetapi harus dilakukan secara transparan, dan indikator kenaikan itu harus jelas. "Pengalaman saat era SBY juga telah menaikkan BBM subsidi sebanyak 4 kali, namun dengan indikator yang jelas," ujar Michael.

Menurut Michael, indikator tersebut antara lain terkait harga minyak dunia, kurs dollar, kemudian volume BBM subsidi. "Kami tidak lihat secara transparan variabel itu menjadi indikator kenaikan harga BBM subsidi, ini belum sampai masuk hitung-hitungan," terangnya.

Disisi lain, lanjut Michael, pemerintah perlu memikirkan aspek konsilidasinya serta melihat dampak kenaikan itu terhadap *stakeholder* yang ada. "Kenaikan satu rupiah itu akan berdampak, seperti inflasi dan pengangguran akan meningkat, jadi jangan *ujug-ujug* menaikkan BBM subsidi ini," tegasnya. (Sugeng). Foto: Naefurodjie/Parle/Iw.



JSS BATAL, POROS TOL LAUT DIGALAKKAN

Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melibatkan dua Provinsi yakni, Lampung-Banten batal dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Pada pemerintahan SBY lalu, rencana pembangunan JSS ini sudah mendapat respon positif dari berbagai kalangan pelaku usaha khususnya serta rakyat, dan pemerintah SBY telah melakukan berbagai persiapan baik masalah anggaran pembangunan, kajian ilmiah, bahkan telah di bentuk suatu badan konsorsium.

Jika pembangunan JSS dilaksanakan, para pelaku usaha dan tentunya masyarakat akan mendapat manfaat yang luar biasa, karena tidak lagi terbelengkalai, akibat terjadi antrian panjang menuju pelabuhan laut, kerusakan kapal laut bahkan pengaruh cuaca seperti parameter kelautan, yakni, kecepatan arus, ketinggian gelombang.

Nyatanya, meskipun program JSS sudah matang, Presiden Jokowi tidak berencana melanjutkannya, tetapi berencana membangun Tol Laut dari Kawasan Barat hingga Kawasan Timur di wilayah Indonesia dan membangun dermaga sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat.

"Sangat disesalkan rencana Jembatan Selat Sunda telah dilakukan studi yang panjang, dan Pemerintahan



Anggota Pansus UU Pelayaran Abdul Hakim

Susilo Bambang Yudhoyono, telah melakukan *feasibility study*, mestinya kebijakan pembangunan merupakan *substanability*,” ujar Anggota Komisi V DPR R Abdul Hakim kepada Parleментарia baru-baru ini.

Abdul Hakim menambahkan pergantian rezim tidak boleh menghentikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, saya sangat menyesalkan keputusan pemerintahan Jokowi yang akan menghentikan program tersebut.

Terkait penolakan Jokowi-JK terhadap JSS dan lebih memperhatikan sektor maritim, Hakim menilai, dirinya mendukung program pemerintah yang memfokuskan kepada sektor tersebut karena sesuai dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memerintahkan pemerintah sebagai negara maritim, agar membangun sektor transportasi laut yang kuat dan besar, sebagai perwujudan negara kepulauan dan maritim, yang akan semakin menjadi perekat NKRI.

“Pemerintahan Jokowi-JK punya komitmen untuk hal tersebut, sangat sejalan dengan apa yang telah kami rumuskan dalam UU Pelayaran tersebut, kami akan memberi dukungan,” ujar Anggota Pansus UU Pelayaran Abdul Hakim ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan, pembangunan JSS bukan menjadi keputusan di DPR, tetapi itu merupakan keputusan pemerintah terkait kerja sama pemerintah dengan swasta, jadi memang belum pernah dibicarakan dan hal itu diluar APBN.

“Kita lihat nanti saja karena memang itu tidak masuk di wilayah DPR, karena itu pembiayaan lewat swasta kita tidak pernah disampaikan, Cuma hanya mengontrol bagaimana dari sisi konstruksinya dan lain-lain, termasuk pengamanan keselamatannya,”ujarnya.

Muhidin mengatakan, kalau di sektor kemaritiman memang seyogyanya bukan jembatan yang dibangun tetapi peningkatan pelabuhan, atau transportasi laut yang lebih bagus dan efektif. “Karena pembangunan tersebut lebih bagus dibandingkan pembangunan jembatan ratusan Triliun, tetapi waktu itu prinsip kita sepanjang tidak mengganggu dana APBN kami tidak keberatan, tapi kalau memang terkait APBN, maka kami keberatan karena masih banyak daerah-daerah lain yang sangat tertinggal masalah infrastrukturnya,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhadap proyek JSS namun dirinya mengkhawatirkan dampak pembangunan tersebut yang akan mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. “Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. Beliau khawatir dampaknya bakal mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” ujarnya.

Andrinof menjelaskan, Selat Sunda menjadi salah satu jalur penyeberangan terpadat, meski memang masih

banyak kekurangan kinerja. “Kalau dimatikan dan malah tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” katanya.

Dia mengatakan, pelayanan ataupun kinerja pelayaran di penyeberangan Selat Sunda seharusnya diperbaiki, misalnya dengan menambah kapal penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya.

Adapun pertimbangan kedua tak dilanjutkannya pembangunan jembatan itu karena akan meningkatkan ketimpangan. “Alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan justru membuat megaprojek yang menambah ketimpangan,” jelasnya.

Menurutnya, program kita ingin adanya pemerataan namun nyatanya kita akan membuat mega proyek yang membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di wilayah Jawa, jadi kita harus berhenti berpikir paradoks.

Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga menyebutkan bahwa yang juga disadari Presiden Jokowi adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih minim. *Backlog* atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya men-



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said

capai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.

“Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya *backlog* itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas, membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau untuk rakyat banyak?” paparnya.(nt) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.

IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA



Ketua Komisi V Fary Djemi Francis DPR AKAN DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Itulah kutipan pidato Presiden Joko Widodo usai pengambilan sumpah jabatan pada Senin, 20 Oktober 2014. Pidato perdana ini pun mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh tamu yang hadir. Pidato ini pun dipertegas dengan berbagai program yang dicanangkan pemerintah, terutama infrastruktur laut, seperti pelabuhan dan tol laut, untuk menunjang konektivitas antar wilayah Indonesia.

Untuk membahas hal ini, Tim Parle pun berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Komisi V DPR, sebagai Komisi yang membidangi pekerjaan umum, perhubungan serta perumahan rakyat, tentunya akan bermitra dengan kementerian yang berhubungan dengan infrastruktur. Berikut petikan wawancaranya;

Pemerintah mencanangkan program mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Sikap DPR menanggapi hal ini?

Kita akan memberi dukungan. Kita memberi dorongan dengan program-program yang menurut istilah Pak Joko Widodo itu membangun tol laut. Walaupun kita anggap program itu bukan sesuatu hal yang baru. Saya kira di Komisi V sudah membahas hal ini dan selama ini su-



Perbaikan jalan

dah berjalan. Ini hanya istilah baru, tol laut. Sementara, istilah kita di Komisi V disebut konektivitas antar satu pulau dengan pulau yang lain.

Konektivitas itu dimulai dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke Bali, Bali ke Sumbawa, Sumbawa ke Flores, Flores masuk ke Timor Timur, terus masuk ke Maluku, Maluku ke Papua. Itu kan sudah disiapkan, rangkaian itu sudah tersambung. Tapi, mungkin ada beberapa dermaga-dermaga yang masih putus. Nanti akan kita identifikasi.

Intinya program pembangunan tol laut kita dukung. Saya kira berkaitan dengan pelabuhan dan bandara-bandara juga akan kita dorong dan kembangkan. Khususnya beberapa bandara-bandara yang tidak bisa memperlancar barang dan jasa serta penumpang, itu yang sekarang kita

dalam di Komisi V. Karena kita tahu bahwa jika kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi maka infrastruktur juga harus ditingkatkan.

Apakah program maritim ini akan lebih dikuatkan dibandingkan dengan program-program lain yang berbasis infrastruktur?

Melihat situasinya, ya bisa saja. Negara kita kan kepulauan, program itu (infrastruktur maritim) yang mesti dikedepankan, Tapi selama ini yang sudah kita dukung, ke depannya harus kita audit dulu. Program yang lama apa sudah berjalan dengan baik. Soal tol laut itu sebenarnya itu istilah baru saja. Disebutnya konektivitas antar pulau itu programnya sudah berjalan. Cuma sekarang mungkin intensitasnya harus ditambah.

Sampai sekarang kan konektivitasnya itu hanya di pulau-pulau besar saja, sementara pulau-pulau kecil yang secara jumlah penduduknya tidak banyak itu seringkali tidak mendapatkan konektivitas. Untuk pulau besar itu oke, tapi kan kita punya pulau banyak sekali. Pulau-pulau kecil yang belum terkoneksi itu jadi pekerjaan rumah.

Tak dipungkiri, negara kita yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan pemerintah. ada yang menilai, pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa. Menurut Bapak?

Untuk itu, maka Komisi V juga mendorong agar Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan itu diusulkan lagi dalam Prolegnas. Per-

tama, wilayah kita memang wilayah kepulauan, tetapi pendekatan pembangunan kita lebih menggunakan basis darat. Makanya, untuk kebijakan-kebijakan, yang diambil yang berbasis darat. Perhitungan anggaran sering kali luas wilayah laut itu tidak menjadi bagian yang diperhitungkan dengan indeks.

Berikutnya, kita juga melihat cukup banyak daerah-daerah kepulauan yang sebenarnya punya potensi sumber daya alam, tetapi karena tidak diberdayakan akhirnya tidak berkembang. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau punya kebijakan-kebijakan yang peduli terhadap kepulauan, maka beberapa pulau itu bisa berkembang. Contohnya di Batam, karena punya potensi makanya bisa hidup.

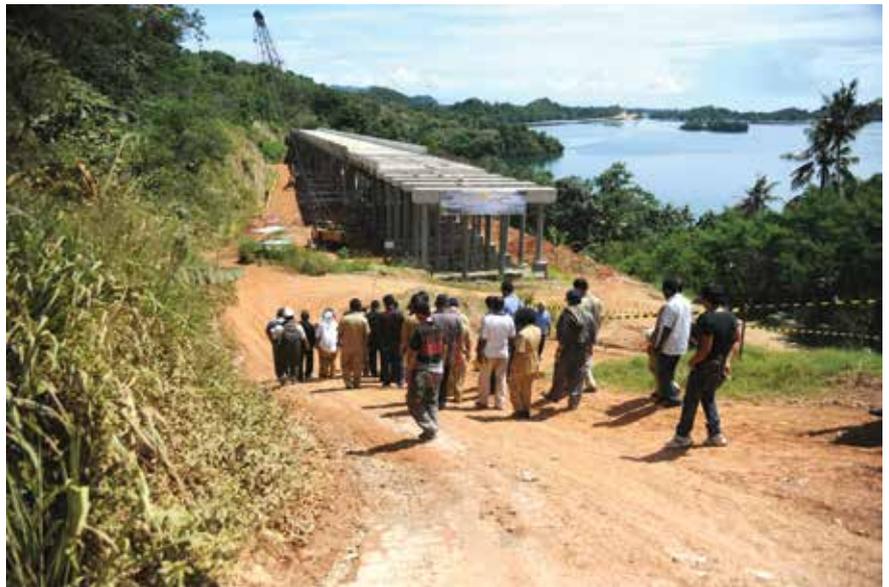
Selanjutnya, kita juga mau supaya pulau-pulau yang belum punya nama, kurang lebih sekitar lima ribuan dari tujuh belas ribuan belum punya nama. Bagaimana pulau-pulau itu bisa dijaga dan dipertahankan, sehingga tidak dipakai di tempat-tempat untuk yang sifatnya *illegal*, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan lain-lain.

Selain program infrastruktur maritim, adakah program lain yang mesti ditingkatkan oleh pemerintah?

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di DPR periode lalu, sampai tahun 2014 itu fokus kita untuk mendorong agar pembangunan irigasi ditingkatkan, agar sawah itu dapat dialiri oleh saluran irigasi yang berasal dari waduk. Saat ini baru mencapai 11 persen, padahal pemerintah menargetkan harus mencapai kurang lebih 20 persen.

Setidaknya kita meminta supaya sawah-sawah yang dialiri oleh waduk melalui irigasi dan sebagainya itu tembus di atas 30 persen. Sayangnya, disamping itu juga masih cukup banyak waduk, kurang lebih sekitar 60 persen yang tidak dapat dimanfaatkan, bahkan tidak berfungsi lagi.

Padaحال dari waduk yang bisa di manfaatkan itu bisa mengairi kegiatan pertanian melalui irigasi dan



Meninjau pembangunan infrastruktur di Papua

juga untuk memenuhi kegiatan dasar perumahan pemukiman, termasuk untuk mendorong swadaya pangan. Maka saya kira, salah satu sumber air harus disediakan dan harus dibicarakan dengan Komisi V bersama Kementerian PU, khususnya Dirjen Sumber Daya Air.

Nah, yang kedua, berkaitan dengan infrastruktur jalan negara yang selama ini sudah posisi hampir mencapai 96 persen itu sudah dalam kondisi baik. Memang, kita mengharapkan lima tahun ke depan seharusnya sudah bisa mencapai 100 persen. Tapi masalahnya sekarang bukan hanya jalan negara, tetapi di jalan daerah, yaitu jalan provinsi dan jalan kabupaten kota, dimana anggarannya dari Pemerintah Daerah. Dengan segala keterbatasan mereka (Pemda), kondisi jalan di daerah itu rata-rata masih di bawah 60 persen bahkan di bawah 50%.

Ini menjadi pekerjaan rumah kita. Konsep dalam rangka untuk meng-koneksikan antar penduduk yang ada di desa, penduduk yang ada di daerah untuk akses ke pasar. Kalau jalan negara sekarang sudah oke. Tapi jalan di daerah-daerah provinsi itu sering kali masih bermasalah. Nah itu yang kita kecam presentasinya, bagaimana jalan daerah itu bisa ditingkatkan. Di dalam Program Legislasi Nasional, kita mendorong UU Jalan, sehingga kita harapkan nantinya bisa menjawab persoalan

bahwa APBN juga bisa bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan di daerah.

Berikutnya, infrastruktur lain yang menjadi tantangan adalah *deadlock* perumahan. Menurut catatan kami, sekarang tiap tahun itu kurang lebih butuh sekitar 600 sampai 800 rumah kebutuhan untuk kebutuhan bagi lebih dari 12 juta masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pemerintah kita hanya bisa menyiapkan 300 sampai 400 ribu rumah. Semakin tahun, semakin bertambah. Maka kita berharap, pihak swasta juga ikut terlibat dalam mendorong investasi perumahan, khususnya dalam rangka kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagaimana dengan pembangunan selama ini yang sudah dijalankan? Pemerintah baru harus melanjutkan?

Sebelumnya, kita mau melakukan audit, khususnya pada program yang telah kita bangun yang sudah kita dorong yang kita dani tapi masih belum dimanfaatkan karena dalam kunjungan kerja kita juga masih banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang sudah dibangun tapi konektivitas jalan nya belum sampai di situ atau sudah dibangun tetapi terminalnya itu belum memenuhi atau sudah dibangun tetapi tidak ada kapal nya yang bersandar di situ nah itu sebagian dari pada kerjaan

kita 5 tahun ke depan untuk melakukan audit sehingga semua anggaran semua program semua kegiatan yang sudah kita setuju laksanakan itu bisa dilaksanakan. Bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bagaimana hasil kucuran anggaran infrastruktur dengan realisasi di lapangan, apakah sudah sesuai dengan semestinya?

Sebelum kita bicara lebih jauh, Komisi V akan melakukan audit program, yaitu program yang telah kita dukung dan disetujui, apakah program itu sudah dimanfaatkan. Misalnya bandara, apakah bandara ini sesuai dengan dulu yang diharapkan, jalan bagaimana, bangunan bagaimana. Itu semua kita audit dengan lintas Komisi.

Kita akan melakukan rapat gabungan. Contoh ada pembangunan waduk, dimana hal ini merupakan wewenang Komisi IV DPR. Kita beritahu, bendungan sudah ada, sehingga tinggal membangun irigasi untuk ke sawah, termasuk ke pemukiman. Sehingga, bagaimana dengan cipta karya, berapapun anggaran yang kita setuju dan kita dorong maka akan memberikan manfaat kepada

masyarakat. Intinya, manfaat kepada masyarakat.

Sehingga, soal infrastruktur bukan hanya persoalan membangun, tapi apa yang mau dibangun dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, pembangunan waduk, sehingga bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Soal pembangunan tol laut itu, apakah nanti produksi yang ada di daerah itu bisa terdistribusi dengan baik atau tidak, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, apa swasta perlu dilibatkan?

Oh iya, tentu saja. Kalau kita melihat seperti kebutuhan rumah tiap tahun yang mencapai 800 ribu rumah. Pemerintah hanya bisa menyediakan 300 sampai 500 rumah. Kita harapkan swasta bisa ikut terlibat dalam pembangunan beberapa infrastruktur lain. Saya kira swasta perlu memberikan dukungan yang kita harapkan.

Soalnya, anggaran untuk infrastruktur baru dipenuhi kurang lebih sekitar 40 persen dari kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh

pemerintah. Sisanya, atau 60 persennya, kita harapkan bisa didorong dan didukung oleh masyarakat sendiri atau pihak swasta. Anggaran kita di infrastruktur belum sampai 5 persen dari APBN. Padahal kalau negara berkembang yang lain, mereka sudah di atas rata-rata 7 sampai 8 persen.

Harapan bapak nantinya ketika konektivitas dari Sabang sampai Merauke sudah terhubung?

Ya kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka hasil-hasil komunitas yang ada di daerah masing-masing bisa terdistribusi lebih baik dan lebih banyak, maka akan memberikan manfaat terhadap pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Kita mau, supaya tidak hanya membangun infrastruktur, tapi pembangunan itu memberikan dampak kepada positif kepada masyarakat, terutama kesejahteraan masyarakat meningkat, kesehatan semakin baik, dan sumber daya manusianya semakin berkualitas. (sf)

Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.





INFRASTRUKTUR SEBAGAI RODA PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Infrastruktur menjadi faktor utama ketiga yang berpengaruh terhadap iklim investasi, selain proses ekspor impor dan kondisi makro ekonomi suatu negara. Infrastruktur juga menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena tingkat elastisitasnya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto.

Sedangkan, infrastruktur menurut persepsi dunia usaha dapat memberikan kontribusi sebesar 32,18% terhadap peningkatan daya saing perdagangan luar negeri, sehingga menjadikan infrastruktur sebagai faktor penting kedua yang mempengaruhi daya saing perdagangan luar negeri. Strategisnya posisi in-

frastruktur tersebut, tak berlebihan jika infrastruktur dikatakan sebagai katalis pembangunan.

Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-25 ASEAN, yang digelar di Nay Pyi Taw, Myanmar beberapa waktu menyampaikan pentingnya implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity*, termasuk infrastruktur di bidang maritim. Sedangkan, dalam kesempatan CEO Summit APEC 2014 di Beijing, China, Presiden menawarkan kemudahan investasi bagi para pemodal asing untuk menanamkan modalnya di bidang infrastruktur.

Bank Dunia menyebutkan, untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 6% per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% dari PDB per tahun. Namun, pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif masih cukup rendah. Pemerintah perlu mengoptimalkan dukungan sumber-sumber pembiayaan infrastruktur yang berasal

SKENARIO KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010-2014

- Rencana kebutuhan investasi infrastruktur meningkat dari perencanaan semula sebesar Rp.1.429,3 T menjadi Rp.1.923,7 T seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mendorong percepatan pembangunan dalam MP3EI (minimal 5% of PDB)
- Selama 2010-14 diharapkan investasi infrastruktur naik gradual dari 3,25% menjadi 5% of PDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sd > 6%
- Kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur 2010-14 sekitar 2X kemampuan pemerintah 2005-09 yaitu sekitar Rp 559,54 T (APBN) dan Rp 355,07 T (APBD)
- Dukungan pembiayaan dgn KPS yaitu: BUMN sekitar Rp 340,85 T, & Swasta Rp 344,67 T
- 20% pembiayaan KPS merupakan dukungan pemerintah
- Gap pembiayaan diharapkan dibiayai dari alternatif sumberdana lainnya atau swasta murni



pu@2013



Pembangunan jembatan di Papua

ditambah dari sektor swasta yang diperkirakan mampu menyumbang dana sebesar Rp 344,67 triliun. Pasalnya, masih akan ada kekurangan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 323,67 triliun.

Pembiayaan Infrastruktur Melalui APBN

Pemerintah berkomitmen anggaran untuk membangun infrastruktur secara umum meningkat setiap tahunnya. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir anggaran bidang infrastruktur meningkat sangat signifikan, yaitu dari Rp 86,0 triliun pada tahun 2010 menjadi 206,6 triliun pada tahun 2014. Kenaikan hingga mencapai lebih dari 100% tersebut dipetakan melalui beberapa kementerian atau lembaga dan transfer ke daerah.

Pemetaan anggaran infrastruktur menunjukkan terdapat empat kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja infrastruktur terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total pagu empat kementerian pada APBN 2014 sebesar Rp 126,1 triliun atau sebesar 73% dari total anggaran infrastruktur yang dikelola oleh kementerian/lembaga.

Dalam alokasi belanja infrastruktur yang dikelola oleh non K/L, terlihat bahwa peran Dana Alokasi Khusus infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam APBN 2014, pemerintah juga mengalokasikan dana kontijensi PLN untuk mengatasi kurangnya pasokan listrik dan meningkatkan porsi penyertaan modal pada beberapa BUMN antara lain PT. Utama Karya.

Perbaikan kualitas infrastruktur pun terus dilakukan pemerintah. Setidaknya hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penilaian kualitas infrastruktur Indonesia menurut *World Economic Forum* (WEF). Secara umum, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72 dengan indeks 4,2 pada tahun 2014-2015. Peringkat ini berada di atas negara-negara ASEAN lainnya terkecuali Malaysia. Dibandingkan

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013		2014
	Real	Real	Real	Real	APBN	APBNP	APBN
1 Kementerian Negara/Lembaga	62.3	59.9	91.2	122.6	146.6	153.6	172.6
33 KEMEN PU	29.7	24.9	41.8	56.5	65.6	66.7	72.4
22 KEMENHUB	12.8	12.4	16.0	25.3	30.6	30.7	31.5
20 KEMEN ESDM	4.8	3.0	6.2	6.7	13.8	13.8	11.5
23 KEMENDIKBUD	3.4	5.1	8.2	8.4	3.1	8.8	10.7
- K/L lainnya	11.6	14.5	19.0	25.8	33.5	33.6	46.5
2 Non K/L	14.0	26.1	23.0	22.8	30.0	30.7	34.0
a.1 1 Risiko kenaikan harga tanah (land capping)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3
2 Unit percepatan pembangunan Provinsi Papua & Papua Barat	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3 Pemetaan & pembangunan shelter daerah rawan bencana	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4 Penyelesaian pembangunan perumahan warga baru NTT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0
5 Cadangan VGF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.1
6 Belanja hibah	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.3	3.5
7 Dana Alokasi Khusus	7.2	4.5	6.1	6.3	10.9	10.9	12.4
8 Tambahan otonomi khusus infrastruktur	2.1	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	2.5
9 Investasi pemerintah untuk infrastruktur	0.5	3.6	4.6	6.0	3.7	3.7	3.0
10 Dana kontijensi PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0
11 Penyertaan modal negara	1.5	3.8	3.5	5.0	2.0	4.0	3.0
12 LPDB KUKM	0.3	0.4	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0
TOTAL	76.3	86.0	114.2	145.5	176.6	184.3	206.6

Anggaran Infrastruktur 2009-2014
Sumber: Depkeu, Dirjen Anggaran, 2014

dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan daerah serta swasta, sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Dengan asumsi terjadi peningkatan belanja infrastruktur dalam rentang waktu 2010-2014, Pemerintah memproyeksikan besarnya nilai investasi dalam infrastruktur selama kurun waktu 2010-2014 mencapai Rp 1.923,7 triliun. Untuk membiayai

infrastruktur tersebut, pemerintah “hanya” mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 559,54 Triliun, ditambah dari dana APBD sebesar Rp 355,07 triliun, dan BUMN yang diperkirakan akan menyumbang Rp 340,85 triliun.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk membangun infrastruktur, terutama daerah di luar pulau Jawa. Bahkan, jika

No	Faktor Peringkat	Year					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Overall infrastructure quality	96	90	82	92	82	72
2	Roads quality	94	84	83	90	78	72
3	railway quality	60	56	52	51	44	41
4	Seaport quality	95	96	103	104	89	77
5	Air transportation quality	68	69	80	89	68	64
6	Number of flight quality	21	21	20	20	15	14
7	Electricity network quality	96	97	98	93	89	84
8	Telephone network quality	79	82	79	78	62	71
9	Mobile phone network quality		98	82	90	82	54

Peringkat Infrastruktur Indonesia menurut World Economic Forum, 2009-2014
Sumber : The Global Competitiveness Report, World Economic Forum

dengan tahun sebelumnya, peringkat yang dicapai Indonesia pada tahun 2014-2015 naik 10 tingkat dari posisi sebelumnya 82.

Kenaikan peringkat kualitas infrastruktur Indonesia merupakan salah satu faktor meningkatnya peringkat daya saing Indonesia. WEF menempatkan Indonesia di peringkat 34 dari 144 negara, atau naik 4 tingkat dari posisi sebelumnya, posisi 38 pada tahun 2013-2014, dan posisi ke 50 pada 2012-2013. WEF juga mengelompokkan Indonesia sebagai lima besar ekonomi Asean bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang terus memperbaiki peringkat daya saing mereka sejak tahun 2009. Peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dari Pilipina, Vietnam dan Kamboja, meskipun Indonesia masih berada dibawah Malaysia dan Thailand.

Meningkatnya peringkat infrastruktur Indonesia menurut WEF, tidak serta merta mengabaikan adanya ketimpangan kondisi infrastruktur Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ketimpangan ini setidaknya dapat diindikasikan dari kontribusi tiap wilayah terhadap PDB Indonesia. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni di Pulau Jawa, menyebabkan kegiatan ekonomi sekunder dan tersier terkonsentrasi di pulau terbesar ke lima Indonesia ini.

Dengan demikian, Pulau Jawa dengan luas daratan hanya sekitar 7% luas daratan Indonesia, mampu berkontribusi 58% terhadap total PDB Indonesia, sementara kawasan



timur Indonesia yang memiliki luas daratan sekitar 25,91% hanya berkontribusi 2,18% terhadap PDB. Indikasi lainnya adalah kemampuan Pulau Jawa dalam menarik investor dalam negeri dan investor asing. Data tahun 2012 menunjukkan 91,8% total investasi nasional ditanamkan di Pulau Jawa, atau Rp 55.800,9 miliar investasi dalam negeri dan US\$ 14.142,0 juta investasi asing.

World Bank juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2005-

Tahun	Aspal (Km)	Bukan Aspal (Km)	Jumlah (Km)
2005	216714	174294	391008
2006	223343	183226	406569
2007	250280	171255	421535
2008	258744	179015	437759
2009	271230	205107	476337
2010	277755	209559	487314
2011	279351	213047	492398
2012	285252	216717	501969

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan, 2005-2012
Sumber : Badan Pusat Statistik

2014, beberapa indikator perkembangan infrastruktur menunjukkan tidak adanya perkembangan (stagnasi). Sepanjang tahun 2005-2014, tidak ada pertumbuhan panjang rel kereta api maupun prosentase jalan yang diaspal. Dalam kurun waktu tersebut, panjang rel kereta api hanya 4.684 km dan prosentase jalan beraspal hanya 57%.

Terkait dengan proyek pekerjaan infrastruktur, mulai tahun 2011 Indonesia mulai menerapkan sistem *Performance Based Contract* (PBC) yang telah menggantikan sistem kontrak tradisional. Dalam sistem PBC, pembayaran kontrak ditentukan oleh seberapa baik kontraktor berhasil memenuhi standar kinerja minimal yang ditetapkan dalam kontrak, bukan pada jumlah pekerjaan dan jasa yang dikerjakan.

Dalam hal ini, pemilih proyek menetapkan indikator kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor. Di sisi lain, kontraktor leluasa untuk menentukan perancangan, proses manajemen dan metode kerja paling efisien termasuk penerapan teknologi inovatif.

Konsekuensi logis dari kontrak PBC, terdapat pergeseran atau pengalokasian risiko yang lebih besar kepada pihak kontraktor, namun juga membuka peluang untuk meningkatkan keuntungan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Berdasar pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan PBC untuk pekerjaan perawatan jalan, dilaporkan terjadi penghematan dibanding dengan menggunakan jenis kontrak tradisional.

No.	Negara	Penghematan
1	Norwegia	Sekitar 20-40%
2	Swedia	Sekitar 30%
3	Finlandia	Sekitar 30-5-%, biaya/km turun 50%
4	Belanda	Sekitar 30-40%
5	Estonia	Sekitar 20-40%
6	Inggris	Minimal 10%
7	Australia	10-40%
8	Selandia Baru	Sekitar 10-15%
9	USA	10-15%
10	Kanada	10-20%



Perbandingan Penghematan Penggunaan PBC di Berbagai Negara
 Sumber : Pakkala, 2005 dalam Buku Infrastruktur, Kondisi dan pembiayaannya

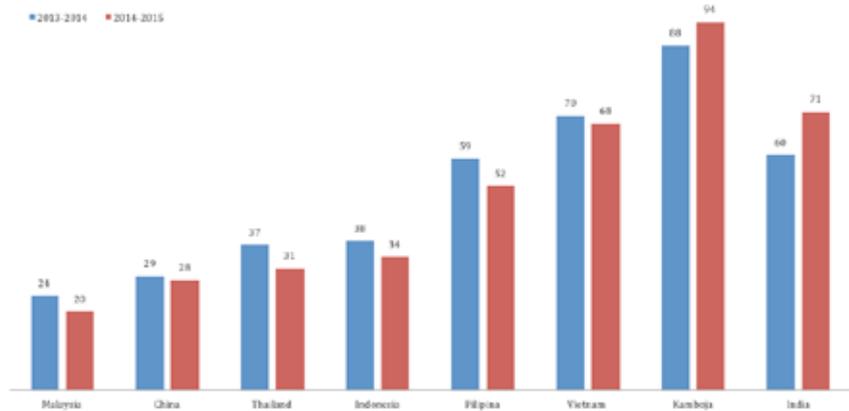
Penggunaan PBC di Indonesia mulai diterapkan untuk proyek perawatan jalan dengan jangka waktu 4 tahun. Sebagai *pilot project*, sistem ini diterapkan di jalur Pantura ruas Ciasem-Pamanukan sepanjang 21,7 km dan ruas Demak-Trengguli sepanjang 12 km. Dengan besar anggaran masing-masing sebesar Rp 128,9 miliar dan Rp 74,45 miliar. Penghematan dari proyek inilah yang perlu dicermati dan menjadi perhatian masyarakat luas, sehingga sistem PBC lebih efektif dibanding kontrak tradisional.

Pembangunan Infrastruktur Maritim

Salah satu agenda pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan 2014-2019 adalah pembangunan infrastruktur di sektor maritim atau yang biasa disebut sebagai tol laut. Optimisme yang cukup tinggi muncul untuk menyambut agenda pembangunan di sektor maritim ini, mengingat dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah kelautan.

Satu alasan mudah yang mungkin terpecahkan dari terbangunnya infrastruktur maritim ini adalah terbebasnya masalah lahan yang terkadang membelit pembangunan infrastruktur darat. Satu hal

yang dapat mendukung agenda pemerintah ini adalah membaiknya kualitas pelabuhan Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas pelabuhan menurut *World Economic Forum*.



Peringkat Daya Saing beberapa Negara Asia
 Sumber : *The Global Competitiveness Report, World Economic Forum*

Yang menjadi penting dari pelaksanaan agenda ini adalah sisi visibilitas. Pemerintah harus memiliki desain kebijakan dan skema pembiayaan yang jelas. Berdasarkan desain tersebut, maka pemerintah akan dapat memetakan dimana dan bagaimana sektor maritim suatu daerah akan dikembangkan. Terkait dengan hal ini, pengembangan

sektor maritim disarankan dimulai dari wilayah Indonesia Timur, sebab wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam yang berasal dari laut. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Indonesia Timur.

Pembangunan di sektor ini hendaknya juga memperhatikan konektivitas antar daerah dan terintegrasi dengan potensi ekonomi daerah yang akan dibangun. Disamping itu, pembangunan industri pendukung juga memerankan arti penting, karena dengan tersedianya industri pendukung yang mumpuni, maka akan lebih menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Dengan koridor pembangunan dan visi pembangunan yang jelas, maka pembangunan infrastruktur maritim merupakan cara terbaik untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menggeser sentra pertumbuhan yang selama ini terpusat di Indonesia bagian barat, sehingga pembangunan pun dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ditulis oleh:
 Kasubag Belanja Negara, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI, Slamet Widodo | *Analisis APBN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI, Titik Kurnianingsih*
Disunting oleh: sfl/parle

Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.



DPR Ingin Wujudkan Legislasi Yang Berkualitas dan Aspiratif

Selama ini, DPR banyak mendapat kritik dari masyarakat karena rendahnya produk Undang-Undang (UU) yang dihasilkan. Hasil pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode keanggotaan DPR 2010-2014 jika dilihat dari segi banyaknya UU yang pro-rakyat, dapat dikatakan cukup berhasil. Namun dari segi kuantitatif jumlah produk UU yang dihasilkan masih dipandang minim.

Berikut adalah beberapa UU yang dihasilkan DPR periode 2010-2014, yaitu UU tentang BPJS, UU tentang Desa, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Penangan Fakir Miskin, dan lain-lain.

Menjelang akhir masa bhakti DPR, yaitu pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015, Dewan berusaha untuk menyelesaikan berbagai RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, diantaranya RUU tentang

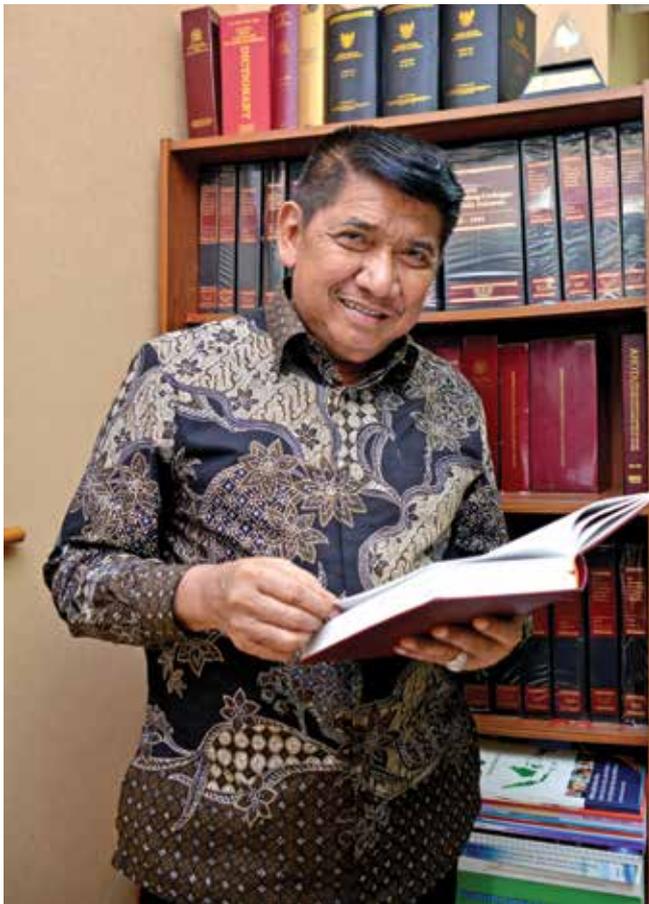
Hak Cipta, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Jaminan Produk Halal, dan lain-lain.

Namun demikian, masih ada sekitar 27 RUU Prioritas yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I baik di Komisi-komisi maupun di pansus yang belum dapat diselesaikan, seperti RUU tentang Revisi UU tentang Penyiaran, RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHP, RUU tentang Revisi UU tentang Penempatan dan Per-

lindungan TKI di Luar Negeri, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, DPR periode sebelumnya menaruh harapan agar sejumlah RUU yang tidak dapat diselesaikan dapat dibahas pada keanggotaan DPR periode saat ini. Hal ini tentu berangkat dari pertimbangan tentang efisiensi dan ketersediaan waktu.

Namun yang menjadi persoalan menurut Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Sarehwiyono mengenai masalah ini (*carry over legislacy*) me-



Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Sarehwiyono

merlukan payung hukum yang jelas, mengingat baik di dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) maupun Peraturan DPR masih belum diatur mengenai hal ini.

“Oleh karena hal itu, pembentukan peraturan untuk mengakomodir persoalan ini menjadi mutlak untuk dilakukan dengan cara merevisi Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas,” kata Sareh kepada Parlementaria.

Sareh menjelaskan, terlalu banyaknya jumlah rencana legislasi yang hendak diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun menjadi kendala utama yang dihadapi DPR selama ini.

“Terlalu banyaknya jumlah RUU dalam Prolegnas menyebabkan DPR seringkali kesulitan untuk memenuhi target Prolegnas sebagaimana mestinya. Disamping itu, selalu muncul rencana legislasi baru baik yang diusulkan DPR maupun pemerintah pada setiap tahunnya,” jelas politisi dari Partai Gerindra ini.

Kemudian, minimnya komitmen baik dari pemerintah maupun DPR terhadap daftar yang telah ditetapkan pun turut menambah daftar kendala yang dihadapi DPR.

“Kedepan, perlu ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk memenuhi target Prolegnas yang akan dirancang bersama-sama nanti,” tegasnya.

Problem berikutnya yang dihadapi DPR, tambah Sareh, adalah masih terlalu umumnya indikator suatu

RUU dimasukkan dalam daftar prioritas. Akibatnya, jumlah RUU yang menjadi prioritas menjadi makin banyak, padahal jika kriteria ini mampu diperketat, maka dapat dihasilkan daftar prioritas RUU yang memang benar-benar penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kami menyadari betul bahwa kapabilitas anggota Dewan selama ini memang turut menjadi kendala. Banyak anggota yang belum memahami bagaimana mekanisme *legal drafting* dan masih harus belajar lagi sehingga hal ini mengakibatkan kinerja DPR di bidang perundang-undangan selama ini terkesan lamban,” terang Sareh yang juga Anggota Komisi III DPR.

Berikut adalah beberapa terobosan-terobosan yang akan dilakukan Baleg DPR kepemimpinan Sareh, antara lain :

Pertama, penguatan peran Baleg sebagai alat perlengkapan yang membidangi persoalan legislasi di DPR. Penguatan dimaksud dapat dimulai dengan peningkatan kapasitas anggota Baleg serta unit-unit pendukung demi mewujudkan Baleg yang efektif efisien serta berguna bagi masyarakat.

“Dengan sendirinya jika hal ini mampu dicapai, fungsi legislasi DPR pun akan terwujud,” jelas politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini.

Kedua, proses perencanaan legislasi nasional dilakukan melalui penelitian dan pengkajian. Proses perencanaan legislasi nasional harus dilakukan melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam, yang meliputi aspek asas-asas, norma, institusi dan seluruh proses tersebut dituangkan dalam suatu naskah akademik.

“Hal ini sekaligus akan menjadi parameter RUU mana saja yang layak diprioritaskan setiap tahunnya,” imbuhnya.

Ketiga, penguatan mekanisme penyusunan Prolegnas yang mendukung efisiensi dan efektivitas capaian Prolegnas yang disesuaikan dengan kemampuan DPR dan pemerintah dalam membahas RUU.

Keempat, akan dilakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap penyusunan Prolegnas, baik di lingkungan DPR maupun pemerintah. Hal ini akan mendorong pemrakarsa untuk mengajukan Program RUU yang benar-benar mempunyai nilai urgensi secara nasional.

Terakhir, kelima, Baleg membuka partisipasi publik dalam proses legislasi di DPR seluas-luasnya. “Hal ini penting untuk menjangkau aspirasi dan tentu saja sebagai ruang untuk menilai kebutuhan masyarakat dan seberapa besar suatu RUU memiliki urgensi secara nasional,” jelasnya.

Sareh mengaku akan memprioritaskan RUU yang sangat dibutuhkan masyarakat (*pro rakyat*). Oleh karena itu, hal pertama yang akan dilakukan Sareh sebelum menyusun prolegnas adalah akan meminta masukan dari Komisi-komisi DPR, RUU mana yang akan diprioritaskan pembahasannya.

Sareh mengharapkan RUU yang akan dihasilkan nanti adalah yang berkualitas dan hasilnya itu betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Prolegnas 2015-2019

Berikut ini merupakan paparan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk dalam Rapat Pleno Baleg DPR mengenai Penyusunan Prolegnas 2015-2019.

Menurut Johnson, periodisasi dalam penetapan prioritas prolegnas berkorelasi erat dengan penentuan arah politik pembangunan periode tersebut. Agar rencana pembentukan undang-undang dalam periode 2015-2019 selaras dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional, diperlukan adanya formulasi penentuan prioritas rencana legislasi jangka menengah 2015-2019 disampaikan penentuan prioritas rencana legislasi tahunan.

Dijelaskan Johnson, bahwa yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan Program Legislasi mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DASAR HUKUM

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

- **Pasal 16**
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas
- **Pasal 45 ayat (1)**
Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- **Pasal 23 ayat (2)**
Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sumber: Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI

Pada Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan RUU yang berasal dari DPR maupun Presiden serta DPD disusun berdasarkan Prolegnas. Penyusunan Prolegnas antara DPR, pemerintah dan DPD dikoordinasikan oleh Dewan khususnya Badan Legislasi. Berdasarkan hal tersebut, Prolegnas menjadi instrumen penting didalam pembentukan Peraturan-undangan.

Apa yang menjadi indikator dalam penyusunan Prolegnas didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah secara tegas menyatakan adalah :

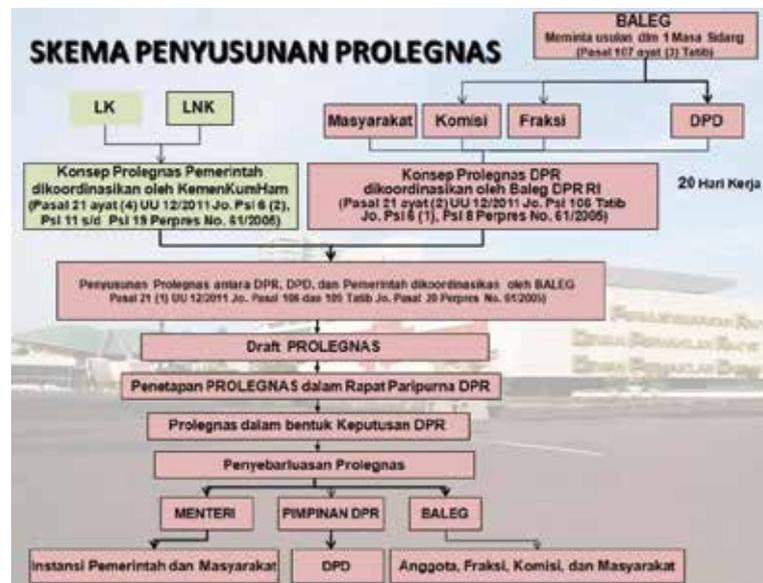
1. RUU yang merupakan perintah UUD 1945.
2. RUU yang merupakan perintah Ketetapan MPR.
3. RUU yang merupakan perintah dan/atau terkait den-

- gan pelaksanaan Undang-Undang lain.
4. RUU yang harus segera diubah/diganti/dicabut berdasarkan keputusan uji materiil Mahkamah Konstitusi.
5. RUU Perubahan atau Penggantian dari Undang-Undang warisan kolonial.
6. RUU yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.
7. RUU yang merupakan ratifikasi perjanjian internasional.
8. RUU yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Jika Program Legislasi sudah terbentuk, kata Johnson, maka salah satu hal yang juga perlu dipahami bersama adalah berkaitan dengan pengusulan RUU. Dulu dalam UU Nomor 27 tahun 2009, dinyatakan jika RUU dari DPR maka diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Anggota dan Badan Legislasi.

Saat ini, didalam UU Nomor 17 tahun 2014, pengajuan RUU dari DPR itu dapat diajukan oleh Anggota, Komisi dan Gabungan Komisi.

Berikut ini merupakan skema penyusunan Program Legislasi, dimana koordinasinya di Badan Legislasi.



Sumber: Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI

Semua RUU yang akan masuk didalam program legislasi baik dari DPD, dari Anggota dan dari Komisi dan juga tentunya dari Fraksi disampaikan ke Badan Legislasi, kemudian diinventarisir dan diputuskan sebagai bahan untuk koordinasi dalam penyusunan dan penetapan program legislasi bersama dengan pemerintah yang didalam UU Nomor 17 tahun 2014 secara tegas dinyatakan dikoordinasikan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan skema di atas, Ada tiga instistusi yang terlibat penyusunan dan penetapan program legislasi, yaitu DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dan DPD.

Tetapi posisi DPD, tegas Johnson, didalam penyusunan

dan penetapan program legislasi tidak didalam posisi ikut mengambil keputusan, tetapi hanya ikut didalam proses menyampaikan atau membicarakan. Pengambilan keputusan ada pada dua lembaga yaitu DPR dan Pemerintah.

“Program legislasi tentu dilakukan didalam Rapat Kerja dan Panja, kemudian disepakati, disampaikan didalam Rapat Paripurna, maka ditetapkan dua program legislasi kalau dilihat dari waktunya,” terangnya.

Satu adalah program legislasi yang memuat program didalam satu masa keanggotaan DPR yaitu 2015-2019.

Kedua, dari program legislasi 2015-2019 atau lima tahunan atau satu masa keanggotaan tersebut, ditetapkan prioritas setiap tahun anggaran.

Setelah ditetapkan, ada penyebarluasan dari program legislasi itu sendiri. Di lingkungan pemerintah tentunya penyebarluasan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk DPD dilakukan oleh DPD khususnya komite yang berkaitan dengan legislasi. Di DPR sendiri tentunya penyebarluasan dilakukan Badan Legislasi.

Kalau dilihat dari tahapan penyusunan/pembentukan



Sumber: Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI

UU (Tabel Tahapan Penyusunan), maka tahapan pembentukan UU itu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan.

Untuk penyusunan program legislasi dilihat dari sisi waktu, maka satu masa persidangan itu dimulai dari 16 Agustus – 16 Agustus tahun berikutnya. Dalam satu tahun setelah dikurangi untuk Reses dan hari libur, maka hari sidang/kerja DPR adalah 175 hari.

Tentunya ini harus menjadi pertimbangan, jika misalkan dalam satu tahun itu ada 70 RUU maka jika kita bagi 175 hari : 70 RUU = 3 hari. Artinya dalam waktu 3 hari 1 RUU harus sudah ada. Apakah itu memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah RUU? (Tabel Masa Sidang)

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Johnson juga menyampaikan rekomendasi prolegnas 2015-2019, sebagai dasar pertimbangan Baleg dalam penyusunan Prolegnas 2015-2019. (sc) Foto: Naefurodjie/Parle/Iw.

MASA SIDANG DPR



Catatan:

1. Pada Masa Persidangan I, APBN disahkan.
2. Tanggal 20 Mei Penyampaian Pokok Pikiran APBN
3. Hari libur: Sabtu Minggu = 104 hari
Hari-hari besar = 15 hari
4. Hari reses: 15 Hari * 4 = 60 hari
5. Hari reses kunker dapil 5 hari
6. Kunker = 1 kali setahun 5 hari
7. Hari sidang = 365 - 190 = 175 / 4 = 43 hari per masa sidang

Sumber: Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI

REKOMENDASI PROLEGNAS 2015-2019

- Jumlah RUU dalam Prolegnas long list 5 tahun x {(11 komisi x 22 RUU) + 5 Pansus}= 135 RUU
 - Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas: (11 komisi x 2 RUU) + 5 Pansus= 27 RUU
- Selain RUU Prolegnas, masih dimungkinkan adanya pembahasan RUU tambahan dari:
1. Anggota DPR berdasarkan Pasal 109 ayat (11) Tentang Tata Tertib Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib
 2. Daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

Sumber: Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI



Amati Lokasi

Ketua BURT DPR RI Roem Kono bersama Anggota BURT DPR RI meninjau lokasi perluasan Wisma Kopo. Foto: Iwan Armanias



Kunjungi Aceh

Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamsuddin mengunjungi Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh. Foto: Iwan Armanias



Dialog Dengan Siswa

Tim Kunker Spesifik
Komisi X DPR RI
dipimpin Wakil Ketua
Sohibul Iman berdialog
dengan siswa SMKN
3 Pontianak. Foto:
Naefurodjie



Server E-KTP

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Komisi II ke Dirjen Dukcapil Kemendagri Kalibata. Foto: Rizka



Siaga Bencana

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh P Daulay memimpin Kunjungan ke Pusdiklat BNPB Sentul Bogor. Foto: Mastur



12 MAKANAN UNTUK MENGATASI ANEMIA

Beberapa hari terakhir Tari karyawan Setjen DPR ini sering merasa kelelahan tidak bergairah. Sekali waktu ia juga merasa mual ketika bangun tidur. Hari itu ketika sedang mengetik surat ia mulai merasa sakit kepala, ada apa ya? Pertama ia menyangka semua gejala ini karena masuk angin, maklum beberapa hari terakhir ada lemburan yang harus segera diselesaikan. Ketika akhirnya ia memutuskan menemui dokter di klinik, daftar panjang keluhannya beberapa hari terakhir terjawab. Anemia.

Anemia atau kurang darah adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (hb) darah yang rendah atau kurang dari normal. Hemoglobin terdapat pada sel darah merah (eritrosit) yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh organ tubuh. Karena itu, bila seseorang mengalami kurang darah akan mengeluh lemah (*fatigue*) karena oksigen yang seharusnya masuk ke jaringan dan organ tubuh kurang dari semestinya. Lalu apa bedanya kurang darah dengan tekanan darah rendah?. Secara sederhana bisa dibedakan bahwa tekanan darah rendah adalah tekanan darah dalam pembuluh darah yang berkurang, sedangkan darah rendah adalah zat dalam darah yang berkurang.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia. Kekurangan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 adalah beberapa alasan utama anemia. Terus perlu diingat fakta

dan data menunjukkan wanita lebih rentan terhadap gangguan ini. Tapi jangan terlalu *worry*, sebenarnya menghadang anemia tidak terlalu rumit. Ada 12 makanan favorit yang perlu masuk dalam daftar menu anda sehari-hari seperti yang diulas Kurt Raven di healthdigezt.com. Mari kita lihat daftarnya berikut ini.

1. Bayam

Sayuran berdaun populer ini kaya akan zat besi, serat, vitamin A, B9, C dan E, beta-karoten, dan kalsium. Hal ini diperlukan untuk memelihara tubuh Anda. Dengan mengkonsumsi setengah cangkir bayam setiap hari, akan mendapat sekitar 20% dari nutrisi besi. Ini adalah diet penting, terutama bagi perempuan, karena mereka lebih rentan terhadap anemia. Kacang-kacangan hijau lainnya yang dapat membuat manfaat yang sama adalah brokoli, kol, daun selada, dan selada air.

2 Daging Merah

Jika Anda adalah seorang non-vegetarian, daging merah, seperti daging sapi, ayam dan ham, membuktikan menjadi sumber yang dapat memberikan jumlah tinggi zat besi heme, yang jauh lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Menurut beberapa penelitian, daging sapi memenuhi lebih dari 600% dari



Dr. Happy Apriyanti, MKK, Sp.Ok

kebutuhan zat besi harian tubuh. Makanan laut (*seafood*) adalah sama bagusnya untuk memerangi anemia. Salmon, tuna, tiram, kerang dan semuanya kaya dengan besi.

3 Oatmeal

Hanya dengan dua sendok makan *oatmeal* dapat memberikan 4,5 mg besi untuk tubuh. Selain itu, oat meal juga mengandung asam fitat, dan karenanya; disarankan untuk mengkonsumsi *oatmeal* yang 'diperkaya zat besi'. Olahan *oatmeal* juga mengandung B-12 dan dalam jumlah besar vitamin B lainnya.

4. Kacang

Cukup mengkonsumsi segenggam kacang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari besi, termasuk selai kacang. Makan *sandwich* selai kacang dengan segelas jus (terutama jus jeruk) setiap hari dalam sarapan dapat



memperkaya diri dengan 0,6 mg zat besi. Ada berbagai kacang lain juga yang dapat memberikan zat besi, seperti plum, kismis, aprikot kering, buah persik kering, almond, buah ara dan kurma.

5. Telur

Untuk persediaan jumlah tinggi antioksidan, protein, dan vitamin dalam tubuh, ketika Anda mengalami anemia, pastikan bahwa Anda tidak mengabaikan untuk memasukkan telur dalam diet harian Anda. Telur dapat membuat 1 mg zat besi, dan karenanya; sehingga setiap hari Anda akan mendapatkan pasokan nutrisi makanan yang cukup dengan sedikit kalori. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh dengan kecepatan yang cepat, dapat diminum bersamaan dengan vitamin C misalnya minum segelas jus jeruk plus telur. Telur tidak hanya akan menyembuhkan anemia, tetapi juga akan membuat tulang dan otot kokoh.



6 Roti Gandum

Sepotong roti gandum dikatakan memberikan 6% dari kebutuhan zat besi harian tubuh. Hal ini juga mengandung asam fitat (inhibitor besi), tapi roti yang dibuat setelah fermentasi tepung terigu, dapat mengurangi asam fitat, secara otomatis. Roti gandum merupakan sumber yang sangat baik dari besi non-heme, yang diperlukan untuk mengendalikan proses anemia. Produk gandum lainnya, seperti pasta, sereal, dan beras juga efektif untuk tujuan ini.

7 Delima

Delima diyakini untuk memasok besi untuk darah, dan dengan cara itu, dapat mengobati anemia. Delima memiliki vitamin, zat besi, serat dan potasium dan berfungsi menjaga aliran darah tetap lancar.

8. Tomat

Tomat juga kaya akan vitamin C yang efektif dalam mengobati anemia. Minum segelas jus tomat mentah setiap hari untuk mendapatkan nutrisi, seperti beta-karoten dan vitamin E. Ingatlah untuk tidak mengambil minuman soda atau berkafein, karena dapat menghambat proses penyerapan zat besi dalam tubuh.

9. Kacang-Kacangan

Salah satu makanan kaya akan besi adalah , bergam kacang-kacangan, antara lain kacang kedelai, kacang mete,dll. Satu cangkir setiap kacang ini dapat memberikan 5 mg zat besi. Namun, perlu untuk memasak dengan benar untuk menikmati manfaatnya. Kacang mengandung asam fitat yang bertanggung jawab dalam membatasi penyerapan zat besi dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan untuk merendam biji dalam semalam, sebelum memasak mereka. Selain itu, kacang juga diperkaya dengan protein tinggi dan rendah lemak, yang juga terbukti efektif dalam memudarnya anemia.



10. Apple dan Kurma

Buah ini juga bermanfaat dalam meningkatkan tingkat zat besi

dalam tubuh. Vitamin C dalam apel dapat membantu dalam penyerapan zat besi. Kurma sendiri kaya akan zat besi, dan dengan demikian; membantu dalam mengobati anemia.



11. Madu

Madu sangat mujarab dan penting untuk seluruh tubuh. Jika Anda 100 gm asupan madu, Anda akan diperkaya dengan 0.42 mg zat besi. Selain itu, magnesium dan tembaga dalam madu dapat meningkatkan tingkat hemoglobin dalam tubuh. Segelas jus lemon segar dicampur dengan madu di pagi hari efisien bisa melawan anemia.



12. Beetroot

Bit adalah alat pembersih darah yang efektif dan dianggap sebagai **salah satu cara terbaik** untuk mencegah anemia. Bit dapat diolah sebagai jus segar, dimasak sayur, atau sebagai salad,. Ini berisi baik jumlah kandungan besi. Nutrisi pada anemia mengaktifkan kembali dan re-membangun sel-sel darah. Bit merah adalah yang terbaik untuk mengobati anemia. (*)



Fadli Zon

Perjuangan Hidup Menuju Puncak

Di tengah kesibukan bekerja, ia menerima kedatangan Parleментарia dengan ramah. Sosoknya begitu tenang dan cerdas. Tuturnya jelas penuh makna. Inilah Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Kepada Parleментарia, ia berbagi cerita menarik tentang masa kecil di kampung dan romantika perjuangan hidupnya di masa muda. Ada kisah pilu dan bahagia yang mewarnai perjalanan hidup seorang Fadli Zon.



Fadli (digendong) bersama keluarga

Fadli pernah menjadi Anggota MPR RI dari Utusan Golongan mewakili unsur pemuda pada tahun 1997-1999. Pada Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor) dan langsung dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR. Bicara dunia sastra, budaya, dan sejarah, Fadli adalah orang yang tepat untuk diajak berbincang. Ia adalah kolektor berbagai benda yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi.

Bintang Pelajar

Jakarta, akhir 1960-an. Ibu kota masih terlihat kumuh. Angkutan umum seperti becak, bemo, helicak (helikopter becak), dan oplet, masih banyak berlalu lalang di jalan-jalan Jakarta. Lalulintas pun belum seramai dan sepadat sekarang. Jakarta relatif lengang. Gedung-gedung pencakar langit belum ada kala itu. Geliat pembangunan di Jakarta selalu mengundang perantau berdatangan dari berbagai daerah untuk mengadu nasib.

Adalah Zonwir, pria asal Payakumbuh, Sumatera Barat yang coba mencari penghidupan di Jakarta. Ia adalah guru olahraga dan kesenian di kampungnya. Di Jakarta, ia me-

nikahi Ellyda Yatim, dan tinggal di rumah orangtuanya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Hidupnya penuh kesederhanaan. Zonwir belum aktif bekerja kala itu. Sementara sang istri yang juga wanita Minang, adalah mahasiswi di IKIP Jakarta.

Sepasang insan ini tak lama dikaruniai anak pertama. Hari itu, tangis bayi memecah kesunyian. *Tahmid* tiada henti terucap. Di RS *Saint Carolus*, Salemba, Jakarta Pusat, bayi montok berjenis kelamin laki-laki itu lahir melalui operasi *caesar*. Saat lahir bobotnya 5 kg dengan panjang 57 cm dan rambutnya lebat. Bayi yang sangat sehat. Hari itu kalender menunjukkan tanggal 1 Juni 1971. Anak itu diberi nama Fadli. Dalam kontes bayi sehat yang ada di rumah sakit itu, Fadli dinobatkan sebagai pemenang kedua.

Fadli Zon adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Masa balita dihabiskan di Jakarta. Dari Utan Kayu, keluarganya sempat pindah ke bilangan Dukuh Atas, dekat Hotel Shangri-la sekarang. Ayahnya mengontrak rumah petak di kawasan Jakarta Pusat tersebut. Dukuh Atas merupakan daerah langganan banjir. Setiap musim penghujan selalu saja banjir menyerbuk rumah warga.

Menginjak usia 5 tahun, Fadli di-boyong keluarganya hijrah ke Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari Ibu Kota pindah ke alam pedesaan yang sejuk. Dari tradisi Betawi masuk ke lingkungan tradisi masyarakat Sunda. Di Cisarua, masih banyak sawah hijau membentang seluas mata memandang. Pepohonan tumbuh asri menyejukkan desa. Air sungai mengalir deras begitu jernihnya. Di wilayah kabupaten Bogor inilah, Fadli menghabiskan masa kecil dan remajanya.

Ayahanda Fadli waktu itu bekerja sebagai manajer di Hotel Cibulan Indah, Bogor. "Suasananya kampung sekali, akrab, lingkungan masih asri dan banyak permainan anak. Masyarakatnya berbahasa Sunda. Jadi, saya lebih fasih bahasa Sunda daripada bahasa Minang. Bahasa Minang saya terbatas dibandingkan bahasa Sunda. Di Cisarua itu, saya merasakan betul kehidupan orang-orang kampung," kenang Fadli, mengingat masa kecilnya.

Bersama sahabat-sahabat kecilnya, ia suka sekali bermain. Hampir semua permainan anak ia ikuti. Mulai dari main bola, pencak silat, main gambar, main kelereng, main karet, main sarung, main genteng, sampai main perang-perangan dari bambu *bebeletokan* atau *belecon*. Namun favoritnya adalah sepak bola. Bila bermain bola, Fadli suka di posisi *striker*.

Fadli kecil sempat masuk klub sepakbola BOCIKA (Bocah Cilik Kampung Anyar) di Cisarua. Bertanding dengan klub lainnya sering dilakukan. Ia senang sekali bila mampu menjebol gawang lawan. Hampir semua permainan anak-anak sangat disukainya. Kadang sehabis bermain, ia suka mandi di sungai yang airnya masih jernih dan dingin. Senang rasanya mengingat masa kecil di kampung.

Memulai pendidikan formalnya, Fadli bersekolah di SD Negeri Cibereum 3. Setiap hari ia naik mobil angkutan umum *Colt*, angkutan pedesaan yang mengantarnya ke sekolah. Ongkosnya Rp10 sekali jalan. Topografi Cisarua yang berbukit dan berada di dataran tinggi, memaksa anak-anak sekolah harus

naik angkutan umum, karena jalannya menanjak cukup jauh. Berbeda saat pulang sekolah, ia kerap berjalan kaki, karena permukaan jalannya menurun.

Di sekolah, Fadli sangat disukai para guru dan sahabatnya. Ia bintang pelajar di sekolahnya. Sejak kelas 1 hingga kelas 6, dia selalu menempati ranking pertama di sekolahnya. Bahkan, oleh sekolahnya ia sering diutus ke kontes pelajar teladan. Untuk tingkat kecamatan, Fadli menempati urutan pertama. Di tingkat kabupaten Bogor masuk 5 besar. Ia menyukai pelajaran matematika dan IPA. Pelajaran sejarah juga sangat disukainya.

Tak ketinggalan kegiatan kesenian selalu diikutinya. Sejak kelas 3 SD, ia ikut kegiatan ansambel angklung dan mulai menulis puisi pertamanya. Naluri sastranya sudah terbangun sejak usia belia. Hampir semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah diikutinya. Dan ada dua pengalaman menarik semasa SD. Pertama, ia pernah mengajar kurang lebih selama 2 bulan di kelasnya menggantikan wali kelas yang tidak masuk. Setiap hari ia harus menjadi guru pengganti bagi teman-teman sekelasnya. Bahkan, Fadli juga yang memberi tugas ulangan bagi rekan-rekan di kelasnya itu.

Pengalaman menarik kedua, saat masih duduk di kelas 3, Fadli pernah memimpin protes di kelasnya, lantaran sang wali kelas mengurangi nilai mata pelajaran agama di buku rapor dari nilai aslinya yang diberikan guru agama. Daya kritisnya ternyata sudah mulai tampak sejak SD. Ia dan rekan-rekan tak canggung mengajukan protes kepada gurunya yang waktu itu dinilai tak adil. Protes dikabulkan. Nilai itu pun dikembalikan ke posisi nilai aslinya.

"Itulah demonstrasi pertama saya," akunya, sambil tertawa. Kenangan masa kecil seperti tak ada habisnya diungkap. Fadli telah mengukir prestasi cemerlang, mengasah kemampuan seni, dan mempertajam daya kritisnya sejak duduk di bangku SD. Ia diakui sebagai siswa teladan dan berjiwa pemimpin. Bila ditanya apa cita-citanya sedari kecil, dia menjawab, ingin menjadi ilmu-

wan.

Musibah Beruntun

Fadli kecil hidup di tengah keluarga yang religius. Selepas Magrib, bersama teman-teman sekampung belajar mengaji di dekat rumahnya. Dahulu, ia punya 2 guru ngaji. Satu guru ngaji yang mengajarnya bersama teman-teman di rumah sang guru. Guru ngaji lainnya, khusus mengajar secara privat datang ke rumahnya. Ibundanyalah yang meminta guru ngaji tersendiri, agar Fadli bisa lebih serius belajar agama tanpa diganggu teman-temannya.

Tamat SD tahun 1984, Fadli melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Bogor. Ini SMP favorit yang terletak di kawasan puncak, Gadog.

Prestasinya terus berlanjut di SMP. Pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika sangat digemari. Bahkan, ia gemar membuat eksperimen kimia di sekolahnya. Ia juga siswa yang sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Tercatat, ia aktif di Pramuka, pencinta alam, majalah dinding, seni drama, dan puisi.

Sebagai pencinta alam, hampir dua minggu sekali ia mendaki gunung bersama teman-temannya. "Waktu kelas 1 SMP, saya pernah jalan kaki dari Cisarua ke Tasikmalaya. Kami berlima, 1 guru dan 4 siswa. Melintasi Cianjur, Garut, sampai ke kaki Gunung Galunggung," cerita Fadli.

Februari 1986, Fadli mengalami



Fadli bersama ibunya tercinta



Fadli sebagai pecinta alam

musibah yang hampir mengakhiri hidupnya. Syahdan, ketika itu ia dan kawan-kawan pencinta alam baru pulang dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dari Pelabuhan Ratu, mereka menumpang mobil menuju ke arah Bogor. Di tengah jalan, mobil yang ditumpangi berpapasan dengan bus. Tak dinyana, rem mobil *blong* dan seketika bertabrakan dengan bus. Fadli yang duduk paling kanan terpejal dan terseret.

Tubuh Fadli penuh luka. Tulang kaki patah. Kepala terbentur hingga tak sadarkan diri. Ia sempat mengalami koma selama 2 hari. Ia dirawat di tempat pemulihan patah tulang Cimande, Bogor selama 3 bulan. Dua bulan pertama tak beranjak dari tempat tidur. Lalu belajar jalan dengan tongkat. Untungnya, Fadli punya teman-teman sekolah yang

sangat baik. Hampir setiap hari, beberapa temannya mengantar materi pelajaran sekolah ke Cimande. Dan Fadli tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik.

Hingga tiba masa ujian, Fadli sudah bisa pergi ke sekolah. Ia tetap menjadi juara di sekolahnya. Juara kelas dengan nilai ujian tertinggi. Saat yang sama Fadli masih melakukan berobat jalan ke Cimande. Fadli tampak sabar menjalani hari-harinya dengan kondisi fisik yang serba terbatas.

Pada bulan Ramadan tepatnya 2 Juni 1986, Fadli dibonceng ayahnya naik motor untuk berobat rutin ke Cimande. Sore itu hujan rintik-rintik, tak dinyana musibah kembali terjadi. Motor yang mereka kendalikan dihantam truk pasir dan Fadli terseret 11 meter. Ayahnya wafat di

tempat kecelakaan di sekitar Megamendung, Cisarua. Sementara Fadli sempat tak sadarkan diri dengan tubuh terluka. Tempurung lututnya bergeser. Ia kembali mengalami patah tulang. Malam itu juga ia kembali dibawa ke pengobatan tradisional Cimande.

Fadli belum tahu ayahnya sudah wafat. Keesokan harinya, para kerabat membawanya ke Jakarta yang ternyata untuk menyaksikan sang ayah dikebumikan. Seketika Fadli menangis, tak tahan melihat ayah tercinta diletakkan di liang lahat. Di pemakaman Karet Bivak, Jakarta, sambil ditandu, Fadli berlinang air mata. Ia kehilangan sang ayah dalam kondisi terluka. Musibah tiada henti menerpa hidupnya. Namun, ia seperti dituntun takdir untuk selamat dari dua kecelakaan maut secara beruntun.

Tulang Punggung Keluarga

Usai musibah itu, Fadli dan keluarga hijrah kembali ke Jakarta. Fadli melanjutkan kelas 3 SMP-nya di SMP Fajar, Utan Kayu, Jakarta. Dibantu kerabat, keluarganya mengontrak rumah di Jakarta. Kondisi kaki Fadli masih dibalut gips dan bertongkat. Ke sekolah ia bercelana panjang, tidak bercelana pendek seperti siswa lainnya. Hidup pun terus berlalu meninggalkan kenangan musibah yang membekas.

Setamat SMP tahun 1989, Fadli masuk SMA Negeri 31 Jakarta. Masa setelah ditinggal ayahnya merupakan masa-masa sulit secara ekonomi. Sebagai anak sulung, ia akhirnya menjadi tumpuan keluarga. Apalagi, ibundanya hanya ibu rumah tangga biasa. Di masa remaja ini, ia aktif mengikuti banyak lomba karya ilmiah. Bahkan, sudah mampu menulis opini di media massa. Hasilnya lumayan untuk membantu ekonomi keluarga dan biaya pendidikan.

Fadli menyadari perannya di tengah keluarga. Ia harus menjadi tulang punggung untuk ibu dan dua adiknya. Sementara itu, kapasitas intelektualnya terus terasah semasa SMA. Ia suka sekali menghadiri berbagai seminar yang mengangakat tema-tema aktual kala itu. Saat duduk di kelas 2 SMA, Fadli sudah

mulai menulis di media nasional dan menjadi wartawan. Di sisi lain, prestasi akademiknya di sekolah tetap mentereng. Ia tetaplah siswa berprestasi di mana pun menuntut ilmu.

Karena prestasinya itu, Fadli mendapat beasiswa dari *American Field Service (AFS)* lewat program pertukaran pelajar. Kelas 3 SMA ia tamatkan di *Harlandale High School*, San Antonio, Texas, AS tahun 1990. Pertukaran pelajar ini diperuntukkan bagi siswa-siswa berprestasi melalui proses seleksi yang ketat. Selama bersekolah di Amerika, Fadli aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler, baik koran sekolah, klub film,

“Sebagai aktivis kampus, pengagum Bung Hatta ini, aktif berateater, kegiatan sastra, dan pers mahasiswa. Aktifitas menulis di sejumlah media massa juga tak pernah ia tinggalkan. Bahkan, dengan menulis opini, Fadli bisa membiayai kuliahnya sendiri.”

bagai Mahasiswa Berprestasi I UI dan III Nasional. Pada ajang pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat kampus. Ia mengalahkan peserta favorit lainnya dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi. “Seumur-umur baru kali itu ada utusan dari Sastra Rusia,” ujar Fadli. Dan memang hingga kini tak muncul lagi mahasiswa Sastra Rusia yang dinobatkan sebagai mahasiswa teladan di UI apalagi di tingkat nasional. Fadli telah mencatat sejarah tersendiri.

Sebagai aktivis kampus, pengagum Bung Hatta ini, aktif berateater, kegiatan sastra, dan pers mahasiswa. Aktifitas menulis di sejumlah media massa juga tak pernah ia



Fadli memimpin demonstrasi mahasiswa UI

klub drama, klub sains, hingga klub bahasa asing. Fadli termasuk lulusan terbaik dengan predikat *summa cum laude*.

Pulang ke Tanah Air, pemuda Fadli mendaftarkan ke Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok. Dia mengambil jurusan Sastra Rusia. Bukan tanpa alasan memilih spesialisasi

sastra dan sejarah Rusia. Semasa di Amerika, Fadli suka sekali membaca novel-novel karya para penulis Rusia seperti Dostoyevsky, Gogol, atau Turgenev. Amerika sudah ia kenal saat SMA, kini ia ingin mengenal lebih jauh negara adidaya lainnya lewat studi sastra dan sejarah Rusia.

Tahun 1994, Fadli dinobatkan se-

tinggalkan. Bahkan, dengan menulis opini, Fadli bisa membiayai kuliahnya sendiri. “Sebulan bisa 2 kali saya menulis artikel opini di koran. Waktu itu honorinya masih Rp250 ribu. Sementara 1 semester saya bayar Rp180 ribu. Jadi, satu tulisan bisa bayar kuliah 1 semester.”

Ketika Fadli masih tingkat I, Ketua



Saat memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan Fraksi dan AKD

Senat UI dijabat Chandra Hamzah, sekarang mantan Wakil Ketua KPK. Pada tingkat I inilah, Fadli sudah memimpin demonstrasi-demonstrasi di kampusnya dengan mengenakan jaket kuning. Ia pernah menjadi Presiden *Indonesian Student Association for International Studies* (ISAFIS), sebuah lembaga studi mahasiswa pengkaji masalah internasional.

Dengan segudang prestasi di kampusnya, ia selalu dipercaya memimpin delegasi mahasiswa dan pemuda Indonesia ke berbagai pertemuan di Korea, Philipina, Taiwan, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studi sastra, Mahasiswa Teladan III tingkat nasional itu, tetap berkiprah di almahaternya sebagai pembicara pada berbagai forum kajian ilmiah dan kemudian menjadi Direktur Eksekutif *Center for Policy & Development*

Studies (CPDS) tahun 1995-1997.

Menjadi Politisi

Dunia politik sebenarnya sudah tak asing bagi Fadli Zon. Pada 1997-1999, Fadli diangkat menjadi Anggota MPR RI dari Utusan Golongan mewakili pemuda. Fadli aktif sebagai asisten Badan Pekerja MPR. Tahun 1998, saat reformasi bergulir, ia ikut merancang berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB) bersama Hartono Mardjono dan Yusril Ihza Mahendra. Setelah keluar dari PBB tahun 2001, mantan Wakil Ketua Yayasan Bestari ini, aktif berbisnis.

Dunia politik praktis ia tinggalkan sementara. Fadli kemudian menjalani karir profesionalnya. Peraih penghargaan *Presidential Academic Fitness Award*, Amerika itu, pernah menjadi Direktur *Nusantara Energy Resources* (1999-2002). Kemudian

secara berturut-turut menjadi Direktur *Nusantara Energy* (2005), Direktur PT. Padi *Nusantara* (2005), Direktur *Golden Spike Energy Indonesia, Ltd* (2002-2005), dan Direktur PT. Tidar Kerinci Agung (2007).

Pada akhir 2007, Fadli ikut meng-gagas berdirinya partai baru yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) bersama Prabowo Subianto dan sejumlah kawan seperjuangan. Fadli menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sejak 2008 membidangi politik, hukum, dan keamanan (pol-hukam). Ia juga memimpin Badan Komunikasi Partai Gerindra. Kini, peraih *Master of Science* (MSc) bidang studi pembangunan ekonomi dari *London School of Economics and Political Science* (LSE), London, Inggris tersebut, juga aktif sebagai Sekjen DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Pada Pemilu 2014, Fadli menjadi caleg dari dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) dan berhasil melenggang ke Senayan. Kali ini ia langsung dipercaya menempati kursi Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan. Karir politiknya melejit. Semua ini tak lepas dari kerja kerasnya sedari belia hingga menjadi mahasiswa. Kesabaran, ketekunan, dan pergaulannya yang luas, mengantarnya pada posisi puncak di parlemen.

"Ini amanah yang berat tapi mulia. Ada peran besar yang bisa saya lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR. Bagi saya hidup ini mengalir saja. Saya akan berusaha menjalankan tugas ini sebaik-baiknya," kata mantan pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) ini. Bagi Fadli, berpolitik merupakan panggilan tugas dan ladang pengabdian untuk ikut berkiprah lebih jauh dalam memperbaiki bangsa dan negara ini.

Dengan berkiprah di DPR, berarti ia berada di jantung kebijakan untuk ikut mengambil keputusan terhadap arah kebijakan publik bersama pemerintah. Ketimbang berada di LSM atau ormas yang aksesnya terbatas, di DPR ia menjadi salah satu pejabat negara yang bisa didengar pandangan dan perspektifnya. Ini-

lah sisi perjuangan hidupnya menuju puncak karir politik.

Kolektor Benda Bersejarah

"Hidup ini singkat. Kita ini seperti debu dalam galaksi. Waktu harus kita isi dengan karya yang bermanfaat," tuturnya, bijak. Fadli sudah merasakan masa-masa sulit sepeninggal ayahnya. Dan ia juga telah merasakan bagaimana maut dua kali mengancam dirinya. Dua episode pahit dari sepenggal masa lalunya itu, mengantarkan Fadli pada kematangan dan kerendahan hati sikapnya. Kini, di pundaknya ada amanah yang sedang ia emban sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Kesibukan bekerja di luar rumah, memang, telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Tapi Fadli tetaplah seorang ayah yang punya perhatian pada keluarga. Ia menikah dengan Katharine Grace pada 1996. Sang istri adalah seorang advokat yang pernah bekerja sebagai konsultan hukum sebuah perusahaan dan kini *corporate secretary* sebuah bank nasional. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai dua buah hati yang cantik, Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli.

Bila berwisata, destinasi favorit keluarganya adalah ke Jawa Barat tempat ia menghabiskan masa kecil atau Sumatera Barat tanah kelahiran orangtuanya. Sesekali pernah pula mengajak keluarganya berwisata ke Eropa atau ke negara-negara Asia. Tempat-tempat bersejarah dan museum sangat digemari Fadli. Soal olahraga, ia hampir tak punya waktu lagi kecuali *treadmill* saja.

Bicara kegemarannya pada lagu, redaktur Majalah Sastra *Horison* sejak 1993 ini, menyukai lagu-lagu klasik, terutama dari Italia. Lagu Sunda dan lagu daerah juga ia sukai, terutama yang *jadul*, katanya. Di sisi lain, mantan Direktur Eksekutif *Institute for Policy Studies* ini, merupakan penulis buku yang produktif. Sebagai intelektual muda tentu ia punya karya pemikiran yang ia abadikan dalam sebuah buku.

Setidaknya ada 9 buku yang pernah ia tulis: (1) Gerakan Etnonasio-

nalisis: Runtuhnya Imperium Uni Soviet; (2) *The IMF Game: The Role of the IMF in Bringing Down the Soeharto Regime*; (3) Politik Huru Hara Mei 1998; (4) *The Politics of the May 1998 Riots*; (5) Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948; (6) *Mimpi-Mimpi yang Kupelihara: Kumpulan Puisi 1982-1991*; (7) Hari Terakhir Kartosoewirjo; (8) Idris Sardi: Perjalanan Maestro Biola Indonesia;

kurang lebih 10.000 piringan hitam tempo *doeloe*, koleksi perangkopenganko tua, dan tak ketinggalan surat-surat bersejarah dari mendiang Presiden Soekarno juga tersimpan rapi di perpustakaan itu.

Sebagai bentuk kecintaannya pada seni dan budaya, ia juga telah membangun Rumah Kreatif di Cimanggis, Depok yang menyimpan ribuan wayang khas Indonesia,



Bersama putri tercinta

dan (9) *Dreams I Keep*.

Satu hal yang belum kesampaian hingga kini, ia ingin menulis novel. "Saya belum ada waktu bikin novel. Kalau punya banyak waktu ingin sekali menulis novel," harapnya, tersenyum. Sebagai pencinta buku dan ilmu, mantan anggota *Asian Conference on Religion and Peace* tersebut telah membangun perpustakaan yang ia namai *Fadli Zon Library*. Sekurangnya sudah ada 45 ribu judul buku yang tersimpan. Fadli menyimpan koleksi buku-buku tua tentang Indonesia (Hindia Belanda) yang terbit pada 1700-an-1900-an di perpustakaan itu.

Fadli *Zon Library* mungkin merangkap juga sebagai museum mini. Tak hanya buku tua, ada koran tua yang terbit dari tahun 1826, koin tua dari berbagai kerajaan di Nusantara,

karya-karya kreatif, dan kerajinan lainnya. Sedangkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, dia membangun Rumah Budaya Fadli Zon yang telah menjadi tuan rumah aktivitas seni budaya Nusantara. Semuanya ia dedikasikan bagi masyarakat yang mencintai sejarah, seni, dan kebudayaan Indonesia.

Inilah sisi menarik seorang Fadli Zon, ia kolektor berbagai benda bersejarah. Dokumentasi benda-benda bersejarah itu tentu untuk mempertahankan ingatan kolektif kita pada sejarah kebesaran dan kekayaan bangsa ini. Hobinya sebagai kolektor melengkapi semua profesi yang pernah ia geluti, seperti jurnalis, akademisi, pengusaha, seniman, budayawan, dan kini politisi. (mh) foto: andri, dok pribadi/parle/iw.



HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH TAPI TUMPUL KE ATAS

Suasana gang kecil di Jl H. Geni RT 06/01, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (31/10/14) pagi, tampak seperti biasanya. Ibu-ibu berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung, anak-anak berlarian di sekitaran gang. Namun, sedikit ada pemandangan berbeda, karena terdapat beberapa aparat keamanan bersiap di depan mulut gang kediaman Mursida dan Safrudin.

Mursida dan Safrudin merupakan orang tua dari MA (23), pemuda yang ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Disinyalir, MA merekayasa wajah Presiden dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah berbuat mesum, yang kemudian diunggah di sosial media facebook. MA yang diketahui berprofesi sebagai tukang tusuk sate ini

diduga melanggar UU Pornografi.

Menjelang pukul 09.30 WIB, rombongan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tiba di kediaman Mursida, dengan didampingi pengacara pribadinya, Paramita Ersan. Awak media dan masyarakat sekitar pun sudah memenuhi halaman rumah Mursida. Ketika Fadli memasuki rumah, Mursida tampak menangis tersedu-sedu. Kondisi Mursida tampak sangat lemas, dikarenakan mogok makan semenjak anaknya ditahan.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini pun langsung berbincang-bincang dengan kedua orang tua MA. Mursida menjelaskan bagaimana keadaan anaknya, sembari matanya berca-ca-kaca. Bahkan, Mursida sempat bersimpuh di depan Fadli. Fadli pun menyempatkan melihat kondisi sekeliling rumah Mursida.

Usai mendengar keterangan dari orang tua MA, Fadli pun berjanji akan memberikan bantuan hukum

terhadap MA dengan mengerahkan pengacara. Ia akan berusaha meminta penangguhan penahanan untuk MA. "Saya kira ada baiknya ada penangguhan penahanan. Kita akan usahakan terus, dan akan kita bela semaksimal mungkin. Nanti ada dukungan pengacara, dan saya kira banyak yang ingin membantu Ibu Mursida. Tidak usah khawatir," kata Fadli menenangkan, sembari memegang tangan Mursida.

Apalagi, tambah Fadli, kasus ini menimpa masyarakat kecil, sehingga perlu mendapat perlindungan. Proses hukum harus adil untuk semua lapisan masyarakat. Untuk itu, ia akan memastikan bagaimana proses hukum yang melilit MA, apakah sudah *on the track* atau belum. Fadli pun menegaskan, kasus ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadi satu alat politik.

"Dengan apa yang terjadi kepada saudara MA, kita juga ingin tahu,



Fadli Zon ketika menemui jajaran Bareskrim, Polri, dan pemuda MA (penghina presiden)

jangan sampai terjadi satu kriminalisasi kepada *wong cilik*. Hukum jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita ingin hukum di tegakkan, jangan pandang bulu, dan jangan sampai orang kecil yang tidak mempunyai kekuatan hukum menjadi korban kriminalisasi hukum. Juga, jangan sampai kasus ini menjadi satu alat politik atau misalnya orang-orang tertentu ingin mencari muka kepada pihak pemerintah yang baru. Ini tidak boleh terjadi," cetus Politisi Gerindra ini.

Usai mengunjungi kediaman MA, Fadli pun mengajak Mursida dan keluarga untuk bertemu dengan Kepala Bareskrim, dimana MA ditahan, untuk meminta kepastian hukum yang menimpa MA. Kunjungan ini sekaligus menjenguk MA, mengingat Mursida belum bertemu anaknya selama beberapa hari.

Sekitar pukul 10.45 WIB, rombongan tiba di Mabes Polri, Jakarta. Fadli segera menemui jajaran Bareskrim, sementara Mursida dan keluarga diminta untuk menunggu di lobby Bareskrim. Usai pertemuan secara tertutup dengan jajaran Bareskrim, Fadli Zon mengakui ada kesalahan yang dilakukan MA.

Fadli menjelaskan, saat pertemuan tertutup, para penyidik dan Direktur

Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) yang menangani kasus MA memperlihatkan gambar yang dipermasalahkan pihak Presiden Jokowi. Fadli mengakui, gambar yang diunggah ke sosial media itu cukup berlebihan.

"Gambarnya memang keterlaluan. Saya kira tentu ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan MA karena ketidaktahuan. Polisi sudah melakukan dengan baik normal dan benar. Itu juga kita pastikan," jelas Fadli.

Ketika bertemu dengan Fadli, MA menyampaikan bahwa dirinya menduplikat gambar tersebut dan memasang di akun sosial media. Untuk proses hukum yang menjerat MA, Fadli memastikan akan tetap berjalan, sembari pihak keluarga dan beberapa pengacara yang akan mendampingi MA meminta penangguhan penahanan.

"Kedatangan saya ke Bareskrim bukan suatu proses melakukan intervensi proses terhadap hukum. hukum tetap berjalan. Kita sediakan pembelaan terhadap yang bersangkutan. Mudah-mudahan satu dua hari bisa dilakukan penangguhan," katanya. Atas kedatangan Fadli ini, Bareskrim Polri menyatakan MA mendapat penangguhan penahan-

an, namun harus melewati proses administrasi pada Senin (3/11/14).

Kejadian penangkapan MA bermula pada Rabu (29/10/14) pekan sebelumnya, mendadak tim dari Bareskrim Polri menahan MA. Penahanan ini menindaklanjuti aduan dari tim kampanye Jokowi-JK yang menemukan adanya gambar rekayasa pornografi Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. Atas penangkapan ini, kedua orang tua MA mendatangi Bareskrim Polri. Mereka meminta agar MA bisa dibebaskan.

Gencarnya pemberitaan perjuangan kedua orang tua MA di media massa, itu terdengar sampai ke pihak Istana Kepresidenan. Hingga akhirnya, Sabtu (1/11/14), kedua orang tua MA diperkenankan untuk menemui Presiden Jokowi di istana. Usai pertemuan, Jokowi menyatakan memaafkan sepenuhnya atas ulah MA.

Presiden Jokowi pun berjanji, MA akan ditangguhkan penahanannya pada Minggu (2/11/14). Namun, akhirnya MA ditangguhkan penahanannya pada Senin (3/11/14) pagi, dengan diantar oleh sejumlah polisi ke rumah kontraknya. (sf) foto:andri/parle/iw.



PIMPINAN DPR SILATURAHIM KE BEBERAPA KANTOR REDAKSI MEDIA MASSA

Tak kenal maka tak sayang. Demikianlah peribahasa yang pas untuk menunjukkan keinginan Pimpinan DPR RI mengunjungi beberapa kantor redaksi media massa nasional, diantaranya ke kantor redaksi harian Kompas dan MNC Group. Pertemuan ini sejatinya bukan pertemuan pertama. Pasalnya pimpinan DPR dan pimpinan juga staff redaksi media nasional tersebut sempat bertemu di berbagai acara.

Anjongsana Ke Redaksi Harian Kompas

"Tujuan kami mengunjungi kantor redaksi media massa nasional ini, selain ingin bersilaturahmi dengan teman-teman redaksi media massa nasional sekaligus sebagai Ta'aruf atau perkenalan walaupun sebenarnya secara pribadi antara kami (pimpinan DPR-red) dengan teman-

teman wartawan sudah kenal dan pernah bertemu sebelumnya," ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto saat mengunjungi kantor redaksi harian Kompas di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/11).

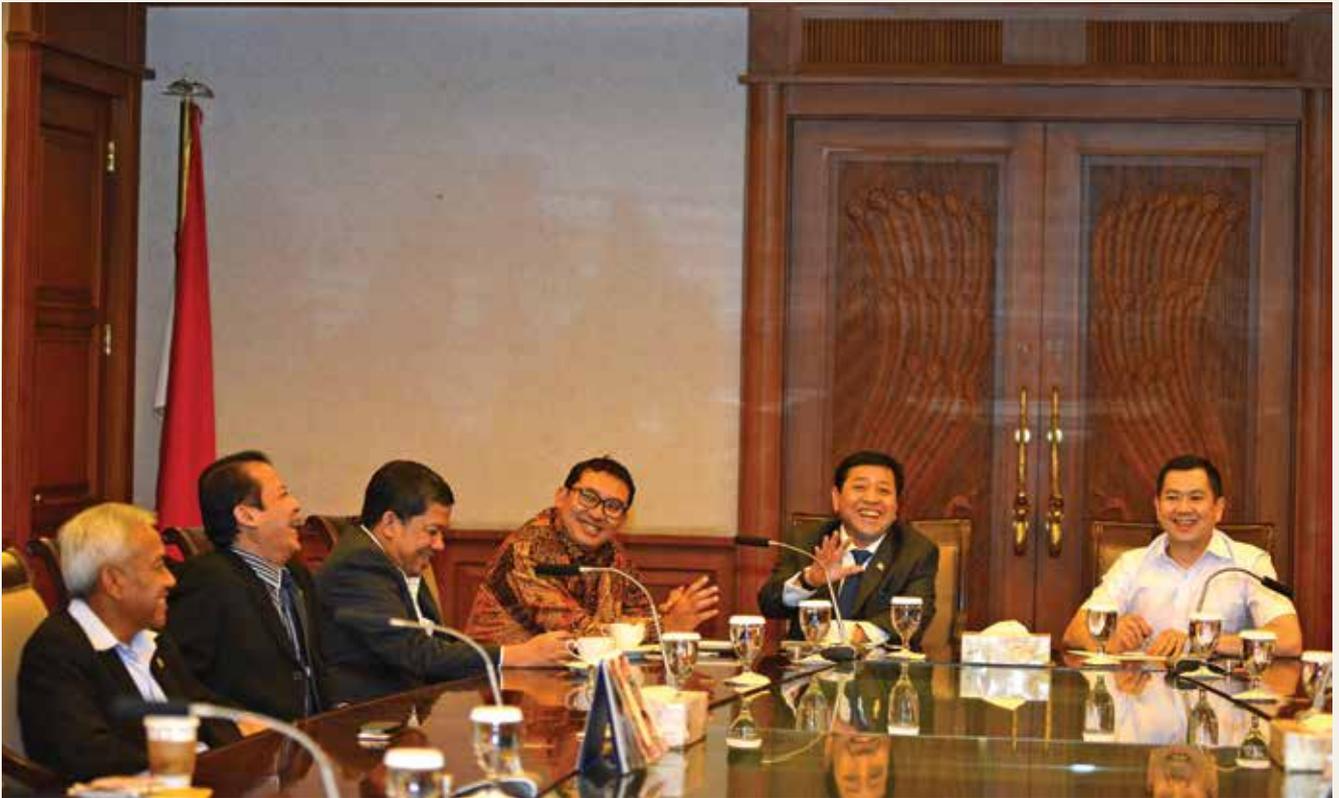
Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sebagai pimpinan DPR pihaknya juga ingin menyerap berbagai aspirasi dari media (pers) terkait tugas dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat. Pasalnya, media sebagai salah satu *stakeholder* masyarakat, sehingga bisa menjadi jembatan antara DPR dan rakyat, sehingga perlu terjalin sebuah silaturahmi dan komunikasi yang baik. Bahkan Taufik pun tak segan meminta masukan terkait kondisi DPR yang ketika itu, Selasa (4/11) masih belum menemui kata sepakat terkait dengan komposisi pimpinan dalam Alat Kelengkapan Dewan.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Ri-

kard Bagun mencoba *urun rembug*. Ia mengatakan bahwa kunci dari segala permasalahan yang terjadi di DPR adalah lewat Komunikasi yang baik. Oleh karenanya, ia berharap agar gejolak yang tengah terjadi di DPR itu tidak sampai berlarut-larut.

"Sejak pemilu sampai sekarang bisa dikatakan kita hanya bisa bergerak ditempat, energi yang dikeluarkan bergerus ke dalam, berputar dalam medan yang sama, akhirnya kita hanya bisa menonton, jangan-jangan keduanya kelelahan dan kemudian berhenti. Dan menurut kami Komunikasi *is a part of solution*," kata Rikard.

Pada kesempatan itu (sebelum Is-lah-red) Novanto menjelaskan bahwa sejak awal paripurna pertama, kedua dan ketiga, bahkan sebelum Presiden mengumumkan Kabinetnya, Komunikasi dengan berbagai pihak termasuk KIH telah dilakukannya. Namun ketika itu memang



Pimpinan DPR RI berkunjung ke MNC Grup diterima Hary Tanoesoedibjo

belum diketemukan titik temu. Syukurnya, kebuntuan itu akhirnya terpecahkan, Senin (17/11) di ruang Pustaka Loka, gedung Nusantara V, Senayan Jakarta baik KIH maupun KMP sepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian.

Dalam kunjungannya ke kantor redaksi harian Kompas, Ketua DPR juga berterimakasih atas dukungan Kompas selama ini kepada DPR RI. Bahkan pada saat isu boikot yang akan dilakukan oleh DPR atas pelantikan Presiden beberapa waktu lalu tidak terbukti, Kompaslah yang turut menyajikan kepada masyarakat ketidakbenaran kekhawatiran tersebut.

Ia berharap sebagai salah satu media terbesar, ke depan Kompas dapat terus bekerjasama dengan DPR dalam membangun negeri Indonesia dan untuk kemakmuran bersama. Bahkan untuk hal itu Novanto tak segan untuk menerima kritik yang bersifat konstruktif. Dengan begitu pihaknya dapat langsung mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya tersebut.

Kunjungan Pimpinan DPR ke MNC Group

MNC Grup menyatakan siap membantu publikasi kebijakan-kebijakan DPR lewat bantuan penyediaan akses televisi yang ditempatkan di berbagai sarana publik. Dengan begitu, semua aktivitas dan kebijakan DPR tersosialisasikan dengan baik ke tengah masyarakat.

Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group saat menerima kunjungan Pimpinan DPR, Kamis sore (6/11), menyatakan kesiapannya membantu Humas dan Pemberitaan DPR, memfasilitasi publikasi aktivitas DPR dengan menempatkan box televisi di berbagai rumah sakit, stasiun, terminal, dan tempat-tempat antrian publik seperti sarana pembuatan SIM, KTP, dan lain-lain.

"Sebagai media publik, kita punya kewajiban bagaimana ikut membantu menyuarakan program-program pemerintah maupun DPR kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih paham. Kita tentu dengan senang hati membantu DPR untuk bisa menyebarkan informasi tentang kegiatan parlemen kepada

masyarakat. Secepatnya bisa kita berikan. Dengan demikian ada sinergi yang baik dengan DPR," ungkap Hary usai pertemuan.

Kerja sama ini disambut baik oleh Pimpinan DPR yang saat itu hadir lengkap, baik Ketua DPR Setya Novanto dan empat wakilnya masing-masing Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Pertemuan yang sangat akrab itu, dihadiri pula oleh semua Pemimpin Redaksi Media yang tergabung dalam MNC Group, seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan semua kanal MNC, termasuk Okezone.com.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam pertemuan tersebut, mengatakan, sosok Hary Tanoe adalah pengusaha yang berani mengambil risiko, sehingga ia sangat sukses membangun usahanya. Bangsa ini pun harus berani mengambil risiko agar bisa maju. Sementara Taufik Kurniawan menyatakan, situasi politik di DPR yang terus dinamis akhir-akhir ini, membutuhkan dukungan media massa untuk memberitakannya secara objektif. (ayu/mh)/foto:andri/parle/iw.



Pembagian Kartu Sakti Presiden Joko Widodo

PERLU PENJELASAN DETAIL PROGRAM KIS

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program Presiden Joko Widodo yang telah direncanakan sejak masa kampanye. Senin 3 November 2014, kartu itu diluncurkan bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Namun, banyak yang bertanya-tanya bagaimana dengan kelanjutan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono digadang-gadangkan menjadi produk kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memandang program KIS yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11) merupakan produk lain dari BPJS Kesehatan.

"Setiap program pemerintah harus ada cantelan hukumnya yang disepakati bersama DPR. Sudah ada Undang-Undang BPJS, maka itu yang kita terima," kata Dede Yusuf dihubungi di Gedung Parlemen Jakarta.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan setiap program pemerintah harus memiliki payung hukum yang disepakati dengan DPR karena berkaitan dengan ang-



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

garan, infrastruktur dan audit.

Karena itu, payung hukum yang memungkinkan bagi KIS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Menurut Dede, salah satu klausul dalam Undang-Undang BPJS memungkinkan adanya produk-produk lainnya. Karena itu, dia mengasumsikan KIS sebagai salah satu produk BPJS.

"Menurut yang saya dengar dari pemberitaan di media, beberapa menteri mengatakan penyelenggara KIS adalah BPJS. Namun, katanya lebih diperluas. Karena itu saya berasumsi KIS ini adalah penyempurnaan program BPJS dari program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tuturnya.

Namun, Dede mengatakan DPR, dalam hal ini Komisi IX, belum mendapatkan penjelasan mendetail mengenai KIS dari pemerintah. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi IX akan mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk membicarakan hal tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning meyakini tidak akan ada yang berubah dari BPJS, kemungkinan kartunya saja yang akan berubah nama, tidak lagi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, melainkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

"BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu kan ada Undang-undangnya, jadi tidak akan ada yang berubah dari badan tersebut. Kalau mau mengubah berarti harus mengamandemen Undang-undang, dan itu tidak mungkin. Namun kemungkinan besar di pemerintahan Pak Jokowi nanti nama kartu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berubah menjadi KIS atau Kartu Indonesia Sehat sebagaimana yang kerap digaungkan Pak Jokowi saat kampanye lalu. Tapi itu hanya masalah teknis saja," jelas mantan Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.

Yang jelas, ditambahkan Ribka, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa JKN yang ada dalam BPJS yang sudah berjalan itu akan berubah atau malah dihapus, mengingat tidak sedikit masyarakat yang sudah terlanjur membuat Kartu Jaminan Kesehatan Nasional tersebut dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya.

"Intinya, di pemerintahan Pak Jokowi tidak boleh satu orang pun yang tidak terlayani dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi kami menjamin tidak ada yang berubah dari program tersebut, termasuk BPJS nya, tapi kami akan terus memperbaikinya," aku Ribka.

Berdasarkan keterangan pers BPJS Kesehatan yang dikutip, Selasa, 4 November 2014, bagi yang telah atau tengah disibukkan mengurus pembuatan kartu BPJS dan JKN, Anda tetap dapat menggunakan kartu itu. Pasalnya, program KIS ini merupakan perluasan dari program BPJS yang telah ada sebelumnya.

Dalam program BPJS, sebanyak 86,4 juta jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biaya kesehatannya dibiayai pemerintah dengan premi 19.225 per orang, menggunakan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun.

Namun, terdapat golongan masyarakat yang rentan miskin sejumlah 1,7 juta jiwa yang biaya kesehatannya belum ditutupi pemerintah. Golongan inilah yang kemudian akan mendapatkan KIS yang menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial.

Berdasarkan keterangan pers BPJS Kesehatan itu pula, KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. Berikut rincian penjelasan pihak BPJS Kesehatan mengenai ketiga program kesehatan pemerintah tersebut.



Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning

“Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN).”

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan



Masyarakat antre pelayanan BPJS

adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah suatu program, sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut.

Secara kuantitas, sasaran peserta akan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1,7 juta jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk tahap awalnya. Secara kualitas, KIS memberikan tambahan manfaat layanan preventif, promotif dan deteksi dini perorangan yang dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat yang sudah ada.

Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Untuk peserta baru yang berasal dari fakir miskin dan tidak mampu, secara bertahap akan diterbitkan KIS.

Peserta yang sudah mendapat KIS dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Prosedur pelayanan KIS sama dengan program jaminan kesehatan sebelumnya prinsipnya sama, tetap menggunakan sistem rujukan berjenjang. Untuk kontak pertama, peserta memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana yang bersangkutan terdaftar. Jika perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Dalam kondisi gawat darurat medis, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

Dalam acara *launching* telah dibagikan KIS kepada 2.775 jiwa dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dan 50 orang dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah DKI. 2.775 jiwa tersebut adalah 600 Kepala Keluarga beserta anggota keluarganya.

Untuk tahap awal, mereka yang mendapatkan KIS adalah Keluarga yang juga mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (*e-money*), dan Kartu Indonesia Pintar. Adapun mereka yang berasal dari PMKS, angka 50 orang tersebut adalah tahap awal *launching*, selanjutnya akan dibagikan kepada PMKS sesuai data dan dana yang akan dialokasikan oleh Kementerian Sosial. (as) Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie/Parle/Iw.



DPR Sukses Gelar Sidang Parlemen Asia-Pasifik di Surabaya

Senyum lebar menghiasi wajah Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan konferensi pers usai membuka secara resmi Sidang Parlemen se-Asia Pasifik membahas Percepatan Pencapaian Target MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Surabaya, Jatim, 12-13 November. Sebelumnya muncul kekhawatiran jumlah kehadiran peserta tidak memadai tetapi nyatanya 20 negara akhirnya hadir memenuhi ruang sidang. Setya Novanto yang hadir didampingi dua Wakil Ketua Fadli Zon dan Agus Hermanto menyebut pertemuan di Surabaya ini bermakna

strategis.

"Saya rasa kehadiran 20 negara ini cukup baik ya, positif, apalagi ini sempat ditunda karena ada agenda pelantikan anggota DPR. Kehadiran sebesar ini cukup untuk memetakan permasalahan dan melakukan akselerasi target MDGs," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon. DPR menurutnya bisa belajar dari parlemen negara lain untuk mencari solusi sejumlah permasalahan yang menghambat capaian *Milenium Development Goals* yang telah ditetapkan PBB sejak tahun 2000 lalu.

Sebelumnya saat membuka acara secara resmi Ketua DPR mengingcat-

kan seluruh negara yang berkomitmen menyukseskan MDGs masih punya waktu 415 hari lagi, sampai tahun 2015 nanti. "Sampai saat ini negara-negara Asia Pasifik masih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang belum usai. Parlemen memiliki fungsi legislasi, *budgeting* dan pengawasan, karena itu harus memberikan kontribusinya untuk mempercepat MDGs sehingga semua negara dapat mencapai target pada tahun 2015,"ujarnya. Parlemen menurutnya harus lebih berinisiatif dalam memformulasikan dan mengimplementasikan agenda pembangunan setelah 2015. Dis-

kusi dan pertemuan di Surabaya menjadi penting ketika hanya tersisa waktu 1 tahun untuk mencapai target MDGs.

Sejumlah tantangan ke depan yaitu permasalahan urbanisasi, dampak perubahan iklim dan *global warming*, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya harus menjadi perhatian serius. Target MDGs yang banyak belum tercapai di negara-negara Asia Pasifik, pada umumnya terkait tingginya tingkat kemiskinan, Angka Kematian anak dan angka kematian ibu (AKI) yang sangat mengkhawatirkan, dan terbatasnya akses sanitasi dan air bersih. Di Indonesia AKI mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (2007), menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Selain itu sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap air bersih. Sejumlah rekomendasi diharapkan dapat diputuskan dalam kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Parlemen Asia Pasifik dalam MDGs dan *Post 2015 Development*

Agenda (Strengthening the role of Asia Pacific Parliaments on MDGs Acceleration and Post-2015 Development Agenda).

Usulkan Empat Prinsip Agenda Pasca 2015

Batas akhir pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 sudah semakin dekat. Sejumlah persoalan yang belum tuntas diproyeksikan menjadi *Post-2015 Development Agenda*. DPR mengusulkan empat prinsip penting sebagai landasannya. "Kami mengusulkan Agenda Pembangunan Pasca-2015 berdasarkan empat prinsip yaitu kesetaraan, hak asasi manusia, kesinambungan dan kesetaraan gender," kata juru bicara delegasi Indonesia Dave Laksono.

Secara khusus politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan DPR mengusulkan slogan kebersamaan pada Agenda Pasca-2015 yaitu *Leave No One Behind* (Tidak Seorangpun Tertinggal di Belakang). Dalam paparannya ia menyebut ada 3 target MDGs yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia

yaitu kematian bayi dan ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS dan ketersediaan air bersih. "DPR akan terus bekerja sama dengan pemerintah menuntaskan permasalahan ini lewat fungsi legislasi, pengawasan dan anggarannya," ujar politisi muda putra mantan Ketua DPR Agung Laksono ini.

Sementara itu anggota parlemen dari Pakistan Maiza Hameed mengakui lambatnya capaian target MDGs terkait isu perempuan. Baginya solusi melibatkan perempuan sebagai pihak yang turut membuat kebijakan menjadi penting. "Kebijakan 30 persen anggota parlemen adalah perempuan kita lakukan, tujuannya agar perempuan dapat terlibat dalam upaya mencapai tujuan MDGs ini," kata dia.

Beate Trankmann, *Country Director UNDP (United Nations Development Programme)* di Indonesia yang hadir sebagai pembicara menegaskan langkah menekan angka kematian ibu dan anak tidak hanya terkait layanan kesehatan. "Menekan angka kematian ibu anak ini masalah kompleks, bukan hanya masalah layanan



Pimpinan DPR RI dan Ketua BKSAP berdialog dengan Presiden Vanuatu

kesehatan tapi juga terkait investasi di bidang transportasi, upaya de-teksti dini dan lain-lain,” ungkapnya.

Gross National Happiness Perlu Dipelajari

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Mohamad Hekal mengatakan Indonesia patut mempelajari *Gross National Happiness* (GNH) Index sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan sesuai program *Millenium Development Goals* (MDGs). Bhutan sebagai salah satu negara yang sudah menerapkan bisa menjadi rujukan.

“Kita akan mempelajari masukan dari Bhutan ini sebagai *case study* lah. Apa mungkin bisa diterapkan di Indonesia, nah itu yang masih perlu waktu untuk dapat menyimpulkan,” katanya. Politisi Fraksi Partai Gerindra yang memimpin pleno membahas kerja sama parlemen Asia-Pasifik dalam mempersiapkan Agenda setelah 2015 menerima banyak masukan dari delegasi. Secara khusus ia meminta delegasi Bhutan menyampaikan paparan tertulis tentang konsep GNH.

Sementara itu juru bicara delegasi Bhutan Dorji Wangdi menjelaskan GNH digagas pada tahun 1972 oleh Raja Bhutan, Jigme Singye Wangchuck yang memasukan kebahagiaan rakyat sebagai target pencapaian pemerintah dalam pembangunan. “GNH menjadikan capaian psikologis dan emosional masyarakat juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Saya menawarkan konsep ini dapat menjadi bagian dari Deklarasi Surabaya dan parlemen Asia-Pasifik dapat mendorong pemerintah di negaranya menerapkan ini,” tutur Dorji yang selalu menghadiri pertemuan dengan pakaian nasional Bhutan yang disebut *Gho*.

Indeks kebahagiaan menjadi perhatian dunia di tengah kesadaran global, pembangunan suatu negara sebaiknya tidak hanya fokus kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi (GDP) semata. PBB menurutnya sudah mengimbau negara anggotanya menerapkan GNH indeks. Tahun 2013, PBB telah mengukur Indeks



Delegasi Indonesia pada Sidang Parlemen Asia Pasifik

GNH 156 negara. Hasil tertinggi diraih negara-negara Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, Swiss, Belanda dan Swedia. Hasil terendah atau rakyatnya masih kurang bahagia didominasi negara di benua Afrika diantaranya Rwanda, Burundi, Republik Afrika Tengah, Benin, dan Togo.

Deklarasi Surabaya

Sidang dua hari parlemen Asia-Pasifik menyepakati sejumlah kesepakatan yang terangkum dalam Deklarasi Surabaya. “Deklarasi Surabaya dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 nanti, sekaligus merangkum aspirasi-aspirasi yang tertinggal dari agenda pembangunan milenium,” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat konferensi Pers usai penutupan sidang. Ia menambahkan delegasi peserta sidang menekankan adanya keterkaitan secara nasional dalam agenda pembangunan global. Deklarasi Surabaya juga berisi mengenai agenda pembangunan kedepan yang menitikberatkan pada hidup layak. Untuk itu, pemenuhan aspek-aspek mendasar menjadi krusial namun perluasan dari kebutuhan mendasar menjadi bagian yang tak terelakkan dari rencana kedepan.

Deklarasi juga menyoroti hal-hal yang selama ini lepas dari agenda MDGs seperti konflik, perang dan juga penguatan tata kelola (*demo-*

cratic governance). Menurutnya, dampak dari konflik memberikan kerugian yang besar dalam pembangunan. Selain itu, isu yang sempat mencuat lainnya, mengenai isu perubahan iklim dan bencana alam. Pasalnya beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Filipina, Vanuatu dan Tonga merupakan negara yang paling rawan akan bencana alam. Tak hanya badai tapi juga banjir, gempa bumi serta letusan gunung berapi mengancam negara Filipina. Butir terkait terorisme dan ekstremisme tidak secara eksplisit termuat didalam 24 butir Deklarasi Surabaya, tetapi tersirat didalam butir 14, 16, dan 17 yang menyinggung mengenai keamanan, perdamaian dunia, dan Hak Asasi Manusia.

Politisi FPD ini menyebut DPR RI akan membentuk *task force* (Panitia Kerja) dalam rangka mengawal agenda pembangunan pasca 2015 dan percepatan pencapaian MDGs. “Ada usulan rencana pembentukan panitia kerja atau *task force* dalam rangka mengawal capaian MDGs pada tahun 2015 nanti,” ujarnya. Parlemen kata dia, harus segera memformulasikan agenda pembangunan pasca 2015, dimana pembangunan nantinya akan memusatkan kepada pembangunan manusia atau “*people center*”. Dia menambahkan, hasil deklarasi Surabaya nantinya akan dilaporkan di parlemen negara masing-masing untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah mereka. “Agenda percepatan MDGs

ini merupakan usulan inisiatif DPR RI, dan diharapkan dapat menjadi contoh serta membawa barokah bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.

Apresiasi Partisipasi Pemprov Jatim

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pemprov Jawa Timur dalam Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Agenda, 12-13 November di Surabaya, Jatim. Baginya pelaksanaan sidang parlemen internasional di daerah adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan. "Kita hargai Pemprov Jatim cukup baik menyambut kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerahnya dalam even MDGs ini, ini peluang emas kok sebenarnya karena ada 20 negara yang hadir dalam

pertemuan ini," katanya. Ia juga memberikan catatan positif karena sejumlah UKM di Jawa Timur membuka stan, memamerkan sejumlah produk kepada para delegasi. Hanya saja upaya pengenalan itu menurutnya tidak optimal.

DPR dalam pertemuan juga menggunakan kesempatan emas ini untuk mempromosikan keragaman budaya dan pariwisata Indonesia. Kepada para tamu dari kawasan Asia Pasifik ini berkesempatan menikmati sajian Tarian Bedoyo Majakirana dan Tari Geleng Room. Anggota delegasi dari Banglades Hosne Ara Begum yang datang pada acara Jamuan Selamat Datang dengan pakaian khas negaranya memberikan komentar singkat terhadap acara malam itu. "Excellent," ujar dia sambil tersenyum dan mengacungkan jempol kanannya. Sementara Datin Hajah Zaharah Haji Jafar anggota parlemen dari

Brunei Darussalam mengatakan walaupun memiliki kemiripan tapi dari segi rasa kuliner Indonesia berbeda dengan negaranya. "Tidak samalah dengan Brunei, makanan Indonesia enak-enak," ungkap Zaharah yang datang bersama tujuh anggota delegasi.

Disela-sela kegiatan Parlemen Indonesia dan Vanuatu menyepakati dan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai program kemitraan antar parlemen. Kerjasama dua parlemen ini mengedepankan kepentingan nasional. "Dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Vanuatu, meskipun bukan negara besar tapi negara Vanuatu menjadi pusat karena dia berada di Pasifik, sehingga dapat menembus pasar Pasifik," demikian Nurhayati. (iky/si)

Foto: Eka Hindra/Parle/HR

Dua Mantan Presenter Pimpin Sidang Parlemen Asia-Pasifik



Meutya Hafid

Ada hal menarik pada sidang hari pertama *Parliamentary Even on MDGs Acceleration and the Post-2015 Development Agenda* di Surabaya, Jawa Timur. Dua anggota DPR RI, mantan presenter televisi memimpin jalannya sidang. Sesi pertama tampil Teguh Juwarno mantan presenter RCTI yang sekarang menjabat Wakil Ketua BKSAP DPR. Ia memandu parlemen dari 20 negara Asia-Pasifik membahas topik *Atteining the MDGs by 2015: Are We There Yet?*. Setelah itu ada Wakil Ketua BKSAP dari FPG Meutya Hafid mantan presenter Metro TV yang memimpin sidang pleno de-

ngan agenda *Country Report* yang disampaikan bergantian oleh juru bicara delegasi.

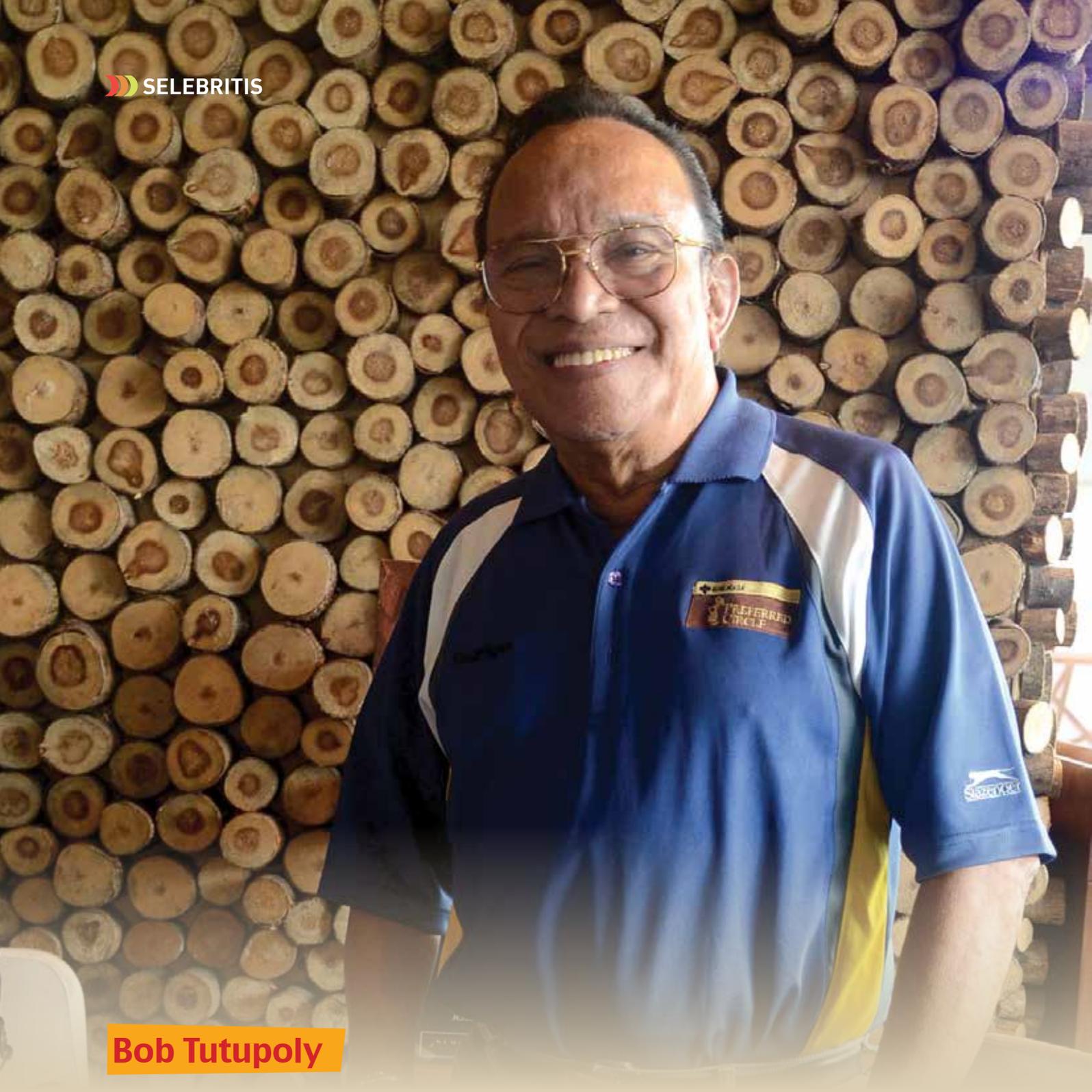
"Untuk *chairing* sidang parlemen internasional ini pertama. Saya sebenarnya dijadwalkan besok tapi kemudian tukar tempat dengan Bu Nur (Ketua BKSAP). Kami bersyukur dulu pernah di media menjadi presenter dan *anchor* paling tidak itu menolong mengurangi rasa *nervous*, grogi walaupun gimana ini internasional even," kata Teguh usai sidang di Ballroom Hotel Shangri-la, Surabaya.



Teguh Juwarno

Sementara bagi Meutya ini adalah penampilan keduanya sebagai pimpinan sidang parlemen internasional. Sebelumnya ia pernah menjadi *chairperson* dalam pertemuan parlemen Asia-Eropa di Italia. Dengan penguasaan Bahasa Inggris yang mumpuni dan penguasaan sidang yang baik kedua mantan presenter ini terlihat dapat menikmati tugasnya sebagai pimpinan sidang. "Keberhasilan *chairperson* itu diantaranya adalah apabila berhasil membuat para peserta sidang betah mengikuti jalannya sidang sampai akhir," tutur Meutya.

Akan tetapi tidak seperti ketika tampil di televisi yang sering memotong pembicaraan nara sumber, kedua mantan presenter ini tampak lebih baik hati pada para peserta sidang. Mereka terlihat sabar mempersilahkan ketika delegasi masih ingin berbicara. "Please be brief." Pesan ini hampir selalu disampaikan kepada wakil delegasi yang ingin berbicara tetapi tetap saja antusiasme peserta sidang membuat waktu pembahasan bertambah hampir satu jam. (iky).



Bob Tutupoly

Sang Legendaris yang Tetap Eksis

“Yang bisa memensiunkan penyanyi adalah pendengarnya”. Itulah ungkapan Bob Tutupoly tentang kiprahnya di dunia tarik suara yang masih tetap eksis di usianya yang ke-75 tahun. Kepada Rahayu Setiowati dari Parleментарia, Nyong Ambon yang sempat mempopulerkan lagu Mengapa Tiada Maaf ini berbagi kisah.

Lebih dari lima dekade penyanyi kelahiran Surabaya, 13 November 1939 ini menekuni bidang tarik suara. Bahkan memperingati hari jadinya 23 November 2014 kemarin Bob menggelar konser tunggalnya. Tak ada yang berubah dari pelantun tembang lawas Widuri ini. Suara emasnya tetap terdengar merdu di telinga, dan yang membuat decak kagum adalah deretan gigi putihnya yang masih terlihat utuh tatkala senyumnya menyapa seluruh pengunjung yang hadir.

Bob mengakui tidak banyak rekan seperjuangannya yang bernasib sama dengan dirinya, masih tetap eksis di panggung hiburan tanah air. Bahkan tidak sedikit yang bernasib sebaliknya. Terlepas dari kata “takdir”, Bob menilai banyak faktor yang menyebabkan penyanyi atau seniman yang kondisinya sangat memprihatinkan pasca berakhirnya masa emasnya.

Diceritakan putra kedua dari lima bersaudara pasangan Adolf L Tutupoly dan Elizabeth Wilhemina Tutupoly, dahulu kondisi dunia hiburan khususnya tarik suara sangat berbeda dengan saat ini, dimana honor penyanyi sangat sedikit. Malah terkadang hanya cukup untuk ongkos transportasi. Dengan kata lain “masa emas” penyanyi di jaman-nya sangat berbeda dengan “masa emas” penyanyi saat ini. Dimana artis saat ini meski baru mengeluarkan album pertama sudah mampu meraup honor puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Walaupun demikian, menurut Bob tidak sedikit juga yang sebenarnya telah mendapatkan kesempatan emas dengan honor yang lebih besar dari penyanyi lainnya di jaman itu, namun salah dalam menyikapinya. Alhasil materi yang didapat di

masa keemasannya itu digunakan untuk berfoya-foya tanpa memikirkan hari esok. Akibatnya ketika masa emasnya pudar, maka berakhir pula segala yang dimilikinya.

Beruntung Bob sudah diperingatkan terlebih dahulu oleh sang ayah di awal-awal keterlibatannya di dunia tarik suara. Sehingga ketika ia mampu meraih semuanya baik itu kepopuleran maupun materi hasil bernyanyi, maka Bob berusaha untuk mengolahnya dengan sebaik-baiknya.

Bob memilih berinvestasi di bidang lahan.

Caranya, ia kumpulkan sedikit demi sedikit uang hasil bernyanyi, jika dirasa sudah cukup ia gunakan untuk membeli sebidang tanah. Cara itu terus dilakukan Bob, hingga kini ia telah memiliki beberapa bidang tanah di berbagai wilayah.

“Saya yakin investasi tanah tidak akan rugi. Harga tanah akan selalu naik. Puji Tuhan saya sekarang tinggal memetik hasil investasi itu,” ungkapnya.

Faktor lain yang dinilai Bob ikut memberikan “sumbangan” akan kondisi keprihatinan yang tengah dirasakan teman-teman seprofesinya, yakni minimnya perhatian pemerintah terhadap para seniman senior yang notabene pernah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Belum lagi ketiadaan undang-undang yang dapat melindungi karya-karya para seniman, padahal lewat karya seni itulah yang dijadikan pegangan hidup para seniman.

Angin segar mulai dirasakan para seniman termasuk musisi, setelah beberapa waktu lalu DPR RI mengesahkan Undang-Undang hak intelektual (HAKI). Paling tidak, adanya UU tersebut akan menjadi payung

hukum yang dapat memberikan perlindungan atas hasil intelektualitas setiap orang termasuk karya seni para musisi.

“Saya bersyukur jika memang sudah ada UU yang benar-benar bertujuan untuk melindungi karya seni para seniman termasuk musisi, namun undang-undang akan tinggal undang-undang jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” paparnya. Oleh karena

nanya, Bob berharap ada n y a



ketegangan dari para penegak

hukum untuk benar-benar menjalankan apa yang sudah diamanatkan Undang-undang.

Sementara itu sebagai teman seprofesi dan seperjuangan, Bob tentu tidak tinggal diam melihat kondisi rekannya yang memprihatinkan. Sebut saja kondisi yang tengah dialami oleh penyanyi senior Benny Panjaitan dan Mus Mulyadi serta beberapa artis senior lainnya. Oleh karena itu bersama dengan artis legendaris lainnya, Bob menggelar konser amal. Penggalangan dana yang hasilnya seutuhnya disumbangkan untuk artis senior yang tengah sakit.

“Mereka tengah menderita sakit yang cukup lama hingga membutuhkan biaya pengobatan yang ti-



dak sedikit," ujarnya.

Tekad Menjadi Penyanyi

Seandainya waktu bisa diputar kembali, masih teringat dalam benak Bob puluhan tahun silam ketika sang ayah bersikukuh melarang anak keduanya itu untuk menjadi penyanyi. Bahkan untuk menyurutkan keinginan Bob menjadi penyanyi, sang ayah sempat menakut-nakutinya dengan memberikan contoh.

"Bob, lihat pria itu suaranya sangat bagus, saya mengaguminya. Tapi lihat apa pekerjaan dia? Dia hanya menjadi tukang kayu? Apa kamu mau seperti itu?," kisah Bob menirukan ucapan sang ayah.

Tak banyak kata yang ia komentari dari perkataan sang ayah tersebut, namun dalam hati tekadnya untuk menjadi penyanyi sudah bulat. Ia yakin Tuhan memberikan bakat menyanyi kepadanya bukan tanpa maksud, tak lain sebagai modal baginya untuk menata hidupnya ke depan.

"Saya yakin Tuhan memberikan saya bakat menyanyi pasti dengan sebuah tujuan, yakni sebagai modal saya untuk ke depannya. Tidak ada kata tua dan pensiun untuk penyanyi, karena yang bisa memensiskan penyanyi adalah pendengarnya sendiri," jelasnya. Contoh yang diberikan sang ayah itu malah menjadikan pecutan agar ia tidak seperti tukang kayu tadi.

Kesempatan perdananya tampil di panggung nasional datang saat acara anak yang diselenggarakan RRI Yogyakarta. Ketika itu Bob kecil mampu menarik perhatian para pengunjung yang hadir lewat lagu *Sarinande*. Lagu itu jualan yang menjadi awal keterlibatannya di sebuah dapur rekaman milik perusahaan rekaman Lokananta, Solo Jawa Tengah.

Memasuki usia remaja, bersama beberapa rekannya Bob membentuk sebuah band. Dari satu panggung ke panggung band yang digawangi Bob ini mampu menghibur pengunjung yang datang. Betapa bahagianya Bob setiap usai acara ia mendapat honor menyanyi yang ia sebut uang lelah.

"Uang lelah itu saya gunakan untuk membeli bandeng dan minuman oma dan opa saya. Karena saat itu keduanya yang betul-betul mengerti dan mendukung saya bernyanyi. Sementara ayah saya jelas-jelas menentang hal itu," paparnya.

Memasuki usia SMA bersama dengan Didi Pattirane, Lody Item, Bob membentuk band baru beraliran jazz yang dinamai Bhineka Ria. Band ini menjuarai festival band se-Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya. Dapat diduga, tawaran demi tawaran untuk mengisi berbagai acara pun menghampiri band ini. Ayah Bob mulai bersikap keras. Bob tidak boleh pentas hingga larut malam. Bahkan, sang ayah tidak

“Uang lelah itu saya gunakan untuk membeli bandeng dan minuman oma dan opa saya. Karena saat itu keduanya yang betul-betul mengerti dan mendukung saya bernyanyi. Sementara ayah saya jelas-jelas menentang hal itu,”

mengizinkan Bob untuk bolos sekolah hanya demi manggung atau bernyanyi.

Bob pun mengamini keinginan sang ayah tersebut. Namun saat masuk bangku perkuliahan, Bob terpaksa mengabaikan hal itu, pasalnya jiwa seninya lebih kuat dibanding harus duduk manis di dalam kelas perkuliahan. Mengetahui hal tersebut, ayah Bob tak tinggal diam. Ia berinisiatif memindahkan perkuliahan Bob dari salah satu STIE di Surabaya ke Universitas Padjajaran, Bandung.

Kali ini sang ayah salah strategi. Pasalnya, memindahkan Bob ke Bandung malah membuat jiwa seni anak keduanya itu semakin menjadi. Bob bergabung dengan band *Crescendo* yang konon sering tampil di Hotel Hommandan Bumi Sangkuriang. Bahkan di Bandung ini juga ia sempat bergabung dalam *The Jazz Riders* yang kemudian menjadi penyanyi tetap di Hotel Indonesia, Jakarta.

Di Jakarta, karir bermusik Bob semakin terbuka luas, terlebih setelah ia berhasil tampil memukau membawakan lagu *Whispering hope*. Nama Bob mulai dikenal luas lewat lagu *Tinggi Gunung Seribu Janji*, *Tiada Maaf Bagimu* karya Yessy Wenas, dan *Widuri*. Ketiga lagu itulah yang hingga kini masih abadi, bahkan tidak sedikit artis muda yang mulai mengaransemen dan merekam ulang lagu tersebut. Tak berlebihan jika kita menyematkan kata *Legend* atau legendaris kepada Bob Tutupoly. (Ayu) Foto: Ayu/Parle/Iw.

Pengurus PIA Periode 2014-2019 Resmi Dilantik



Ketua DPR RI berjabat tangan dengan Ketua PIA

“Untung saya harus menyematkan Pin ke istri sendiri, coba kalau harus menyematkan Pin ke wanita lain, bisa gemetar saya,” ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto sambil tertawa, disambut tawa seluruh hadirin yang memenuhi Gedung Pustakaloka, Senayan Jakarta, Rabu (26/11).

Ya, penyematan pin oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto kepada Deisti A Novanto yang tak lain adalah sang istri sendiri itu menandai kepengurusan PIA (Persaudaraan Istri Anggota DPR RI) telah resmi dilantik dan terbentuk. Dalam sambutannya, Novanto menjelaskan bahwa tugas dan peran suami sebagai anggota DPR yang notabene merupakan wakil rakyat saat ini tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Disinilah perlunya peran dan dukungan dari istri.

“Peran istri sangat besar bagi perkembangan karir suami, bahkan istri menjadi pendukung utama tugas dan peran suami baik sebagai pemimpin keluarga juga sebagai anggota DPR,” ujar Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam sambutannya.

Dilanjutkan Novanto, lebih jauh istri (anggota PIA) berperan strategis dalam pendidikan dan perkembangan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan segala program yang telah disusun baik untuk keanggotaan PIA itu sendiri maupun program sosial untuk masyarakat luas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Novanto menjelaskan bahwa saat ini DPR sudah jauh lebih solid dari sebelumnya, yakni sudah tidak ada lagi

KIH dan KMP. Melainkan yang ada keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban amanat dan aspirasi rakyat. Ucapan Ketua DPR tersebut langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari para anggota PIA serta seluruh undangan yang hadir.

Bahkan di era parlemen modern saat ini, segala kegiatan keparlemenan dari DPR RI, termasuk PIA dapat dengan mudah di akses melalui berbagai jaringan pemberitaan di DPR, seperti website resmi DPR, Buletin Parlemenaria, Majalah Parlemenaria, TV Parlemen, bahwa Sosial Media seperti Twitter dan Facebook. Dengan demikian semuanya sangat terbuka dan diharapkan bisa mendapat *feed back* positif juga dari masyarakat.

Menanggapi sambutan Ketua DPR RI tersebut, Ketua PIA yang baru saja dilantik, Deisti A Novanto bersyukur selain karena kepengurusan PIA periode 2014-2019 telah resmi terbentuk, ia juga bersyukur anggota PIA (istri anggota) sudah jauh lebih solid dari pada anggota DPR itu sendiri. Karena dilanjutkannya, pada dasarnya terbentuknya PIA itu sendiri sebagai sebuah ajang silaturahmi antar istri anggota, disamping juga ada misi sosial yang tetap harus dijalkannya.

“PIA selain sebagai ajang silaturahmi juga mengembangk misi-misi sosial untuk ibu-ibu secara keseluruhan dan masyarakat umum, oleh karena itu PIA tidak bisa menunggu lama untuk segera menjalankan program-program sosial yang telah disusun tersebut. Dalam waktu dekat kami akan langsung mendatangi beberapa daerah yang tengah terkena bencana. Meski tidak banyak yang bisa kita perbuat, namun paling tidak keberadaan PIA akan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tengah terkena bencana,” papar Deisti A Novanto.

Sementara itu Wakil Ketua PIA bidang Pengembangan dan Kerjasama Humas dan Media, Katharine Grace Fadli Zon meyakini di bawah kepemimpinan Ketua PIA yang baru, Destia PIA akan semakin berkembang dan semakin sukses dalam menjalankan program-programnya. Hal ini terbukti dengan hadirnya tujuh puluh lima persen anggota PIA dalam pelantikan pengurus PIA kali ini.

“Alhamdulillah hampir tujuh puluh lima persen anggota PIA dari sepuluh fraksi ikut menghadiri pelantikan kepengurusan baru ini. Ini sebuah langkah yang baik bagi kepemimpinan bu Deisti ke depan. Karena memang pada dasarnya PIA ini bukan *pure* organisasi politis, namun sebagai ajang silaturahmi disamping ada tugas-tugas mulia lainnya yang harus dijalankan PIA untuk masyarakat luas dan utuk bangsa secara keseluruhan,” ujar Grace Fadli Zon. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/Iw.



Foto bersama peserta press gathering di Wisma Griya Shaba Kopo Bogor

Tak Kalah Seru

Pilih Ketua Wartawan Dibanding Ketua DPR

Karena tugas-tugas kesehariannya sangat akrab dengan kegiatan para wakil rakyat di Komplek Parlemen Senayan, tak mengherankan ketika menggelar acara sendiri-memilih ketua untuk dua tahun mendatang, ternyata berlangsung alot. Pada acara yang berlangsung di Wisma Griya Sabha, Kopo, Bogor belum lama ini, para wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat wartawan DPR juga diwarnai interupsi dan perdebatan sebagaimana rapat-rapat DPR.

Seru dan alotnya pemilihan Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR sudah terlihat sejak awal ketika acara dimulai sekitar pukul 22.00 Sabtu. Pada awal rapat pemilihan sempat dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko. Kemudian diusulkan pemilihan pimpinan sementara dari lima unsur media yang ada di DPR, yaitu wartawan elektronik, wartawan cetak, wartawan media online, wartawan foto dan wartawan radio.

Seluruh peserta menyetujui Fredi dari Jurnal Nasional (Jurnas) untuk menjadi Ketua rapat sementara. Didampingi Haryono Puji Santoso dari Rakyat Merdeka, Jamida dari Suara

Indonesia Baru, Wening (fotografer Jurnal Nasional) dan Nove dari Radio Cakrawala.

Disinilah proses panjang terjadi antara lain soal tata tertib, mekanisme pemilihan, penjangkaran calon hingga akhirnya pemungutan suara. Yang membuat proses pemilihan tersebut berlangsung lama karena banyaknya peserta yang mengajukan usulan dan saling debat hingga mencapai dua putaran.

"Ternyata pemilihan ketua wartawan tak kalah seru dibanding pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, kalau DPR diwarnai hujan interupsi dan, ramainya pemilihan Ketua Koordinatoriat wartawan hanya debat dan prosesnya lama," komentar seorang wartawan. Acara pemilihan ini menyita waktu 10 jam lebih, dari Sabtu malam tanggal (8/11) pukul 22.00 Wib hingga Minggu pagi pukul 8.30 Wib.

Singkatnya, lima calon ditetapkan, namun karena dua calon tidak memenuhi syarat, akhirnya hanya ada tiga calon. Ketiga calon itu adalah Randy dari Rakyat Merdeka, Zul Sikumbang dari Antara dan Hilman dari Metro TV.

Dari ketiga calon tersebut, setelah melalui pemungutan suara akhirnya hanya dua orang yang lolos, yakni Zul Sikumbang memperoleh 46 suara dan Hilman 47 suara, sementara Randy mendapatkan 26 suara, satu suara abstain dan dua suara tidak sah.

Dari dua calon ini dalam pemungutan suara sesi kedua akhirnya dimenangkan oleh Hilman mengungguli pesaingnya, Zul Sikumbang dari Antaranews.com, dengan perolehan 67 suara, sementara Zul mendapatkan 41 suara dan dua suara abstain. Secara resmi akhirnya Hilman Matauch menjadi Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR untuk periode 2014-2016.

Dalam sambutan singkatnya, Hilman berjanji akan merangkul seluruh unsur media Wartawan Koordinatoriat DPR. Ia meminta kepada rekan-rekannya untuk memberikan saran dan masukan kepada dirinya selama menjabat Ketua Koordinatoriat DPR sampai dua tahun mendatang.

Kerja sama intensif

Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto dalam sambutannya



Foto bersama pengurus baru Koordinatoriat Wartawan DPR RI

berharap, agar tercipta komunikasi dan kerjasama yang intensif, serta pengertian dan pemahaman akan peran masing-masing antar DPR dan pers, sehingga dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Dia mengharapkan adanya komunikasi dan kerjasama antara DPR dan Wartawan yang baik. "Wartawan menjadi ujung tombak dari seluruh informasi yang ada di DPR, dan DPR secara kelembagaan, sangat terbuka kepada media massa untuk meliputi seluruh aktifitas dan kegiatan di lingkungan DPR," katanya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang ini menegaskan, media massa adalah nafas dari informasi. Sehingga, tidak ada yang boleh membelenggu, mengurangi, bahkan menyulitkan awak media untuk meliput.

"Media adalah nafas dari informasi. Rakyat butuh informasi, dan media dapat memberikannya. Tidak mungkin saya berbicara langsung dengan rakyat. Media dapat mengkomodir semua hal itu," imbuh Politisi Demokrat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menyampaikan bahwa Gedung DPR RI merupakan pusat kegiatan kenegaraan, sehingga perlu adanya penataan penggunaan gedung untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh aktifitas di Kompleks Parlemen, termasuk aktifitas jurnalis.

"Kami sangat mengharapkan sa-

ran dan masukan dari rekan-rekan media, sehingga gedung menjadi aman dan nyaman, untuk segala aktifitas, termasuk peliputan. Namun perlu kami sampaikan, pengaturan yang dilakukan bukan untuk membatasi peliputan, tapi bersifat pengaturan agar semua berjalan baik," tambah Agus.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dalam sambutannya mengatakan, *Press Gathering* Setjen DPR dan Wartawan Koordinatoriat DPR RI memiliki agenda utama pemilihan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR untuk periode 2014-2016.

Menurut Win-panggilan akrab Sekjen DPR, setiap saat, terjadi dinamika yang menarik di Kompleks Parlemen. Namun, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi mengenai kegiatan DPR. Dengan adanya beragam media massa yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat DPR RI, informasi itu dapat tersaji dengan cepat ke masyarakat.

"Media massa sangat membantu dalam hal memberikan informasi yang positif. Media massa berperan sebagai jembatan informasi bagi DPR kepada masyarakat. Sehingga, tercipta suasana saling melengkapi antara wartawan dengan DPR," jelasnya.

Wartawan tambah Win, juga berperan dalam mengkritisi dan meng-

ingatkan berbagai proses kerja yang sedang berjalan di Alat Kelengkapan Dewan. Sehingga, tercipta hubungan saling menguntungkan dan membutuhkan..

"DPR dan wartawan saling membutuhkan. Anggota DPR membutuhkan media untuk menyosialisasikan segala kegiatannya, sedangkan wartawan membutuhkan berita, apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan dapat menjadi bahan berita," jelasnya.

Terkait dengan acara ini, dalam pidatonya, Win menyatakan bahwa *press gathering* bukan hanya sekedar refreshing dari rutinitas di Komplek Parlemen, melainkan ajang silaturahmi, baik sesama wartawan, maupun wartawan dengan DPR dan Setjen DPR.

"Acara *press gathering* kita akan setahun 2 (dua) kali. Namun, kali ini ada pemilihan pengurus baru Wartawan Koordinatoriat DPR Periode 2014-2016. Saya mencatat, setidaknya ada 140 wartawan yang datang, dari berbagai media," imbuh Win.

Ia berharap, pemilihan kepemimpinan ini dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dinamis dan mengutamakan azas kekeluargaan. Selain itu, pengurus baru dapat melanjutkan kerjasama baik yang telah dirintis dan ditingkatkan di masa mendatang.

"Harapannya, pengurus baru dapat bekerjasama dengan Setjen DPR. Terbina dengan baik, yang selama ini sudah terbina dengan baik. Namun hubungan baik ini bukan berarti meniadakan masukan, karena itu tetap penting. Meskipun perspektifnya beda, namun pemahaman sama, yaitu untuk kemajuan dan memperkuat lembaga DPR," harap Win menambahkan. (spy) Foto: Andri/Parle/Iw.



ISLAH DPR DIBUKUKAN

Penandatanganan damai dua kubu DPR antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Senin 17 Nopember lalu di Ruang Pustaka Loka mendapat perhatian luas berbagai kalangan masyarakat. Tak terkecuali pers, ratusan awak media termasuk media televisi dan cetak serta *on line* mengabadikan momen bersejarah ini.

Bahkan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengusulkan islah dua kubu DPR ini layak dibukukan. "Kita mengusulkan membuat buku mengenai kisah munculnya dua kubu sampai penandatanganan ini, tanpa menonjolkan siapapun," ujar Pram-panggilan akrab mantan Wakil Ketua DPR yang juga juru runding dari KIH.

Pasalnya, lanjut Pram, kasus seperti ini kemungkinan bisa terjadi lagi, supaya menjadi pembelajaran bagi politisi-politisi muda. Ini pembelajaran yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah kalau terjadi *stag* atau *gridlock*- mengunci karena aturan tata tertib yang disusunnya. Dalam menyelesaikan masalah seperti ini maka ego dihilangkan dan pernyataan atau statemen-

statemen keras di kurangi.

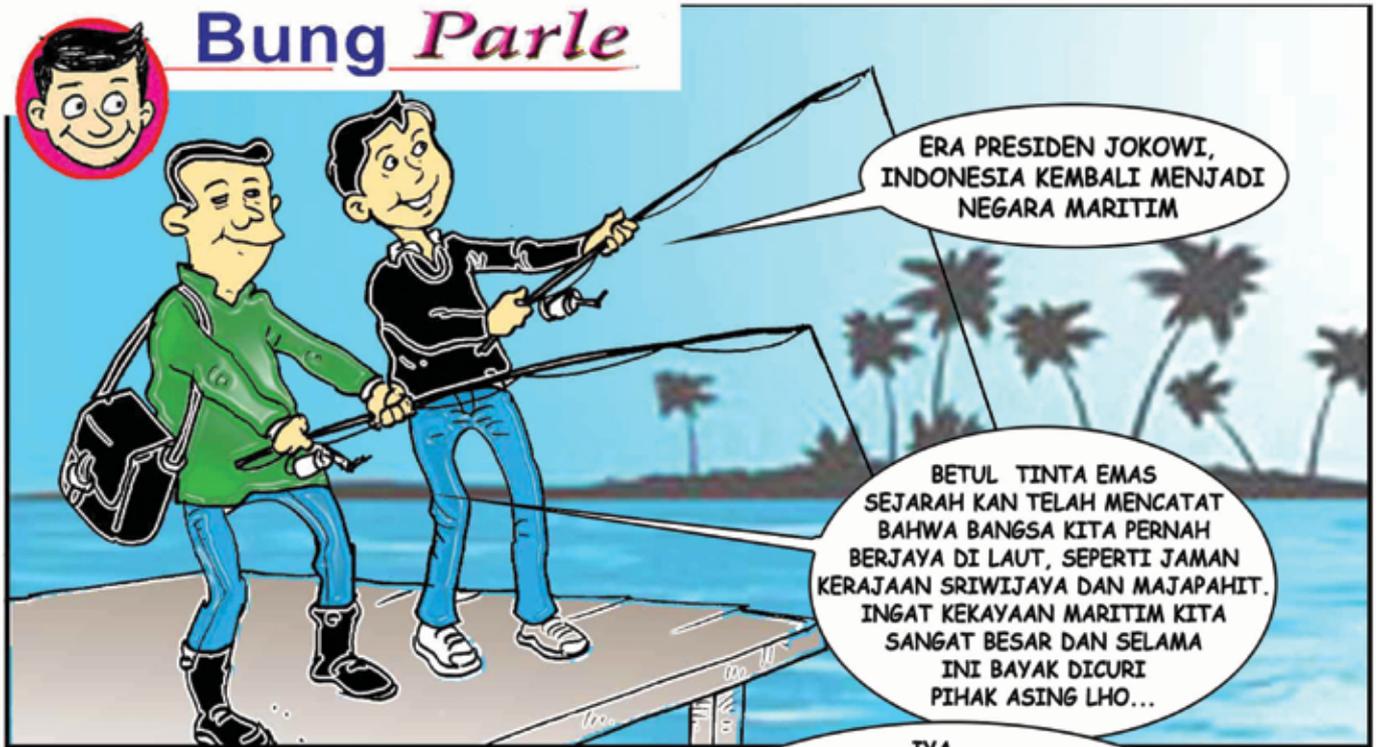
Menurut Pramono, peristiwa ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini. Sejarah DPR yang telah memasuki usia ke -69 dan DPR periode 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober yang lalu. Ia menyebut dalam menyelesaikan masalah ini memerlukan kerendahan hati dan kebersamaan serta tekad menomorsatukan kepentingan bangsa diatas kepentingan individu atau kelompok.

Hadir dalam acara ini seluruh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi serta tokoh-tokoh parpol. Juru runding KMP Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN mengajak, mari kita bersyukur, sebab secara substansi dengan penanda-tanganan damai dua koalisi ini maka telah terselesaikan persoalan besar. Ini menjadi sejarah, dimana dalam menyelesaikan potensial problem yang bisa membuat *stag* perjalanan DPR, bila tidak diselesaikan dengan tuntas.

Kita menunggu siapa yang berminat menyusun buku islah ini... (mp) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.



Bung Parle



ERA PRESIDEN JOKOWI,
INDONESIA KEMBALI MENJADI
NEGARA MARITIM

BETUL TINTA EMAS
SEJARAH KAN TELAH MENCATAT
BAHWA BANGSA KITA PERNAH
BERJAYA DI LAUT, SEPERTI JAMAN
KERAJAAN SRIWIJAYA DAN MAJAPAHIT.
INGAT KEKAYAAN MARITIM KITA
SANGAT BESAR DAN SELAMA
INI BAYAK DICURI
PIHAK ASING LHO...



MUDAH-MUDAHAN
KOMITMEN TENTANG
KEMBALI KE LAUT ITU
TAK HANYA INDAH
DALAM WACANA
KARENA MEMANG
CUKUP BERAT
TANTANGANNYA



IYA...
INI BUKAN HANYA MENCARI
SUMBER KEKAYAAN DI LAUT TAPI JUGA SOAL
PENGAMANANNYA DAN INI MEMERLUKAN
KOORDINASI YANG BAIK ANTARA APARAT
KEAMANAN, KEMENTERIAN KEMENTERIAN
TERKAIT JUGA MASYARAKAT



TENANG
BUNG, DPR RI KAN
TELAH BERHASIL MENGESAHKAN
UU KELAUTAN SEBAGAI
LANDASAN HUKUMNYA...

SEMOGA
DENGAN PENGELOLAAN
LAUT YANG BAIK BISA MENCIPTAKAN
MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL
MAKMUR DAN SEJAHTERA
YA DUL...